



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2026

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024-2026**

BAPPERIDA PROVINSI PAPUA

KANTOR GUBERNUR PAPUA
JL. SOA SIU DOK II
KOTA JAYAPURA
PAPUA



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencanan pembangunan menengah untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan digunakan oleh Pejabat kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 2

RPD Provinsi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah di masa transisi menuju ke pemilihan umum Kepala Daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) RPD Provinsi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan
 - b. bab II gambaran umum
 - c. bab III gambaran keuangan daerah
 - d. bab IV permasalahan dan isu strategis
 - e. bab V tujuan dan sasaran
 - f. bab VI strategi, arah kebijakan dan program prioritas
 - g. bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
 - h. bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - i. bab IX penutup
- (2) RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN
Pasal 4

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD Tahun 2024-2026.

Pasal 5

RPO Tahun 2024-2026 dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau; dan
- c. perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar_ biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Ditetapkan
di Jayapura
pada tanggal
15 Maret
2023

Pih. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE,
MM

Diundangkan
di Jayapura
Pada tanggal 16
Maret 2023

Sekretaris Daerah Provinsi
Papua CAP/TID
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



SOFIA BONSPIA, SH, M.Hum
NIP. 197009 199712 2 001

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>viii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	3
I.3 Hubungan Antar Dokumen	7
I.4 Maksud dan Tujuan	8
I.5 Sistematika Dokumen RPD	9
<i>BAB II GAMBARAN UMUM</i>	<i>12</i>
II.1 Aspek Geografi dan Demografi	12
II.1.1 Aspek Geografi	12
II.1.2 Aspek Demografi	59
II.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	63
II.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	63
II.2.2 Aspek Daya Saing Daerah	75
II.2.3 Aspek Pelayanan Umum	81
<i>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</i>	<i>130</i>
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	130
III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	131
III.1.2 Neraca Daerah	135
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	136
III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	137
III.2.2 Analisis Pembiayaan	137
III.3 Kerangka Pendanaan	140
III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	140
III.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran	145

III.3.3 Kerangka Pendanaan	145
<i>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</i>	147
IV.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	147
IV.2 Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua	149
IV.3 Kebijakan dalam RPJMN.....	156
IV.4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah	156
IV.5 Evaluasi Capaian SDGs	157
IV.6 Isu-Isu Strategis Provinsi Papua	157
IV.6.1 Isu Strategis Internasional.....	157
IV.6.2 Isu Strategis Nasional	164
IV.6.3 Isu Strategis Provinsi Papua	167
<i>BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....</i>	177
V.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua.....	177
V.2 Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026.....	180
V.3 Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025	181
V.4 Penyelarasan dengan RIPP tahun 2022 – 2041	186
<i>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS.....</i>	188
VI.1 Strategi Pembangunan	188
VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan	189
VI.3 Program Prioritas Daerah	191
<i>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM</i>	
<i>PERANGKAT DAERAH.....</i>	229
VII.1 Program Perangkat Daerah	229
<i>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	267
VIII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	267
VIII.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	272
<i>BAB IX PENUTUP</i>	31312

Daftar Tabel

Tabel II.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	14
Tabel II.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua	15
Tabel II.3	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua	17
Tabel II.4	Kelerengan Provinsi Papua	19
Tabel II.5	Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua	25
Tabel II.6	Satuan Litologi Menurut Fisiografi	28
Tabel II.7	Wilayah Sungai di Provinsi Papua.....	30
Tabel II.8	Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua	33
Tabel II.9	Curah Hujan di Provinsi Papua.....	34
Tabel II.10	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2022.....	37
Tabel II.11	Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022	40
Tabel II.12	Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi	47
Tabel II.13	Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi.....	50
Tabel II.14	Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi.....	52
Tabel II.15	Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi	53
Tabel II.16	Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua	56
Tabel II.17	Tabel Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	57
Tabel II.18	Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	60
Tabel II.19	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2021	60
Tabel II.20	Jumlah Penduduk Orang Asli Papua (OAP)	61
Tabel II.21	Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua	61
Tabel II.22	Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2020	62
Tabel II.23	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Miliar rupiah) 2018-2021	63

Tabel II.24	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengan (Miliar rupiah) 2018-2023.....	66
Tabel II.25	Tingkat Inflasi Month to Month, year to Year to date dan Year to Year Tahun 2021-2023 Provinsi Papua.....	66
Tabel II.26	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Menurut Kabupaten	66
Tabel II.27	Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022.....	67
Tabel II.28	Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022	68
Tabel II.29	Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2017-2022	69
Tabel II.30	Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2017-2022	70
Tabel II.31	Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua	71
Tabel II.32	Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan	71
Tabel II.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021	72
Tabel II.34	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2022	73
Tabel II.35	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	75
Tabel II.36	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (juta rupiah).....	76
Tabel II.37	Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (persen).....	77
Tabel II.38	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (juta rupiah).....	79
Tabel II.39	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (persen).....	80
Tabel II.40	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua	82
Tabel II.41	Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua.....	82

Tabel II.42	Perkembangan Guru di Provinsi Papua	84
Tabel II.43	Perkembangan Murid di Provinsi Papua	84
Tabel II.44	Angka Kematian Bayi	85
Tabel II.45	Angka Kematian Ibu	86
Tabel II.46	Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua	87
Tabel II.47	Panjang Jalan di Provinsi Papua (km).....	88
Tabel II.48	Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022.....	90
Tabel II.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021	92
Tabel II.50	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020	93
Tabel II.51	Konsumsi Kedelai yang terdapat pada tahu, tempe dan kecap di Provinsi Papua 2020.....	93
Tabel II.52	Konsumsi Total setara Kedelai (tahu, tempe dan kecap) di per Provinsi Papua 2018-2020	93
Tabel II.53	Prevelensi Penududuk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Tahun 2017-2021 (Persen).....	93
Tabel II.54	Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (Persen).....	93
Tabel II.55	Peraliohan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)	93
Tabel II.56	Persentase Penduduk Usia 0-17 Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020	93
Tabel II.57	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020.....	939
Tabel II.58	Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar).....	100
Tabel II.59	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)	102
Tabel II.60	Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Persentase Koperasi Aktif 2022	109
Tabel II.61	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017- 2021 (Unit)(Juta US\$)	110

Tabel II.62	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)	110
Tabel II.63	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Tahun 2015-2019.....	111
Tabel II.64	Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2016-2019 (unit)...	111
Tabel II.65	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2016-2019 (Unit).....	112
Tabel II.66	Perkembangan Warisan Tak Benda Papua	114
Tabel II.67	Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ..	118
Tabel II.68	Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua	119
Tabel II.69	Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ..	112
Tabel II.70	Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ..	120
Tabel II.71	Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2020 – 2022.....	124
Tabel II.72	Riset Unggulan Daerah/Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020 – 2022.....	125
Tabel II.73	Riset Bersama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 – 2021	125
Tabel II.74	Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2017-2021	128
Tabel III.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	113
Tabel III.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua.....	135
Tabel III.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2019 - 2022	137
Tabel III.4	Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua	137
Tabel III.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua	139
Tabel III.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	139
Tabel III.7	Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.....	141
Tabel III.8	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.....	1433

Tabel III.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua	145
Tabel III.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.....	145
Tabel IV.1	Permasalahan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua	147
Tabel IV.2	Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	154
Tabel IV.3	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	154
Tabel IV.4	Intensitas Emisi (ton CO ₂ /Miliar Rp).....	154
Tabel V.1	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.....	177
Tabel V.2	Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026	183
Tabel VI.1	Prioritas Pembangunan Daerah.....	192
Tabel VII.1.	Rencana Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	231
Tabel VIII.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.....	261
Tabel VIII.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.....	273

Daftar Gambar

Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Papua	18
Gambar II.2 Peta Topografi Provinsi Papua	228
Gambar II.3 Jenis Tanah Entisol	221
Gambar II.4 Jenis Tanah Inceptisol.....	221
Gambar II.5 Jenis Tanah Mollisol	23
Gambar II.6 Jenis Tanah Histosol	24
Gambar II.7 Jenis Tanah Ultisol	25
Gambar II.8 Peta Litologi Provinsi Papua	28
Gambar II.9 Peta Aliran Sungai (DAS)Provinsi Papua	34
Gambar II.10 Peta Klimatologi Provinsi Papua	36
Gambar II.11 Peta Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Papua	38
Gambar II.12 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022	39
Gambar II.13 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	41
Gambar II.14 Rangkaian Kerentangan Berpadu dengan bahaya yang Menimbulkan Bencana	45
Gambar II.15 Peta Kawasan Rawan Bencana.....	48
Gambar II.16 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	50
Gambar II.17 Peta Rawan Bencana Banjir	52
Gambar II.18 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040	59
Gambar II.19 Grafik Fluktuasi Kontribusi Sektor lapangan Usaha terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2017-2021	78
Gambar II.20 Kondisi Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua	83
Gambar II.21 Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua	88
Gambar II.22 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Tahun 2016-2020.....	94
Gambar II.23 Indeks Kualitas Air, Udara dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020	88
Gambar II.24 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua	88

Gambar II.25 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	101
Gambar II.26 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang).....	102
Gambar II.27 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)	103
Gambar II.28 Jumlah Penumpang Internasional Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang).....	104
Gambar II.29 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)	103
Gambar II.30 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)	103
Gambar II.31 Jumlah Penumpang Domestik Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang).....	105
Gambar II.32 Jumlah Penumpang Domestik Berdasarkan Moda Transportasi Kapal (orang).....	106
Gambar II.33 Persentase Penduduk dan Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler	106
Gambar II.34 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler (Desa)	107
Gambar II.35 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS (Desa) ...	107
Gambar II.36 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah (Desa).....	108
Gambar II.37 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki/Menguasai Komputer..	108
Gambar II.38 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 (Unit)	109
Gambar II.39 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019...	115
Gambar II.40 Kondisi Perpustakaan Provinsi Papua.....	116
Gambar II.41 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016	117
Gambar IV.1 Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	160

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sesuai Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dimana sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, periode akhir masa jabatan Gubernur Papua berakhir pada bulan September 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dalam penyusunan RPD, pemerintah Provinsi Papua menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023

perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Penyusunan Dokumen RPD Tahun 2024-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025 tahap terakhir dalam rangka menuntaskan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi, Dokumen RPD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPD, yang meliputi :
 - a. Pembentukan tim penyusun RPD;
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD;
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan rancangan RPD, dengan memperhatikan:
 - a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
 - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
 - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023;
 - d. Isu-isu Strategis yang berkembang;
 - e. Kebijakan nasional;
3. Regulasi yang berlaku;
4. Konsultasi Publik, dalam rangka: menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.
5. Penyusunan rumusan Rancangan akhir RPD, yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan Rancangan menjadi rancangan akhir;
 - b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - c. Fasilitasi Ranperkada tentang RPD;
 - d. Konsultasi rancangan akhir RPD ke Gubernur.
6. Penetapan RPD, meliputi:
 - a. penyempurnaan rancangan akhir RPD sesuai hasil konsultasi;
 - b. Penetapan RPD

- c. Penyampaian RPD kepada DPRD;
- d. Verifikasi dan Penetapan Renstra

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; dan
 34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025.

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, serta RTRW 2013-2033. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dengan arah kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Papua.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategis dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program yang sudah di mutahirkan

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

e. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

I.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan di masa transisi menjelang Pilkada;
- b. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Papua pada periode tahun 2024-2026;
- c. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Papua selama periode tahun 2024-2026;

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2024-2026 lingkup Perangkat Daerah;

- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah

I.5 Sistematika Dokumen RPD

Dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Provinsi Papua serta gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Provinsi Papua.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2024-2026

BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1 Aspek Geografi

II.1.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara astronomis, Wilayah provinsi Papua berada pada Posisi geografis di antara $1^{\circ} 8' 20.8752''$ LU - $4^{\circ} 6' 58.626''$ LS dan $134^{\circ} 5' 58.8444''$ - $141^{\circ} 0' 37.5912''$ Bujur Timur. Batasan wilayah dengan luas kurang lebih 13.158.285,38 hektar meliputi:

- a. wilayah darat; dan
- b. wilayah laut.

Wilayah Darat seluas kurang lebih 8.268.837,32 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektar, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Keerom;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Kabupaten Sarmi;
7. Kabupaten Supiori;
8. Kabupaten Biak Numfor; dan
9. Kabupaten Waropen.

Wilayah Provinsi Papua tidak hanya mencakup wilayah daratan namun juga memiliki wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang ada dalam batas wilayahnya. Dari 9 (sembilan) kabupaten/kota tersebut terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Biak Numfor;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Sarmi;
6. Kabupaten Waropen;
7. Kabupaten Supiori; dan
8. Kabupaten Mamberamo Raya.

Wilayah Laut sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh tujuh koma Sembilan tujuh) hektar.

Umumnya sebaran pulau-pulau tersebar di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. Pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di Provinsi Papua terdapat adalah 4 (empat) pulau yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi, Pulau Liki di Kabupaten Sarmi (BIG, 2018).

Wilayah adat di Provinsi Papua mencakup 2 (dua) wilayah adat di ruang darat maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang secara budaya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar di:

- a. Wilayah Mamta/TABI meliputi:
 1. Kota Jayapura,
 2. Kabupaten Jayapura,
 3. Kabupaten Keerom,
 4. Kabupaten Sarmi, dan
 5. Kabupaten Mamberamo Raya

- b. Wilayah Saireri meliputi:
1. Kabupaten Biak Numfor,
 2. Kabupaten Supiori,
 3. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 4. Kabupaten Waropen.

Batas Wilayah Provinsi Papua meliputi:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat; dan
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

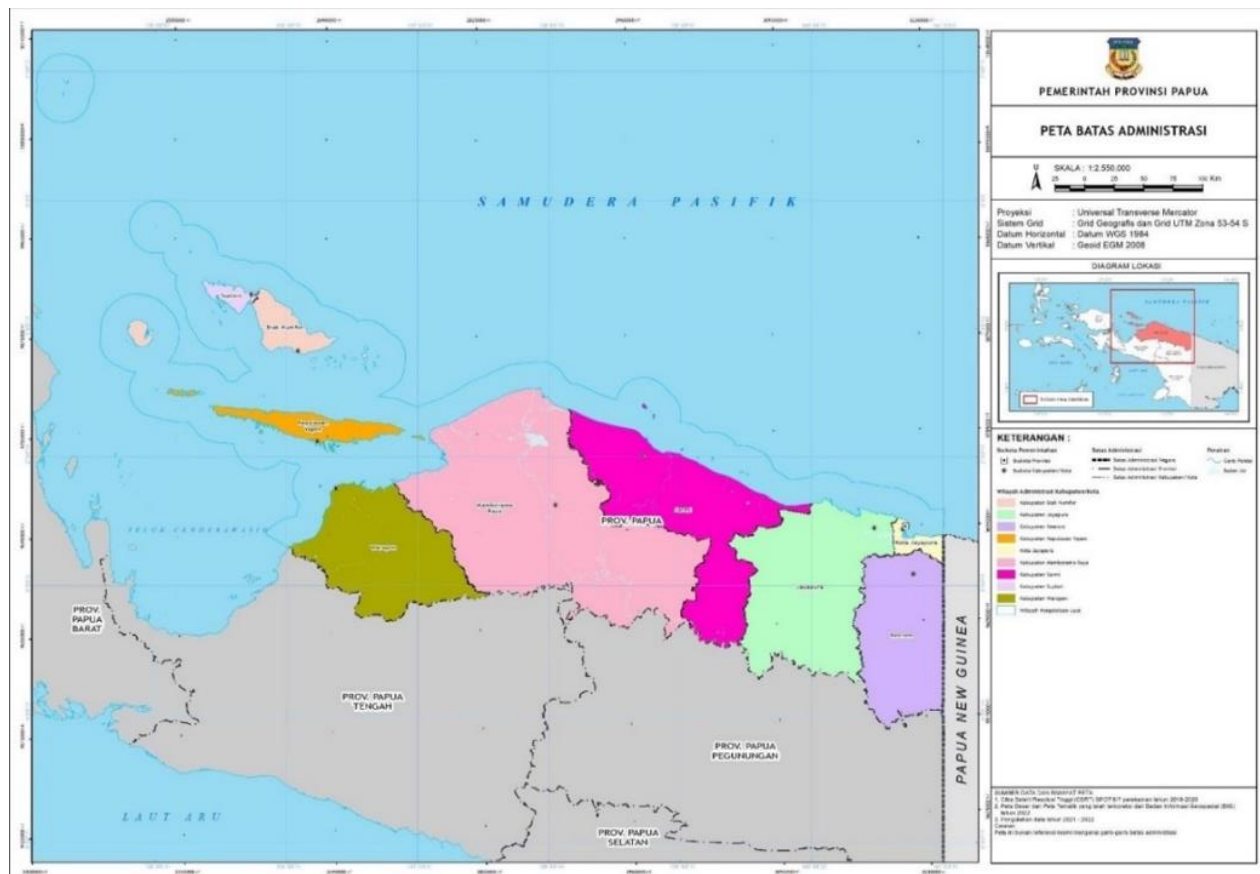
Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 13.158.285,28 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektar. Luas wilayah darat terbesar yang terdapat di Provinsi Papua ialah Kabupaten Mamberamo Raya dengan luas wilayah 2.804.347,07 Ha atau sebesar 21,31% dari luas wilayah Provinsi Papua. Sedangkan wilayah darat terkecil yaitu Kabupaten Supiori seluas 66.069,33 Ha atau 0,50% dari luas wilayah Provinsi Papua. Luasan kabupaten/kota serta pembagian wilayah administrasi di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel II.1 Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM2)	PERSENTASE (%)
1	Jayapura	1.408.261.62	17,03
2	Kepulauan Yapen	242.842.21	2,94
3	Biak Numfor	226.001.7	2,73
4	Sarmi	1.406.901.96	17,01
5	Keerom	952.631.53	11,52
6	Waropen	1.078.212.89	13,04
7	Supiori	66.069.32	0,80
8	Mamberamo Raya	2.804.347.07	33,91
9	Kota Jayapura	83.568.99	1,01
Jumlah		8.268.837.32	100

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Gambar II.1. Peta Batas Administrasi Papua



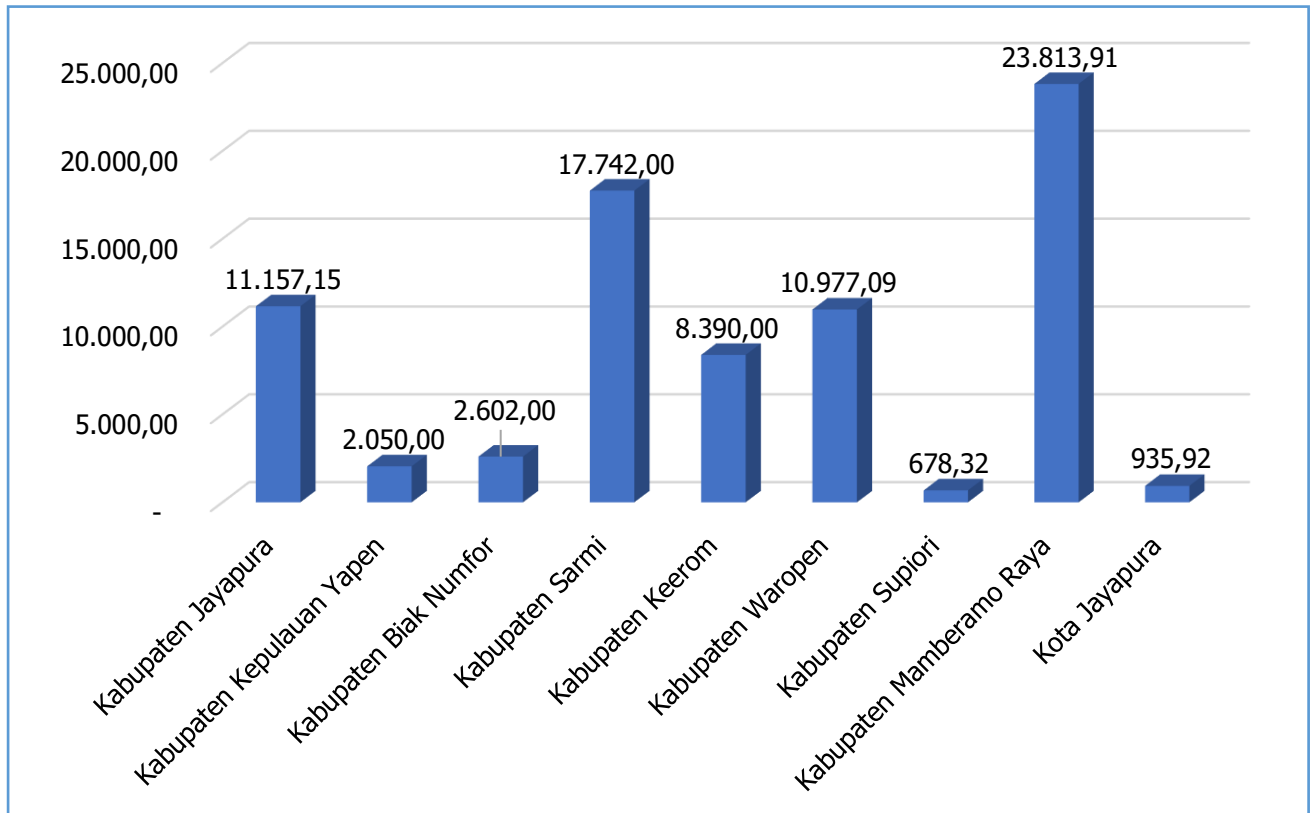
Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	DISTRIK	KELUARAHAN	KAMPUNG
1	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
2	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
3	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
4	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
5	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
6	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
7	Kab. Supiori	Sorendiwari	5	0	38
8	Kab. Mamberamo Raya	Biurmeso	8	0	60
9	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
TOTAL			104	51	948

Sumber: Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Gambar II.2. Grafik Luas Kabupaten/Kota Provinsi Papua



Sumber: Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

II.1.1.2 Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar wilayah Provinsi Papua menggambarkan kondisi alam guna mengetahui daya dukung lingkungan terhadap perencanaan ruang. Kondisi fisik dasar di Provinsi Papua meliputi topografi, jenis tanah, geologi, klimatologi dan hidrologi, Penggunaan lahan

A. Topografi

Kondisi topografi dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Sebagian besar morfologi wilayah Provinsi Papua berupa dataran (39,20%) dan pegunungan (60,79%). Dataran terdapat di bagian pesisir selatan yang merupakan bagian yang paling luas, dan pesisir utara. Pegunungan terdapat di bagian tengah

wilayah Provinsi Papua. Bagian morfologi dataran dengan ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas di wilayah Provinsi Papua, yaitu 5.027.142,57 ha (53,3%), serta ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit, yaitu 3.241.694.74 ha (39,20%).

Sedangkan kelerengan yang mendominasi wilayah Provinsi Papua adalah lereng landai (0-8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%. Wilayah di Provinsi Papua memiliki ketinggian dengan elevasi 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl dan >3000 mdpl. Ketinggian wilayah yang memiliki elevasi 0-100 mdpl seluas 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl adalah seluas 5.025.909 ha dan elevasi >3000 mdpl adalah seluas 1.233,57 ha. Ketinggian wilayah 0-100 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.360.180,62 ha, ketinggian wilayah 100-3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.444.166,45 ha dan ketinggian wilayah >3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Keerom seluas 1.233,57 ha.

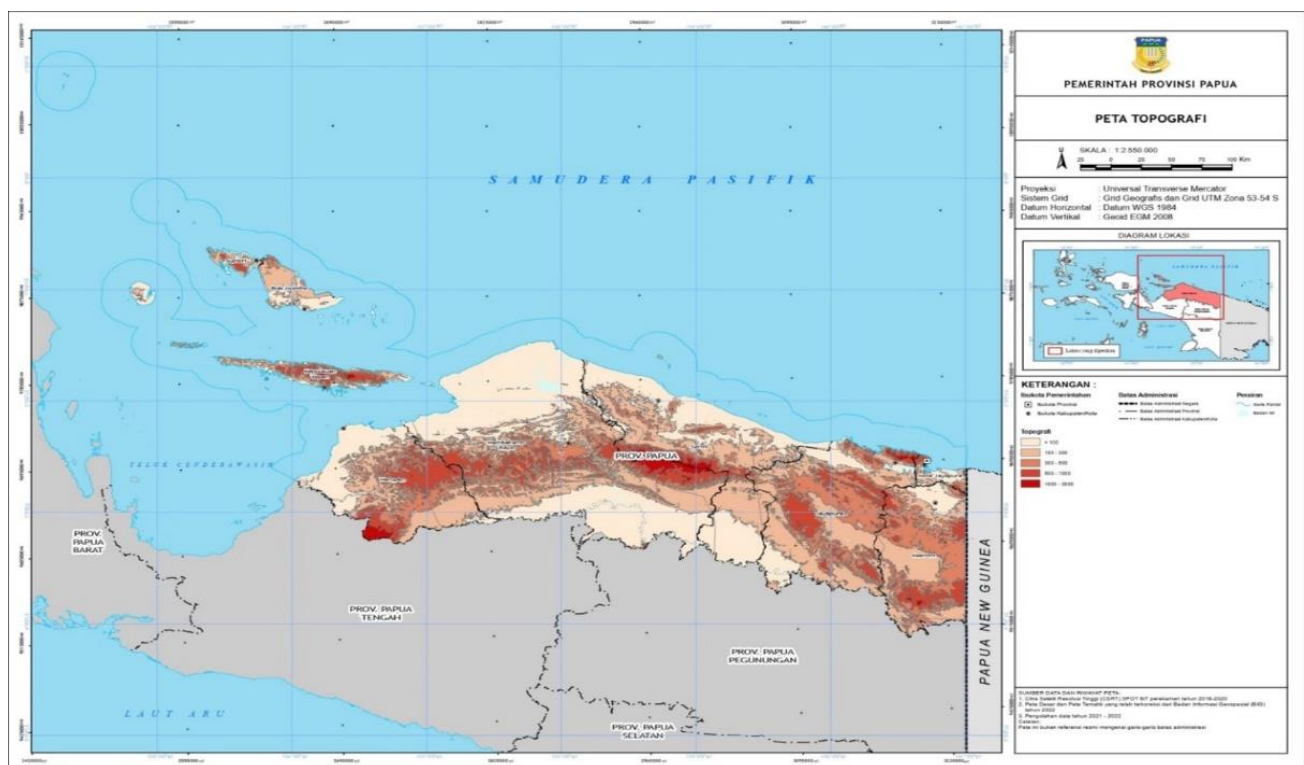
Tabel II.3 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua

ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
	0-100 Total	
100-3000	Jayapura	1,222,941.63
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
Elevasi (mdpl)	Kabupaten	Area (ha)
	Supiori	40,367.28

ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
100-3000 Total		5.025.909
>3000	Keerom	1,233.57
>3000 Total		1,233.57
Grand Total		8.268.837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Gambar II.2 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Wilayah Provinsi Papua memiliki klasifikasi kemiringan lereng yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >45%. Kelereng wilayah di Provinsi Papua dengan kemiringan lereng 0-8% seluas 3.849.082,03 ha, kemiringan lereng 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, kemiringan lereng 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, kemiringan lereng 25-45% seluas 1.013.710,94 ha dan kemiringan lereng >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.517.691,61 ha, kemiringan lereng 8-15% terluas berada di Kabupaten Jayapura seluas 360.181,45 ha, kemiringan lereng 15-25% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 484.150,73 ha, kemiringan lereng 25-45% terluas berada di

Kabupaten Mamberamo Raya seluas 310.648,06 ha dan kemiringan lereng >45% terluas berada di Kabupaten Sarmi seluas 57.217,56 ha.

Tabel II.4 Kelerengan Provinsi Papua

NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
1	0-8 %	Mamberamo Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61
		Kepulauan Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
		Total 0 – 8 %	
2	8-15%	Jayapura	295,881.08
		Mamberamo Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93
		Kepulauan Yapen	26,625.90
		Biak Numfor	18,831.22
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
		Total 8-15 %	
3	15-25%	Mamberamo Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kepulauan Yapen	60,503.87

NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
		Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
Total 15-25%			1,555,049.84
4	25-45%	Mamberamo Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kepulauan Yapen	96,899.04
		Supiori	11,410.49
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
Total 25-45%			1,013,710.94
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kepulauan Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamberamo Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
>45% Total			117,629.57
Grand Total			8,268,837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

B. Jenis Tanah

Jenis tanah di Provinsi Papua meliputi jenis tanah alfisol, entisol, inceptisol, mollisol, histosol, ultisol. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis tanah yang terdapat di Provinsi Papua, sebagai berikut :

1) Entisol

Jenis tanah yang baru berkembang dari bahan asal atau bahan induknya. Pembentukan tanah ini dapat sebagai akibat dari iklim yang sangat kering sehingga pelapukan dan reaksi kimia sangat lambat, adanya erosi yang kuat sehingga bahan-bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan yang terus menerus, selalu jenuh air sehingga menghambat perkembangan horison. Tanah Entisol banyak digunakan untuk pertanian terutama di daerah endapan sungai yang umumnya subur. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Entisols adalah seluas 322.217,71 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.

Gambar II.3 Jenis Tanah Entisol



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

2) Inceptisol

Tanah ini merupakan tanah yang belum matang, perkembangan profilnya lemah dan masih banyak menyerupai bahan induknya. Penggunaannya untuk pertanian dan non

pertanian adalah beragam, daerah berlereng untuk hutan dan untuk pertanian perlu didrainase jika drainase buruk.

Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Inceptisol adalah seluas 3.326.850292 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.

Gambar II.4 Jenis Tanah Inceptisol



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

3) Mollisol

Tanah ini terbentuk dari adanya proses pembentukan tanah yang berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Akibat pelapukan bahan organik di dalam tanah membentuk senyawa-senyawa yang stabil dan berwarna gelap. Warna gelap yang terbentuk, dengan adanya aktivitas mikroorganisme tanah maka terjadi pencampuran bahan organik dan bahan mineral tanah sehingga terbentuk kompleks mineral-organik yang berwarna kelam. Tanah ini merupakan tanah yang subur dengan hanya sedikit pencucian sehingga kejenuhan basa tinggi. Sebagian besar tanah ini digunakan untuk

pertanian. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Mollisol adalah seluas 231.294,22 hektar yang berada Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.

Gambar II.5 Jenis Tanah Mollisol



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

4) Histosol

Tanah ini terbentuk akibat penimbunan bahan organik lebih besar dari mineralisasinya. Keadaan ini terbentuk pada tempat-tempat yang selalu tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Untuk dapat digunakan bagi usaha pertanian, tanah Histosol harus dilakukan perbaikan drainase. Tanah ini biasanya sesuai untuk sayur-sayuran, bawang merah, padi dan sebagainya.

Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Histosol adalah seluas 762.867,67 hektar yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

Gambar II.6 Jenis Tanah Histosol



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

5) Ultisol

Tanah ini merupakan tanah yang sudah berkembang dan dicirikan dengan adanya horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Tanah ini umumnya terbentuk dari bahan induk batuan liat. Untuk pemanfaatan tanah ini ada beberapa kendala yaitu reaksinya masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium yang tinggi sehingga dapat meracuni tanaman, ketersediaan unsur hara rendah dan adanya fiksasi fosfor yang tinggi. Dengan demikian untuk pemanfaatannya diperlukan pemupukan dan pengapuran untuk mengatasi kemasaman tanah dan keracunan aluminium. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Histosol adalah seluas 2.768.019,01 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.

Gambar II.7 Jenis Tanah Ultisol



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tabel II.5 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua

JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
Entisols	Kabupaten Sarmi	95.060,48
	Kabupaten Mamberamo Raya	57.806,27
	Kabupaten Waropen	48.955,23
	Kabupaten Jayapura	45.312,74
	Kota Jayapura	34.151,52
	Kabupaten Keerom	31.502,84
	Kabupaten Supiori	9.428,63
	Entisols Total	
Inceptisols	Kabupaten Mamberamo Raya	1.477.352,81
	Kabupaten Sarmi	913.496,30
	Kabupaten Jayapura	620.843,28
	Kabupaten Waropen	166.698,33
	Kabupaten Keerom	98.038,18
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.293,22
	Kota Jayapura	17.811,94
	Kabupaten Supiori	6.316,86
Inceptisols Total		3.326.850,92

JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
Mollisols	Kabupaten Biak Numfor	163.713,81
	Kabupaten Jayapura	57.414,34
	Kabupaten Kepulauan Yapen	9.020,44
	Kabupaten Supiori	834,76
	Kabupaten Sarmi	310,87
Mollisols Total		231.294,22
Histosols	Kabupaten Mamberamo Raya	597.148,74
	Kabupaten Waropen	128.925,63
	Kabupaten Sarmi	29.634,57
	Kabupaten Keerom	3.690,51
	Kabupaten Biak Numfor	959,97
	Kabupaten Kepulauan Yapen	957,40
	Kota Jayapura	891,31
	Kabupaten Supiori	448,21
	Kabupaten Jayapura	211,33
	Histosols Total	
Ultisols	Kabupaten Keerom	795.344,59
	Kabupaten Jayapura	702.901,07
	Kabupaten Mamberamo Raya	359.557,57
	Kabupaten Sarmi	356.243,64
	Kabupaten Waropen	238.450,11
	Kabupaten Kepulauan Yapen	204.626,59
	Kabupaten Biak Numfor	60.764,33
	Kabupaten Supiori	50.073,73
	Kota Jayapura	57,38
	Ultisols Total	
Tidak Ada Data	Kota Jayapura	8.428,14
	Kabupaten Sarmi	2.345,23
	Kabupaten Waropen	294,52
	Kabupaten Supiori	3,96
	Kabupaten Biak Numfor	0,40
	Kabupaten Jayapura	0,12
Tidak Ada Data Total		11.072,37
Tubuh Air	Kabupaten Mamberamo Raya	71.983,24
	Kota Jayapura	21.692,73
	Kabupaten Sarmi	13.701,46
	Kabupaten Keerom	13.341,30

JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
	Kabupaten Waropen	3.463,13
	Kabupaten Kepulauan Yapen	83,22
	Kabupaten Biak Numfor	14,21
Tubuh Air Total		124.279,29
Grand Total		7.546.601,19

Sumber : Revisi RTRWP Papua, Tahun 2022

C. Geologi

Provinsi Papua terletak di paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bagian tengah pulau Papua atau Nugini (New Guinea Island). Pulau New Guinea telah diakui sebagai hasil dari tumbukan Lempeng Australia dengan Lempeng Pasifik. Menurut Pigram dan Davies (1987), konvergensi dan deformasi bagian tepi utara lempeng Australia yang berada di bagian timur Papua New Guinea dimulai sejak Eosen hingga sekarang. Bentuk pulau Papua yang unik berkaitan dengan peristiwa geologi yang pernah terjadi selama jutaan tahun. Dengan kondisi geologi yang kompleks sehingga menghasilkan sumber daya mineral yang potensial dan karakteristik fisik lahan yang khas menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan wilayah.

Informasi geologi untuk keperluan perencanaan penataan ruang diperoleh dengan memahami kondisi geologi regional dalam skala pulau. Peristiwa geologi yang terjadi membentuk dimensi ruang dan waktu sebuah pulau yang dibatasi oleh lempeng-lempeng bumi yang bergerak secara vektor dan konsisten. Geologi regional Papua membahas tentang geomorfologi, litologi, stratigrafi dan tektonik.

1) Geomorfologi

Bagian Utara terdapat lembah dan dataran antar perbukitan yang lebih dipengaruhi oleh proses denudasional dan fluviatil, dikenal sebagai lembah sungai Mamberamo atau Merenvlakte. Lembah ini terbentuk diantara Pegunungan Tengah Papua di sebelah Selatan dan, Pegunungan Ruffaer, Gauttler dan Nawa di sebelah Utara. Di samping itu, terdapat dataran rendah yang berupa rawa di sekitar Waropen dan muara Mamberamo, dan pesisir pantai Utara Papua. Di pesisir Utara ini dijumpai sebuah morfologi pegunungan yang terpisah atau terisolir yaitu Pegunungan Cyclops

2) Litologi

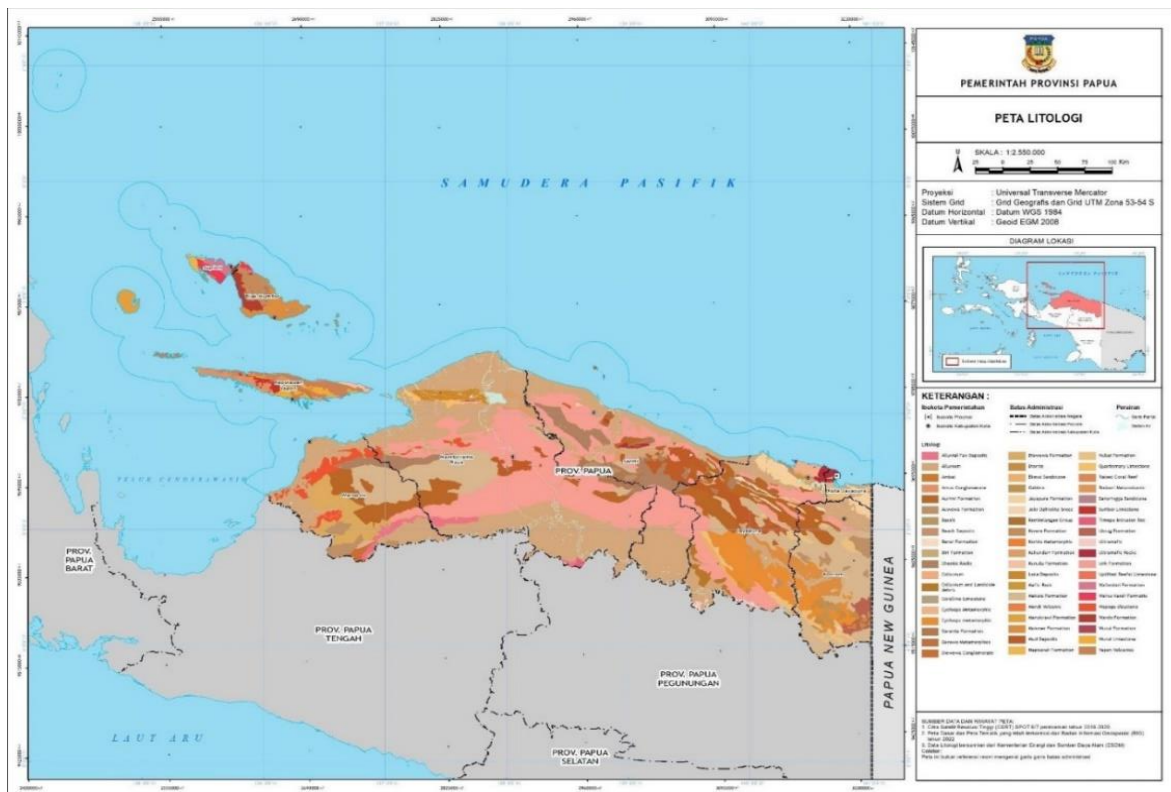
Berdasarkan litologi penyusun wilayah Provinsi Papua menurut pembagian fisiografinya, maka satuan litologi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

Tabel II.6 Satuan Litologi Menurut Fisiografi

WILAYAH FISIOGRAFI	LITOLOGI	SIMBOL WARNA
Pesisir Utara dan kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> Batuan sedimen Kuartar bersifat klastika darat, dan karbonat, serta sebagian klastika vulkanik, klastika laut dan karbonat. Batuan sedimen Tersier berupa klastika laut, karbonat, dan sebagian klastika vulkanik serta sedikit klastika darat. Batuan vulkanik Tersier yang berisi breksi, lava, tufa dan klastika vulkanik dari lingkungan sebagian laut dan darat. 	

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar II.8 Peta Litologi Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

3) Stratigrafi

Stratigrafi regional Papua secara garis besar dibedakan ke dalam 3 kelompok yaitu: a) batuan Kraton Australia, b) batuan Lempeng Pasifik, dan c) batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan yang berasal dari Kraton Australia terutama tersusun oleh batuan alas, batuan malihan berderajat rendah hingga tinggi dan sebagian telah diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat

4) Tektonik

Dari peristiwa tektonik secara regional, berkembang 3 mandala struktur geologi yang penting, yaitu:

- Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Jalur sesar sungkup yang berarah timur barat dengan panjang 100 km, menempati daerah Pegunungan Tengah Papua. Batuannya dicirikan oleh kerak benua yang terdeformasikan sangat kuat. Sesar sungkup telah menyeret batuan alas yang berumur Perm, batuan penutup berumur Mesozoikum dan batuan sedimen laut dangkal berumur Tersier Awal ke arah Selatan. Di beberapa tempat kelompok batuan ini terlipat kuat. Satuan litologi yang paling dominan di JSNPT ialah batu gamping New Guinea dengan ketebalan mencapai 2000 meter. Sesar sungkup JSNPT dihasilkan oleh gaya pemampatan yang sangat intensif dan kuat dengan komponen utama berasal dari arah utara.

Gaya ini juga menghasilkan beberapa jenis antiklin dengan kemiringan curam bahkan sampai mengalami pembalikan (*over turning*). Proses ini juga menghasilkan sesar balik yang bersudut lebar (*Reverse Fault*). Penebalan batuan kerak yang diduga terbentuk pada awal Pliosen ini memodifikasi bentuk daerah JSNPT. Periode ini juga menandai perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan mengawali alih tempat Gautier (*The Gautier off set*).

- Jalur Sesar Naik Mamberamo

Jalur sesar ini memanjang 100 km ke arah selatan dan terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) sehingga menyasarkan batuan Plio – Plestosen Formasi –

Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang ada di bawahnya. Wiliam, dkk 1984 mengenali daerah luas dengan pola struktur tak teratur. Di sepanjang jalur sesar sungkup dijumpai intrusi Poton-poton batuan serpih (*shale diafirs*) dengan radius 50 km. Hal ini menandakan zona lemah (sesar). Poton-poton lumpur ini biasanya mempunyai garis tengah beberapa kilometer. Umumnya terdiri dari lempung terkeringkan dan komponen batuan tak terpilahkan dengan sesar ukuran fragmen beberapa milimeter hingga ratusan meter. Sekarang poton lumpur ini masih aktif dan membentuk teras-teras sungai.

D. Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air di bumi termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen. Sungai yang terdapat di Provinsi Papua meliputi :

- Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar melintasi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
- Sungai Wapoga-Mimika melintasi Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen

Tabel II.7 Wilayah Sungai di Provinsi Papua

NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
Wilayah Sungai Lintas Negara			
A	WS Mamberamo-Tami-Apauvar	1) Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Tami (Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura) • DAS Sepik (Kab. Keerom dan Pegunungan Bintang)

NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
		2) Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wiru (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Toarim (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Nano (Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Keerom) • DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)
		3) Kabupaten Sarmi	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya) • DAS Nenkam • DAS Woske • DAS Bu • DAS Bier • DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Niki • DAS Orai
		4) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Rambori • DAS Gesa • DAS Andarwaren • DAS Manembo • DAS Wakamba • DAS Waremburi • DAS Idomba • DAS Aperi • DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah) • DAS Marest • DAS Apauvar • DAS Kurudu
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota			
A	WS Wapoga-Mimika	1) Kabupaten Supiori	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Bepondi • DAS Rusdori • DAS Wafordori • DAS Waradokdo
		2) Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Surdori • DAS Sarwodari • DAS Korem • DAS Wardo

NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
			<ul style="list-style-type: none"> • DAS Owi • DAS Auki • DAS Pai • DAS Padaidori • DAS Bromsi • DAS Numfor
		3) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Sorabi • DAS Bariworo • DAS Barapasi • DAS Naduboai • DAS Rawiwa • DAS Wankai • DAS Sosoro
		4) Kabupaten Waropen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Waron • DAS Wanasanu • DAS Boi • DAS Binatanaboa • DAS Sanoringga • DAS Sabia • DAS Rombak • DAS Rondisi • DAS Dambo • DAS Serami
		5) Kabupaten Kepulauan Yapen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wadapi • DAS Menawi • DAS Borai • DAS Amboi • DAS Mariadey • DAS Warui • DAS Pamawari • DAS Sumbu • DAS Koanda • DAS Sasawa • DAS Parida • DAS Papuma • DAS Ansus • DAS Marau • DAS Antunai • DAS Jauri • DAS Aibondeni • DAS Kairawi • DAS Wooi

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 (dua) kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi

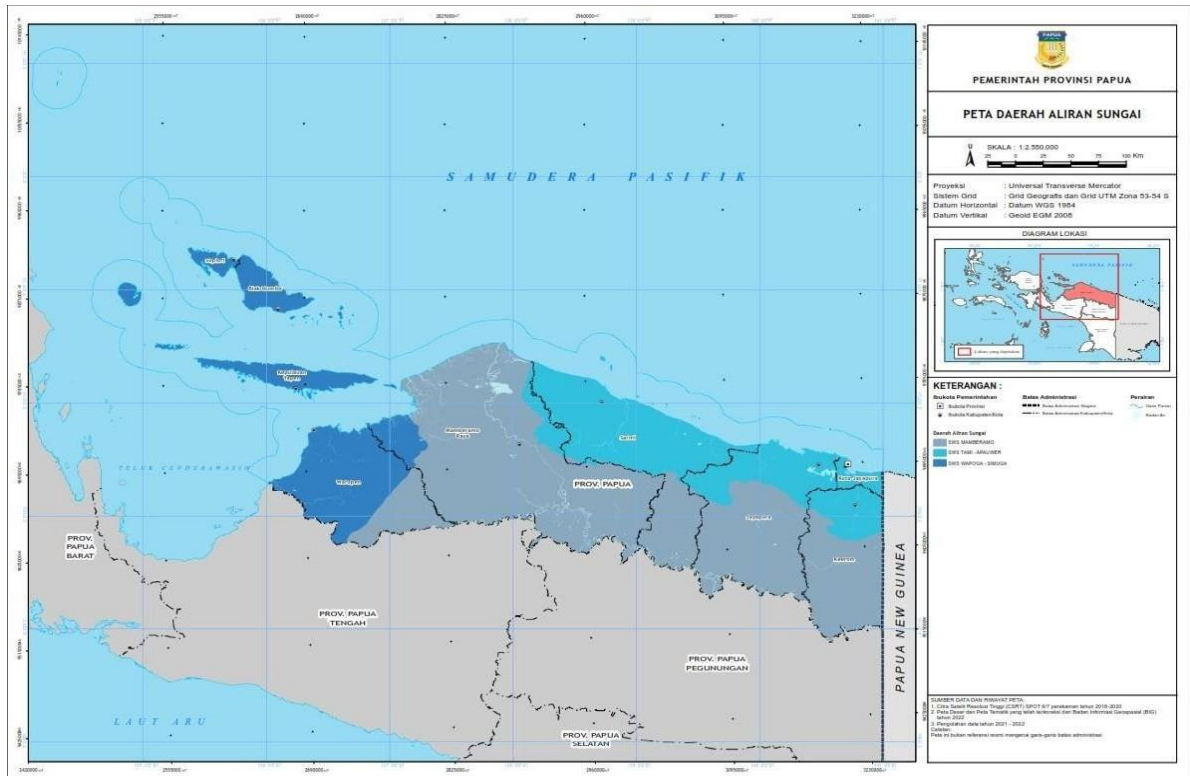
Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada, CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub

Tabel II.8 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

NO.	KEWENANGAN	CEKUNGAN AIR TANAH
1	CAT dalam wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Numfor di Kabupaten Biak Numfor • CAT Warsa di Kabupaten Biak Numfor • CAT Biak di Kabupaten Biak Numfor • CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen • CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura • CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom • Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom • CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom • CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura • CAT Ubrub di Kabupaten Keerom
2	CAT lintas negara	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar II.9 Peta Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

E. Klimatologi

Pengukuran iklim di Provinsi Papua oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua dilakukan di 9 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, secara rata-rata suhu di seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 27.70-34.80 °C

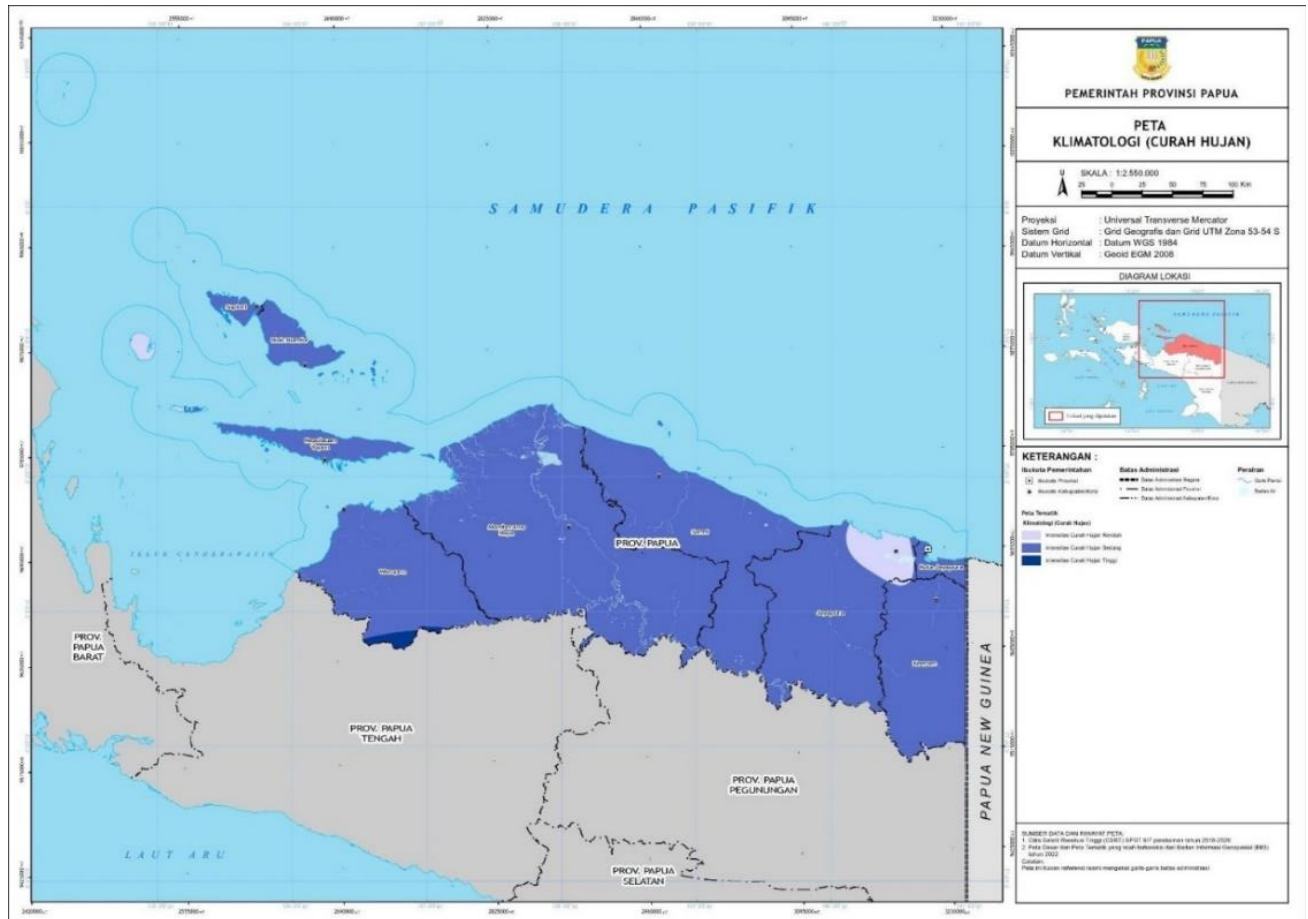
Tabel II.9 Curah Hujan di Provinsi Papua

CURAH HUJAN RATA-RATA		KABUPATEN	AREA (ha)
(MM/HARI)	(KLASIFIKASI)		
13.6 - 20.7	rendah	Kabupaten Mamberamo Raya	2.061.000,76
		Kabupaten Jayapura	231.827,70
		Kabupaten Waropen	598.620,64
		Kabupaten Biak Numfor	142.571,76
		Kabupaten Sarmi	80.590,06

CURAH HUJAN RATA-RATA (MM/HARI) (KLASIFIKASI)		KABUPATEN	AREA (ha)
		Kabupaten Kepulauan Yapen	70.456,50
13.6 - 20.7 Total			3.185.067,42
20.7 - 27.7	sedang	Kabupaten Sarmi	1.326.311,90
		Kabupaten Jayapura	1.155.495,19
		Kabupaten Mamberamo Raya	743.346,31
		Kabupaten Waropen	479.592,25
		Kabupaten Keerom	188.503,46
		Kabupaten Kepulauan Yapen	172.385,71
		Kabupaten Biak Numfor	83.429,94
		Kabupaten Supiori	66.069,33
		Kota Jayapura	29.999,49
20.7 - 27.7 Total			4.245.133,58
27.7 - 34.8	tinggi	Kabupaten Keerom	764.128,08
		Kota Jayapura	53.569,50
		Kabupaten Jayapura	20.938,73
27.7 - 34.8 Total			838.636,31
Grand Total			8.268.837,31

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Gambar II.10 Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Papua terdiri dari atas :

1) Kawasan Hutan Provinsi Papua

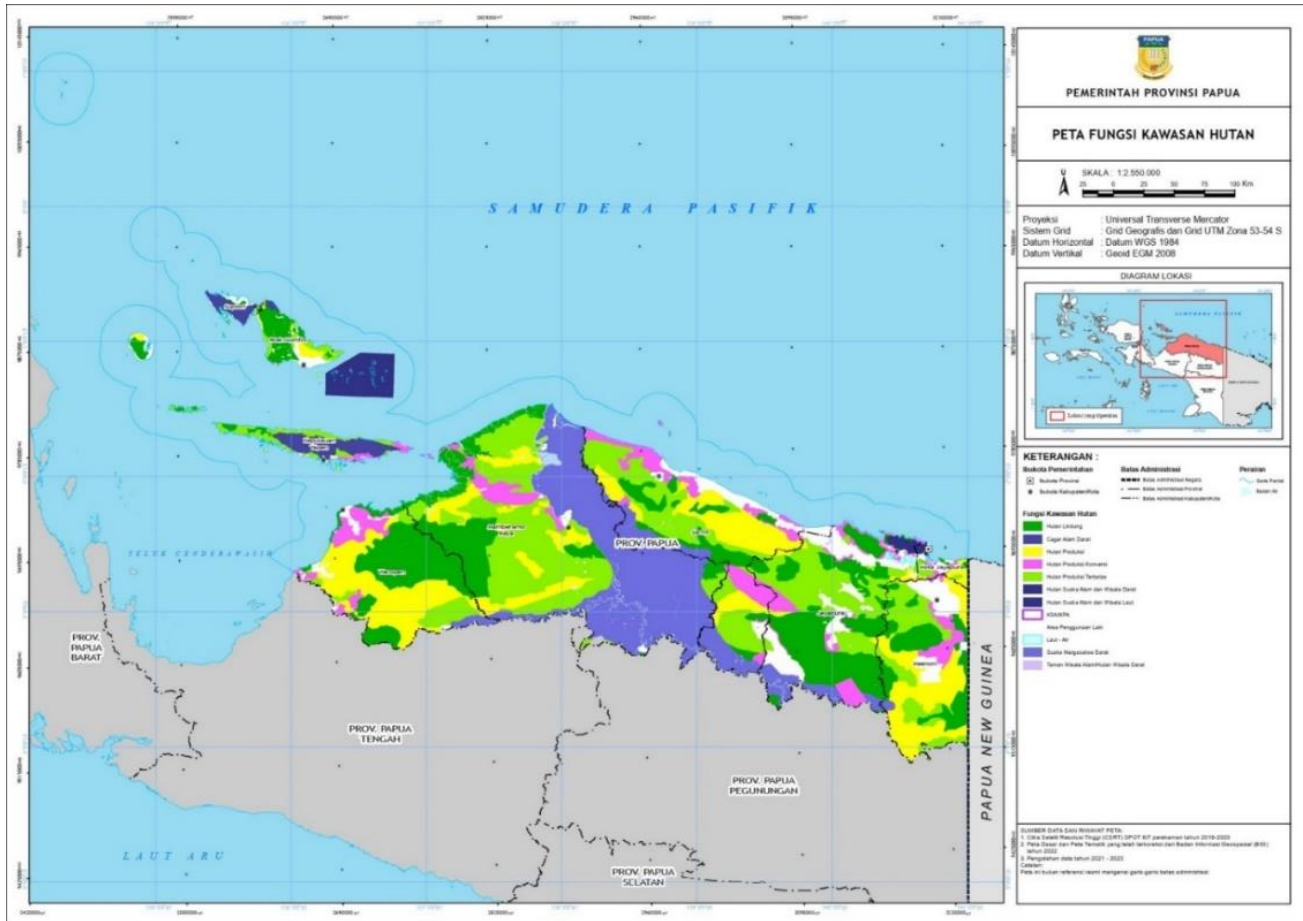
Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Sampai Tahun 2020 maka luas Kawasan hutan Provinsi Papua seluas 7.657.651,91 ha dengan luas kawasan lindung sebesar 3.596.655,67 ha (43,5%), luas hutan budidaya (HP, HPT dan HPK) seluas 4.060.996,24 ha (49,11%), sedangkan areal penggunaan lainnya seluas 7,38% dari luas wilayah Provinsi Papua.

Tabel II.10 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2022

NO	SK 6632	JUMLAH (ha)
1	Areal Penggunaan Lain	610.437,83
2	Belum terdefinisi	5,60
3	Cagar Alam Darat	158.697,21
4	Hutan Lindung	1.894.420,25
5	Hutan Produksi	1.381.384,15
6	Hutan Produksi Konversi	605.133,78
7	Hutan Produksi Terbatas	2.074.478,31
8	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	36.378,44
9	Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut	0,00
10	Laut – Air	10.768,19
11	Suaka Margasatwa Darat	1.496.051,31
12	Taman Nasional Laut	0,00
13	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	340,27
TOTAL		8.268.095,34

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar II.11 Peta Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Papua



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

2) Tutupan lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh peruntukkan hutan rimba sebesar 7.878.548,02 ha atau 95,28% terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan rimba meliputi badan air yang berupa air danau, air sungai dan air rawa sebesar 205.741,87 ha (2,49%), bukit pasir sebesar 1.223,84 ha (0,015%), pelabuhan udara sebesar 753,26 ha (0,009%), permukiman sebesar 24.316,08 ha (0,29%), perkebunan sebesar 51.907,5 ha (0,63%), sawah sebesar 10.795,94 ha (0,13%), tegalan sebesar 14.714,49 ha (0,18%) dan semak belukar sebesar 80.835,33 ha (0,98%).

Gambar II.12 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Tabel II.11 Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022

TUTUPAN LAHAN	BIAK NUMFOR	JAYAPURA	KEEROM	KEP. YAPEN	MAMBERAMO RAYA	SARMI	SUPIORI	WAROPEN	KOTA JAYAPURA	GRAND TOTAL
Air Danau/Situ	147.9	9,736.09	1.24	85.88	23,161.06	1,947.76	7.75	293.84	225.95	35,607.47
Air rawa	114.99	325.03	41.4		87,168.44	1,434.87		2,499.34	393.5	91,977.57
Air Tawar Sungai	41.8	8,053.29	3,281.83	3.37	50,055.65	10,364.59	5.47	5,899.04	451.79	78,156.83
Hutan Rimba	203,707.74	1,336,427.4	904,413.2	240,166.29	2,616,480.42	1,378,715.7	64,415.9	1,066,834.9	67,386.41	7,878,548.02
Pasir/Bukit Pasir Darat	-	-	-	-	28.83	-	-	992,25	-	1,021.08
Pasir/Bukit Pasir Laut	92.39	1.71	-	44.43	5.91	-	58.01	0.93	0.38	203.76
Pelabuhan Udara Domestik	227.93	-	-	-	-	-	-	-	-	227.93
Pelabuhan Udara Internasional	253.33	-	-	-	-	-	-	-	-	253.33
Pelabuhan Udara Perintis	41.61	146.11	11.01	50.75	11.83	5.2	-	5.49	-	272
Perkebunan/kebun	254.85	24,307.52	26,974.8	-	-	135.46	200.13		34.74	51,907.5
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,943.33	5,622.88	4,032.09	1,802.32	510.38	2,267.09	637,25	962.14	4,538.6	24,316.08
Sawah	45.51	1,512.76	5,180.16	165.39	-	-	-	215.16	3,676.96	10,795.94
Semak Belukar/Alang-Alang	15,798.96	17,848.07	2,740.42	463.25	26,921.01	10,883.73	731.84	424.27	5,023.96	80,835.33
Tegalan/Ladang	1,331.35	4,280.74	5,955.35	60.53	3.55	1,147.59	12.95	85.54	1,836.89	14,714.49
Grand Total	226,001.7	1,408,261.6	952,631.5	242,842.21	2,804,347.07	1,406,902	66,069.3	1,078,212.9	83,568.99	8,268,837.31

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

II.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 wilayah pengembangan, yang meliputi:

- **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (*food estate*, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICO/Papua Home industri *Coconut Oil*); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;
- **Wilayah pengembangan II**, yaitu (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan
- **Wilayah pengembangan III**, yaitu (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar II.1 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

II.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Papua yang berada di pulau Nugini (*New Guinea Island*) terbentuk akibat interaksi tumbukan lempeng benua Australia dan lempeng samudera Pasifik yang aktif. Pulau Papua juga diapit oleh 2 samudera besar, yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik yang mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan cuaca disekitarnya. Karena kondisi geologi dan posisi geografis ini menyebabkan kerawanan terjadinya bencana yang cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, yang dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya, meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam di daerahnya.

Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pada dasarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dibagi dalam empat tahapan yakni:

1. Tahap prabencana yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana;
2. Tahap prabencana yang dilakukan dalam situasi terdapat potensi bencana;
3. Tahap saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana; dan
4. Tahap pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Tahapan bencana yang diuraikan di atas di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir

pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Dalam setiap tahapan tersebut di atas, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam konteks kebencanaalaman, ada empat kriteria bencana alam yang potensi terjadinya dalam skala besar maupun kecil perlu diwaspadai yaitu gempa bumi, gunung api, tsunami dan gerakan tanah. Menurut BNPB (2009) keempat bencana alam tersebut termasuk bencana alam utama; di samping banjir. Keempat yang disebut pertama termasuk bencana geologi sedangkan banjir dan kekeringan adalah pengaruh iklim (musim). Di Provinsi Papua, tidak terdapat indikasi adanya gunung api. Namun sebaliknya, kekeringan adalah salah satu bencana alam yang penyebarannya cukup luas.

Bencana didefinisikan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan/hilangnya harta benda, merusak lingkungan, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang datangnya secara tiba-tiba. Sedangkan bencana geologi adalah secara spesifik bencana yang disebabkan oleh dinamika geologi seperti antara lain letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah (longsor).

Di wilayah Provinsi Papua bencana geologi yang perlu diwaspadai adalah gempa bumi dan gerakan tanah sedangkan gunung api tidak dijumpai. Bencana tsunami tercatat di Pulau Biak, Yapen dan Bagian Utara Kabupaten Waropen. Khusus untuk kejadian gempa bumi, Provinsi Papua cukup labil tercatat beberapa kali terjadi gempa dengan skala besar. Dari statistik Direktorat Bencana Alam Geologi, gempa dengan skala > 6 SR tercatat 16 kali dari tahun 1600-2006 dibandingkan dengan Pulau Sumatera 45 kali. Persentase pertahunnya 4,26 persen dan kejadian dalam 30 tahun ke depan diperkirakan hanya 1 kali.

Pada Peta Potensi Bencana Alam yang dibuat untuk menunjang perencanaan kawasan yang didasarkan pada kondisi geologinya, maka Provinsi Papua di bagi ke dalam 6 (enam) pembagian wilayah yaitu 1, Stabil, 2, Lemah, 3, Menengah, 4, Kurang kuat, 5, Kuat dan 6, Sangat Kuat. Daerah yang sangat kuat dilanda gempa bumi adalah Kabupaten

Nabire memanjang hingga ke Kota Jayapura namun tidak semua pantai Utara Papua rawan gempa; daerah Kabupaten Sarmi tergolong kuat hingga menengah.

Sifat dinamika geologi yang kompleks menggambarkan situasi wilayah yang rawan terhadap potensi bencana alam, terutama bencana geologi. Bencana geologi berkembang dari bahaya geologi (geohazard) yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Geohazard adalah bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang berhubungan dengan fenomena bumi atau beraspek geologi. Geohazard merupakan potensi inheren terkandung di dalam fenomena geologi. Bahaya yang beraspek geologi akan terus berulang di daerah yang sama, tetapi posisi detail, waktu dan besar kekuatan (parameter) sangat sulit ditentukan. Yang terpenting dalam mensikapi kondisi wilayah yang memiliki keanekaragaman bencana geologi adalah selalu waspada, menerapkan upaya preventif (mitigasi) bencana dan upaya penyelamatan diri. Upaya mitigasi bencana geologi menjadi sangat penting untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang kondisi tektonik yang membentuk pulau Papua, bahwa wilayah provinsi Papua yang menempati sebagian sebelah barat pulau Papua terletak pada 2 lempeng raksasa yang berinteraksi saling bertubrukan menyudut (*oblique convergent*). Lempeng benua Australia bergerak relatif ke utara dengan kecepatan 7 cm/tahun, dan lempeng samudera Pasifik bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 11 cm/tahun, berinteraksi dan menyusup ke bawah lempeng benua Australia di sebelah utara Papua. Akibat pertemuan kedua lempeng ini maka terbentuk palung di utara Papua, reaktivasi sesar Sorong yang bergerak relatif mengiri, pembentukan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 4000 m, pensesaran di sepanjang jalur pegunungan tengah Papua, cekungan yang mengandung potensi hidrokarbon, kegiatan intrusi plutonik yang menghasilkan jalurjalur mineralisasi, dan zona subduksi yang menjadi sumber gempabumi, Apabila zona subduksi dan pusat gempabumi (kurang dari 33 km) dengan magnituda lebih dari 6 Skala Richter (SR), serta menyebabkan deformasi permukaan dasar laut (cenderung patahan naik) maka berpeluang atau berpotensi membangkitkan tsunami.

Di samping itu, hasil interaksi lempeng akan membentuk pegunungan dengan topografi yang tidak rata, bahkan dapat ekstrim (berlereng sangat terjal) yang berpotensi menyebabkan longsor, serta membentuk punggung dan lembah akibat lipatan dan sesar

yang jika aktif dapat menimbulkan kombinasi bencana alam, seperti gempa bumi, longsor dan tsunami.

Dalam pandangan geohazard sebagai kehidupan normal, bencana dianggap sebagai konsekuensi dari cara-cara masyarakat membangun dirinya sendiri, baik secara ekonomi, sosial, interaksi antara masyarakat dan negara, serta pola dan arahan pemanfaatan ruang. Gambaran berikut menunjukkan bencana sebagai bagian dari kehidupan normal.

Gambar II.2 Rangkaian Kerentanan Berpadu dengan bahaya yang Menimbulkan Bencana



Gambar di atas menyatakan dengan tegas perbedaan bahaya (*hazard*) dan bencana (*disaster*). Bahaya yang berpengaruh terhadap bencana sebagai tolak ukur penting untuk mengetahui kerentanan masyarakat. Kerentanan dipandang sebagai gerak maju dari 3 tahap, yaitu penyebab yang mendasari, tekanan-tekanan yang dinamis, dan kondisi-kondisi yang tidak aman.

Beberapa daerah di Provinsi Papua memiliki kawasan rawan bencana alam dengan resiko tinggi. Beberapa jenis bencana dengan tingkat resiko kerawanan tinggi diantaranya: banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, tsunami, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, dan karhutla.

A. Gempa Bumi

Tatanan tektonik Pulau New Guinea menyebabkan sebagian wilayah Provinsi Papua rawan terhadap gempa bumi. Tingkat kerawanan gempa bumi di Provinsi Papua berada di jalur Pegunungan Tengah hingga bagian utara Papua, tergolong pada zona bahaya gempa bumi menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal (0,3–0,7 g) (Peta Bahaya Gempabumi Indonesia, 2007). Tercatat antara rentang waktu 1914 – 2007 terjadi 30 kali gempa bumi dengan magnituda antara 5,2 – 8,3 SR dan skala kerusakan antara V–IX MMI dengan jumlah korban meninggal mencapai 318 orang dan 1106 orang luka-luka (<http://www.vsi.esdm.go.id>). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura mencatat gempa bumi (episentrum) yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dalam periode 1988-2007 sebanyak lebih dari 2600 kali. Gempa bumi yang banyak terjadi (85,3%) adalah gempa tektonik dengan kekuatan (magnitudo) yaitu kurang dari 5 Skala Ritcher (SR) atau gempa ringan dan tidak merusak. Sedangkan gempa bumi kuat dan dapat merusak (5-7 SR) frekuensi terjadinya sekitar 14,5% dan berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura. Berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia, Provinsi Papua berada dalam zona XXV, XXVI dan XXVII Peta Wilayah Rawan Gempa Bumi Indonesia, dan zona XVI Peta Wilayah Rawan Tsunami Indonesia, yang berarti termasuk kategori wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (Atlas Nasional Indonesia, Bakosurtanal, 2008).

Di Provinsi Papua yang menjadi rawan gempa bumi terdapat di satu wilayah, yaitu wilayah pulau Biak–Yapen. Secara umum wilayah-wilayah ini berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh tubrukan dua lempeng. Pusat lokasi gempa bumi (episentrum) sebagian besar terjadi di darat dengan kedalaman sekitar 33 km (gempa dangkal). Gempa tipe ini sering berhubungan dengan aktivitas sesar (patahan) yang ada di jalur pegunungan

tengah Papua. Gempa di pulau Biak dan Yapen merupakan kontinuitas sesar Sorong dan dapat terjadi di darat maupun di bawah laut.

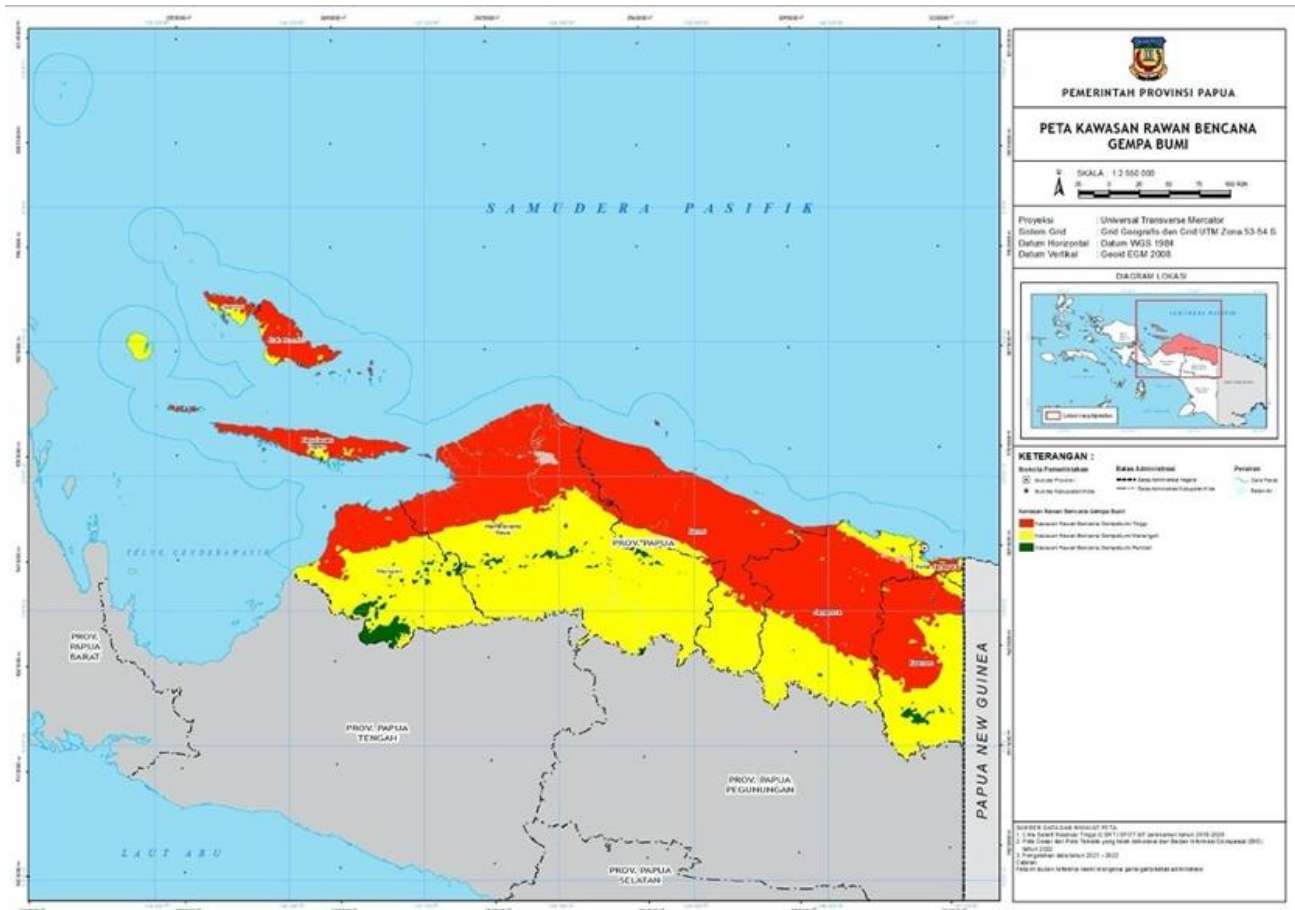
Jika terjadi di bawah laut dengan kekuatan lebih dari 7 SR dan merupakan gempa dangkal, maka berpotensi terjadi tsunami. Wilayah rawan tsunami diprediksi hanya terjadi di bagian pesisir utara Papua, termasuk semenanjung Wondama (teluk Cenderawasih).

Tabel II.12 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	667,913.15	19.94
2	Kepulauan Yapen	195,268.72	5.83
3	Biak Numfor	124.55	0.00
4	Sarmi	624,831.77	18.66
5	Keerom	36,642.82	1.09
6	Waropen	65,968.39	1.97
7	Supiori	30.85	0.00
8	Mamberamo Raya	1,698,934.93	50.73
9	Kota Jayapura	59,148.48	1.77
TOTAL		3,348,863.66	100

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar II.3 Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

B. Longsor

Longsor dapat terjadi pada wilayah yang memiliki topografi miring hingga curam dengan material penutup yang cukup tebal, serta kondisi air tanah yang relatif dangkal. Selain itu, faktor geologi juga dapat menimbulkan longsor seperti kontak batuan yang kedap sehingga menjadi bidang gelincir, kondisi fisik batuan yang mengandung banyak kekar, serta kondisi kegempaan. Wilayah rawan longsor ditentukan berdasarkan kriteria kerentanan terhadap gerakan tanah yang dapat dibedakan menjadi 3 kategori atau zona, yaitu :

- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah perbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jala atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.

- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

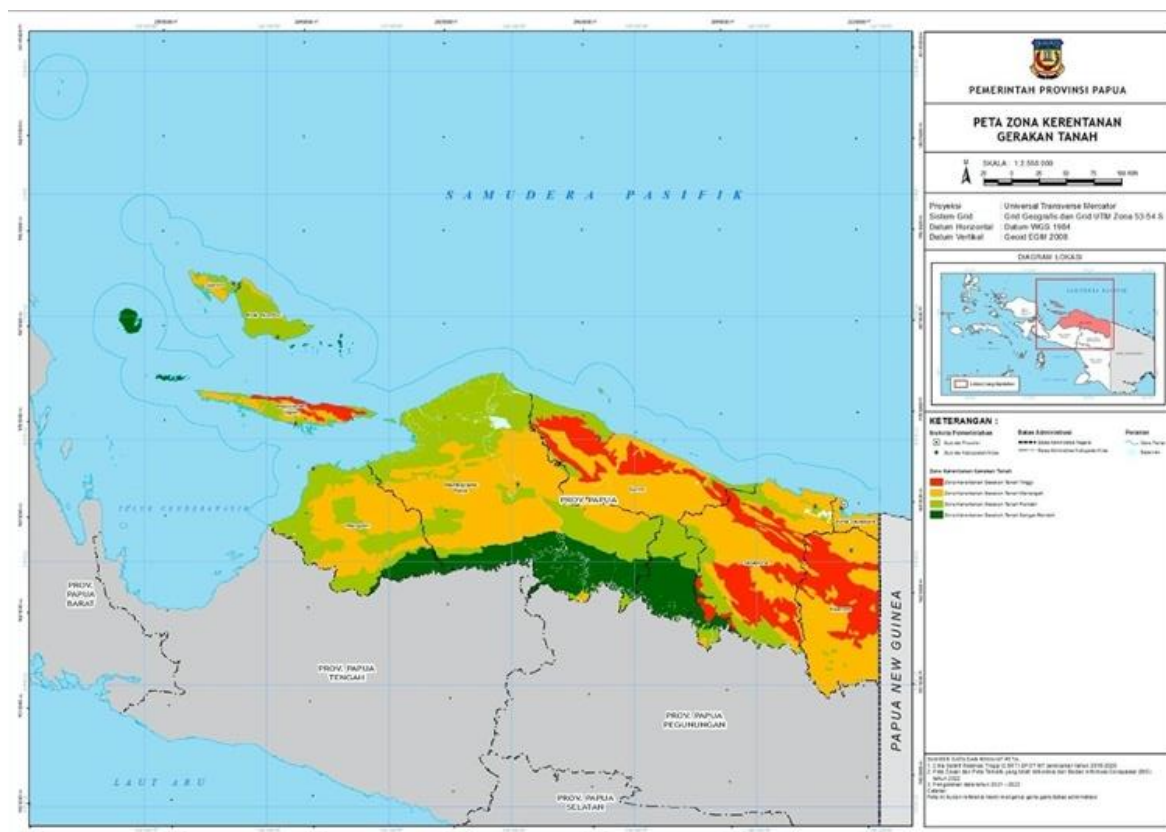
Di wilayah Provinsi Papua zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi berada di jalur pegunungan tengah dan pegunungan di utara Papua. Zona ini berhubungan erat dengan kondisi geologi yang dikendalikan oleh struktur lipatan dan sesar yang berarah relatif timur-barat. Keadaan topografi yang datar sangat terbatas sehingga pemukiman cenderung berkembang di bagian yang miring hingga agak terjal yang menjadi daerah aliran rombakan atau longsoran. Disamping itu, tingkat curah hujan sangat tinggi di bagian pegunungan menyebabkan laju longsor menjadi lebih cepat. Bahaya longsor tinggi terdapat di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Wilayah dengan indeks bahaya longsor tinggi terluas berada di Kabupaten Jayapura, diikuti Kota Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Tabel II.83 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	219,388.10	51.68
2	Kepulauan Yapen	58,886.97	13.87
3	Biak Numfor		0.00
4	Sarmi	53,175.90	12.53
5	Keerom	87,688.31	20.66
6	Waropen	0	0.00
7	Supiori	0	0.00
8	Mamberamo Raya	3,044.21	0.72
9	Kota Jayapura	2,314.49	0.55
TOTAL		424,497.98	100

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar II.4 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

C. Banjir

Bahaya banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap tahun pada saat musim hujan yang panjang dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang akibatkannya.

Banjir dapat terjadi akibat faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi banjir berada pada topografi yang relatif datar dengan pola sungai yang berbelok-belok (*meandering*) dan dataran banjir yang luas, keadaan struktur tanah atau batuan yang lambat meresapkan air, dan kapasitas sungai yang tidak dapat menampung dan mengalirkan air ke laut. Di samping itu, faktor manusia juga berperan menyebabkan banjir, di antaranya bertambahnya penduduk sehingga menempati daerah bantaran sungai dan dataran banjir alamiah sehingga mengurangi kantong-kantong air dan daerah parkir banjir, dan hilang atau berkurangnya daerah resapan akibat perubahan fungsi lahan untuk berbagai keperluan.

Di Provinsi Papua wilayah yang menjadi rawan bahaya banjir terdapat di bagian pesisir utara, yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya dan Waropen. Dalam skala setempat banjir juga terjadi di morfologi yang agak miring, terutama pada daerah aliran sungai yang telah terganggu. Akibatnya air sungai melimpah dari badan sungai dan mengisi daerah dataran yang lebih rendah (cekungan). Bila kejadian banjir ini membawa material padat, seperti lumpur, batubatuan atau bahkan kayu sisa pohon, umumnya menjadi bencana yang sangat dahsyat. Banjir seperti ini terjadi secara singkat dan sangat merusak, dikenal sebagai banjir bandang.

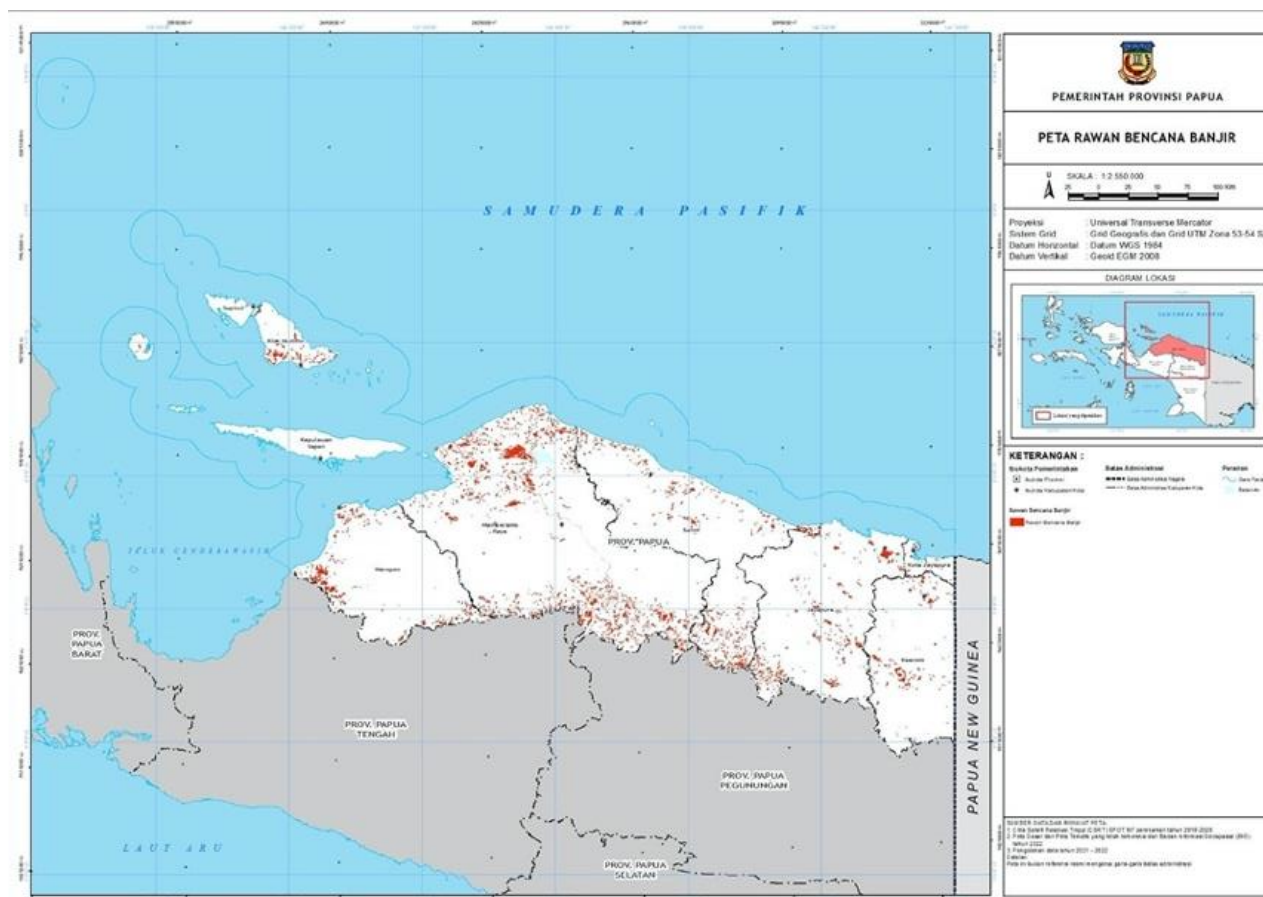
Sementara itu, bahaya banjir tinggi terdapat di 9 kabupaten/kota di Papua, dimana kabupaten dengan wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya, diikuti Kabupaten Sarmi dan Waropen.

Tabel II.94 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	48,859.59	8.24
2	Kepulauan Yapen	739.34	0.12
3	Biak Numfor	1,318.71	0.22
4	Sarmi	63,365.16	10.68
5	Keerom	26,972.71	4.55
6	Waropen	62,418.33	10.52
7	Supiori	282.66	0.05
8	Mamberamo Raya	385,285.77	64.95
9	Kota Jayapura	3,939.93	0.66
TOTAL		593,182.20	100

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar II.5 Peta Rawan Bencana Banjir



Sumber : Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

D. Tsunami

Tsunami dapat terjadi apabila terjadi gempa bumi tektonik di sekitar zona subduksi dengan pusat gempa bumi (kurang dari 33 km) dan magnituda lebih dari 6 Skala Richter (SR), serta menyebabkan deformasi permukaan dasar laut (cenderung patahan naik). Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi terjadi di bagian pesisir utara Papua, termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Tsunami yang pernah tercatat terjadi di Provinsi Papua berada di pulau Yapen tahun 1900, 1914, 1957, 1979 dan 1996 (Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2006).

Tsunami yang pernah terjadi termasuk kategori tsunami yang berbahaya hingga sangat berbahaya, dengan runup lebih dari 5 meter. Ada delapan Kabupaten/Kota yang memiliki resiko tsunami tinggi di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Daerah yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya, diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi.

Tabel II.10 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	503.16	2.37
2	Kepulauan Yapen	3,429.65	16.13
3	Biak Numfor	2,749.78	12.93
4	Sarmi	3,062.08	14.40
5	Keerom	1,171.63	5.51
6	Waropen	1,812.36	8.52
7	Supiori	7,886.21	37.09
8	Mamberamo Raya	544.89	2.56
9	Kota Jayapura	503.16	2.37
TOTAL		21,159.76	100

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

E. Kekeringan

Jika banjir dan tanah longsor terjadi pada musim hujan, maka kekeringan terjadi pada musim kemarau yang sangat panjang. Kekeringan terjadi bila curah hujan sangat rendah dan kelembaban udara berada di bawah normal dalam jangka waktu tertentu. Bahaya kekeringan merupakan jenis bahaya yang memiliki sifat serangan atau kejadian yang lambat dan dampaknya secara tidak langsung bisa berakumulasi selang beberapa waktu serta menimbulkan trauma yang dapat bertahan bertahun-tahun.

Dampak langsung yang dirasakan adalah berkurangnya produksi pangan dan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat secara signifikan. Bahan makanan sulit ditemukan dan jika ada maka harganya menjadi mahal. Air bersih sulit diperoleh dan sering menimbulkan konflik. Hewan ternak banyak yang mati dan menimbulkan wabah penyakit. Demikian parahnya bahaya kekeringan sehingga menimbulkan dampak yang besar dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kekeringan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Kekeringan meteorologis, yaitu kekeringan akibat curah hujan yang di bawah normal dan berlangsung dalam waktu lama;
2. Kekeringan hidrologis, yaitu kekeringan yang disebabkan oleh berkurangnya sumber-sumber air sehingga ketersediaannya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar;
3. Kekeringan pertanian, yaitu kekeringan yang berdampak pada produksi tanaman pangan dan ternak.

Di wilayah Provinsi Papua, jenis bahaya kekeringan pertanian lebih menonjol dibanding jenis kekeringan yang lain. Kekeringan jenis ini banyak terjadi di bagian pegunungan yang bertopografi tinggi dan curam, serta kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem, namun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kebutuhan bahan makanan berasal dari kebun atau ladang yang bersifat tadah hujan, serta hanya mengandalkan pada satu jenis makanan pokok. Bentuk kekeringan pertanian yang ekstrem adalah munculnya bencana kelaparan.

Berdasarkan laporan Yayasan Sosial untuk Masyarakat Tertinggal/ YASUMAT (2006) telah terjadi kekeringan pertanian yang menyebabkan kondisi rawan pangan di

Wamena pada Oktober 1997. Peristiwa serupa juga terjadi di Yahukimo pada periode September - Desember 2005 yang menyebabkan 57 orang meninggal dunia. Peristiwa terakhir ini cukup mengejutkan banyak pihak, baik di tingkat lokal (daerah) maupun nasional. Seperti telah dijelaskan di atas, bahaya kekeringan bersifat lambat dan sistematis, sehingga antisipasi bahaya sedini mungkin dapat dilakukan. Menjadi sangat ironi mengingat peristiwa ini terjadi pada era otonomi khusus diberlakukan, serta terjadi pada daerah yang masyarakatnya mayoritas berkebun dan dikenal sebagai petani ulet.

Hingga saat ini wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua belum dipetakan secara rinci dan lengkap. Informasi kekeringan lebih banyak diperoleh dari instansi teknis pertanian yang mengulas dampak dari kekeringan. Informasi tentang penyebab dan antisipasi serta penanganan bahaya kekeringan belum tertangani dengan baik.

F. Bencana Alam lainnya

Bencana-bencana lain dengan resiko tinggi yang juga terdapat di Provinsi Papua diantaranya adalah banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan karhutla.

II.1.1.5. Kondisi Kawasan

Sesuai posisi geografisnya, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah pesisir, wilayah kepulauan, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan.

Untuk daerah pesisir, Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik sehingga Papua memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan laut tangkap. Dengan kewenangan sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, Provinsi Papua memiliki luas wilayah laut sebesar 4.889.447,97 ha yang terdapat pada 8 Kab/Kota, yaitu Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya dan Kota Jayapura.

Sebagai wilayah pesisir utara Pulau Papua, Provinsi Papua memiliki pulau sebanyak 515 pulau yang tersebar di 8 Kab/Kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kab. Supiori dengan jumlah 171 pulau, Kab. Kepulauan Yapen dengan jumlah 148 pulau dan Kab. Biak Numfor dengan jumlah 124 pulau.

Pada wilayah perbatasan terdapat 4 pulau di Provinsi Papua yang merupakan pulau terluar, yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass dan Pulau Befondi di Kab. Supiori serta Pulau Liki di Kab. Sarmi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 4 kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar Daerah Tertinggal, yaitu Kab. Keerom dan Kab. Mamberamo Raya di wilayah adat Mamta serta Kab. Waropen dan Kab. Supiori di wilayah adat Saereri.

Dan berdasarkan kriteria daerah tertinggal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah, Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah/Daerah Tertentu, penyebab utama ketertinggalan untuk masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

NO	WILAYAH ADAT	KABUPATEN	PENYEBAB UTAMA KETERTINGGALAN (MENURUT URUTAN)					
			1	2	3	4	5	6
1	Mamta	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Keuangan	SDM		
		Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM			
2	Saereri	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Keuangan	
		Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Keuangan	Karakteristik	SDM	

Sumber: Strategis Daerah, Tahun 2022

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi

yang terdiri dari 8 kampung dengan status Berkembang dan 46 kampung dengan status Tertinggal.

Tabel II.17 Tabel Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

WILAYAH ADAT	KABUPATEN	DISTRIK	KAMPUNG	STATUS PERKEMBANGAN
MAMTA	Keerom	Web	Umuaf	Tertinggal
	Keerom	Web	Dubu	Tertinggal
	Keerom	Web	Yuruf	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Molof	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Senggi	Berkembang
	Keerom	Senggi	Warlef	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Jabanda	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Woslay	Berkembang
	Keerom	Waris	Kalimo	Tertinggal
	Keerom	Waris	Yuwainda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Banda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Kalifam	Tertinggal
	Keerom	Waris	Ampas	Tertinggal
	Keerom	Arso	Sawyatami	Tertinggal
	Keerom	Arso	UPT Pir III / Bagia	Tertinggal
	Keerom	Arso	Ubiyau	Tertinggal
	Keerom	Arso	Asiaman	Berkembang
	Keerom	Arso Timur	Kriku	Tertinggal
	Keerom	Skanto	UPT Arso XIV / Wulukubun	Berkembang
	Keerom	Skanto	Arsopura	Berkembang
	Keerom	Skanto	UPT Arso IX / Intaimilyan	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Waropen Atas	Barapasi	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Trimuris	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Warembori	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo	Burmeso	Berkembang

WILAYAH ADAT	KABUPATEN	DISTRIK	KAMPUNG	STATUS PERKEMBANGAN
		Tengah		
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ulu	Dabra	Tertinggal
SAERERI	Waropen	Waropen Bawah	Sawara Jaya SP VI	Berkembang
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Satu	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Dua	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Sarafambai	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Nonomi	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Awaso	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Soimiangga	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Harapan Jaya SP II	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Demisa SP III	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Kemon Jaya SP V	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Apainabo	Tertinggal
	Waropen	Oudate	Botawa	Berkembang
	Waropen	Kirihi	Dairi	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Sooh	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Diwa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kawari	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kuaisea	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Foida	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Dirou	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Antu Aru	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Wauka	Tertinggal
	Supiori	Supiori Selatan	Biniki	Tertinggal
	Supiori	Kepulauan Aruri	Rayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warsa	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warbor	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Koiryakam	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Wayori	Tertinggal
Supiori	Supiori Timur	Douwbo	Tertinggal	

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 126 Tahun 2017

Gambar II.6 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040



II.1.2 Aspek Demografi

Pada tahun 2022 Jumlah Penduduk Laki-laki di Provinsi Papua lebih tinggi yaitu 542,14 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan yang hanya sebesar 491,34 ribu jiwa, dengan Sex Ratio 110,34%. Jumlah penduduk terendah di Provinsi Papua adalah Kabupaten Supiori sebanyak 23,48 Ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling tertingginya adalah Kota Jayapura sebanyak 408,99 ribu jiwa berdasarkan tabel II.16 dibawah. Hal tersebut dikarenakan Kota Jayapura merupakan Ibukota Provinsi Papua dengan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan yang cukup memadai dan juga merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Papua.

Tabel II.128 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	123.780	125.975	128.587	131.802	166.171	168.476	169,97
2	Kepulauan Yapen	93.114	95.007	97.412	101.204	112.676	114.210	115,47
3	Biak Numfor	141.801	144.697	148.404	152.401	134.650	135.231	137,67
4	Sarmi	37.511	38.210	39.406	40.515	41.515	41.849	42,28
5	Keerom	54.130	55.018	55.799	57.100	61.623	62.157	62,82
6	Waropen	28.803	29.480	30.612	31.514	33.943	34.414	34,83
7	Supiori	18.486	19.104	20.018	20.710	22.547	22.860	23,48
8	Mamberamo Raya	21.821	22.313	23.307	24.086	36.483	36.989	37,88
9	Kota Jayapura	288.786	293.690	297.775	300.192	398.478	404.004	408,99
Provinsi Papua		808.232	823.494	841.320	859.524	1.008.086	1.020.190	1.033,39

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Tabel II.139 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.742	79.429	166.171
2	Kepulauan Yapen	58.496	54.180	112.676
3	Biak Numfor	69.060	65.590	134.650
4	Sarmi	22.116	19.399	41.515
5	Keerom	32.530	29.093	61.623
6	Waropen	18.002	15.941	33.943
7	Supiori	11.729	10.818	22.547
8	Mamberamo Raya	19.148	17.335	36.483
9	Kota Jayapura	212.438	186.040	398.478
Provinsi Papua		530.261	477.825	1.008.086

Sumber : BPS Provinsi Papua , 2021

Pada Tahun 2022 Total Orang Asli Papua di Provinsi Papua sebanyak 738.208 Jiwa, dengan jumlah penduduk Orang Asli Papua terbanyak ada pada Kota Jayapura sebanyak 217.767 Jiwa dan terendah ada pada Kabupaten Supiori sebanyak 23,591 Jiwa.

Tabel II.20 Jumlah Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kota Jayapura	118.037	99.730	217.767
2	Jayapura	75.916	68.839	144.755
3	Biak Numfor	62.029	58.865	120.894
4	Kepulauan Yapen	49.490	47.014	96.504
5	Keerom	19.728	16.442	36.170
6	Mamberamo Raya	18.416	16.911	35.327
7	Sarmi	17.474	15.397	32.871
8	Waropen	15.916	14.413	30.329
9	Supiori	12.238	11.353	23.591
Provinsi Papua		389.244	348.964	738.208

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua periode 2010-2020 sebesar 3,32 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2021 sebesar 1,54 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.

Tabel II.21 Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2022)	LPP 2010-2020	LPP 2020-2021
1	Jayapura	166.171	169.97	3,9	2,16
2	Kepulauan Yapen	112.676	115.47	3,01	2,91
3	Biak Numfor	134.650	137.67	0,58	2,66
4	Sarmi	41.515	42.28	2,25	2,15

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2022)	LPP 2010-2020	LPP 2020-2021
5	Keerom	61.623	62.82	2,34	2,30
6	Waropen	33.943	34.83	3,15	3,11
7	Supiori	22.547	23.48	3,45	4,82
8	Mamberamo Raya	36.483	37.88	6,87	4,41
9	Kota Jayapura	398.478	408.99	4,35	3,07
Provinsi Papua		1.008.086	1.020.190	3,32	2,52

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua sebesar 8,30 jiwa/km². Wilayah Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Kota Jayapura 436,99 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Waropen yaitu sebesar 1,09 jiwa/km². Adapun rincian kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.22 Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2022	Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Terbangun (Permukiman perkotaan dan Permukiman Kampung)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Ha)	
					Menurut Luas Wilayah Kab/ Kota	Menurut Luas Terbangun
1	Jayapura	166,171	11,157	2,157.15	0	79
2	Kepulauan Yapen	112,676	2,050	1,471.22	1	79
3	Biak Numfor	134,650	2,602	497.36	1	277
4	Sarmi	41,515	17,742	7,995.25	0	5
5	Keerom	61,623	8,390	5,841.14	0	11
6	Waropen	33,943	10,977	4,637.76	0	8
7	Supiori	22,547	678	1,018.13	0	23
8	Mamberamo Raya	36,483	23,814	2,021.96	0	19
9	Kota Jayapura	398,478	936	733.69	4	550
Total		841,915	67,189	24,216.51	6	972

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

II.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 sesuai amanat Permendagri No.54 Tahun 2010 dan format urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kinerja pemerintah daerah melalui capaian makro dan indikator penyusun capaian makro. Capaian yang dinilai pada aspek ini meliputi dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Adapun masing-masing penjelasan untuk tiap capaian adalah sebagai berikut.

II.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB Provinsi Papua dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel II.23 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Miliar rupiah) 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (DT) (Milliar Rp) 2018-2021			
		2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	14.531.351	16.381.306	16.062.754	17.177.623
2	Kepulauan Yapen	3.907.657	4.250.565	4.152.741	4.485.397
3	Biak Numfor	5.183.882	5.486.108	5.223.670	5.495.536
4	Sarmi	2.534.430	2.819.692	2.938.840	3.113.048
5	Keerom	2.701.905	2.855.770	2.924.344	3.070.627
6	Waropen	1.916.369	2.052.787	2.044.761	2.117.287
7	Supiori	946.749	1.009.182	1.042.047	1.087.347

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (DT) (Milliar Rp) 2018-2021			
		2018	2019	2020	2021
8	Mamberamo Raya	1.484.863	1.646.546	1.722.533	1.835.562
9	Kota Jayapura	30.422.576	32.325.748	32.032.134	33.199.634
Provinsi Papua		63.629.782	68.827.703	68.143.823	71.582.062

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka PDRB Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 63.629.782 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 99.232,88 miliar rupiah. Kota Jayapura merupakan daerah dengan PDRB tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir walaupun terjadi fluktuasi namun tidak signifikan, sedangkan Kabupaten Supiori adalah daerah dengan PDRB paling terendah.

Tabel II.24 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar rupiah) 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tabel 2.12 PDRB ADHK (DT) (Milliar Rp) 2018-2022			
		2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	9.312.179	9.978.844	9.776.716	10.271.631
2	Kepulauan Yapen	2.767.986	2.898.819	2.767.498	2.901.321
3	Biak Numfor	3.355.450	3.429.604	3.255.906	3.327.269
4	Sarmi	1.732.119	1.833.626	1.835.040	1.862.596
5	Keerom	1.916.264	1.991.014	1.992.546	2.048.897
6	Waropen	1.430.749	1.508.373	1.465.802	1.485.621
7	Supiori	729.405	760.965	769.120	781.180
8	Mamberamo Raya	957.669	1.013.951	1.017.227	1.030.714
9	Kota Jayapura	21.778.322	22.857.302	22.125.491	22.852.202
Provinsi Papua		43.980.143	46.272.498	45.005.345	46.561.430

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Sementara itu angka PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK) terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi melalui upaya menaikkan PDRB Per Kapita menunjukkan nilai yang cenderung fluktuasi. Selama kurun empat tahun terakhir nilai PDRB Papua ADHK masing-masing adalah 43.980,14 miliar rupiah (2018), 46.272,49 miliar rupiah (2019), 45.005,34 miliar rupiah (2020), dan 46.561,43 miliar rupiah (2021).

II.2.1.2 Laju Inflasi Daerah

. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy (secara rinci dapat dilihat pada tabel 5). Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya akademi/perguruan tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung

Tabel II.25 Tingkat Inflasi Month to Month, Year to Year to date dan Year on Year Tahun 2021-2023 Provinsi Papua

No	Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Month to Month (mtm) Januari	-0,27	0,03	-0,40
2	Year To Date (ytd) Januari	-0,27	0,03	-0,40
3	Year on Year (yoy) Januari	0,93	2,10	5,23

Sumber : BPS Provinsi Papua

II.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pada tabel 2.22 menunjukkan persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua mencapai 14,88 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021, capaian tersebut menunjukkan ada penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 18,33 persen. Kabupaten Supiori ditahun 2021 merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 34,25 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Suiori, sedangkan Kota Jayapura ditahun yang sama merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 8,61 persen dari jumlah penduduk Kota Jayapura diikuti Kabupaten Jayapura yang mencapai 9,24 persen. Kedua daerah tersebut juga telah menunjukkan adanya penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan 3 tahun kebelakang.

Tabel II.14 Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten/Kota	Tabel 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua 2018-2021				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	13,37	13,04	12,38	9,24	na
2	Kepulauan Yapen	27	26,87	26,17	22,48	Na
3	Biak Numfor	25,56	25,33	24,45	26,90	Na
4	Sarmi	14,39	14,32	13,81	13,29	Na
5	Keerom	16,85	16,73	16,27	14,96	Na
6	Waropen	30,25	30,72	29,41	28,16	Na

No.	Kabupaten/Kota	Tabel 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua 2018-2021				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Supiori	38,77	38,48	36,72	34,25	Na
8	Mamberamo Raya	29,78	28,90	28,18	19,03	Na
9	Kota Jayapura	11,33	11,47	11,13	8,61	Na
Provinsi Papua		18,33	18,31	17,71	14,88	Na

Sumber : BPS Provinsi Papua

II.2.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel II.15 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	9.60	9.79	10.04	10.05	10.27
2	Kepulauan Yapen	9.07	9.19	9.46	9.47	9.69
3	Biak Numfor	10.00	10.22	10.33	10.34	10.53
4	Sarmi	8.52	8.53	8.82	8.83	9.15
5	Keerom	7.83	8.00	8.01	8.02	8.31
6	Waropen	8.87	9.18	9.20	9.21	9.40
7	Supiori	8.39	8.60	8.81	8.87	9.09
8	Mamberamo Raya	5.46	5.65	5.66	5.87	6.12
9	Kota Jayapura	11.3	11.55	11.56	11.57	11.74
Provinsi Papua		8.78	8.97	9.10	9.14	9.37

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Daerah di Provinsi Papua yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2022 berada di Kota Jayapura dengan nilai RLS 11,74 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Mamberamo Raya dengan nilai 6,12.

II.2.1.5 Harapan lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel II.28 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	14.17	14.19	14.20	14.39	14.40
2	Kepulauan Yapen	12.24	12.72	12.73	12.74	12.80
3	Biak Numfor	13.94	13.95	13.96	14.20	14.21
4	Sarmi	11.55	11.81	12.05	12.29	12.32
5	Keerom	12.14	12.41	12.42	12.43	12.45
6	Waropen	12.77	12.78	12.79	12.80	12.83
7	Supiori	12.72	12.73	12.74	13.00	13.18
8	Mamberamo Raya	11.30	11.78	11.79	11.80	11.82
9	Kota Jayapura	14.99	15.00	15.01	15.02	15.04
Papua		12.87	13.04	13.08	13.19	13.23

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

II.2.1.6 Angka harapan hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH di Provinsi Papua.

Tabel II.16 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Harapan Hidup (AHH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Jayapura	70,00	70,15	70,38	70,45	70,52	70,76
2	Kepulauan Yapen	68,71	68,85	69,06	69,12	69,17	69,39
3	Biak Numfor	67,87	68,00	68,20	68,25	68,29	68,50
4	Jayapura	66,47	66,66	66,93	67,05	67,16	67,45
5	Keerom	66,18	66,35	66,60	66,69	66,78	67,04
6	Sarmi	65,82	66,00	66,26	66,36	66,46	66,74
7	Waropen	65,82	65,99	66,24	66,33	66,42	66,68
8	Supiori	65,33	65,53	65,81	65,94	66,06	66,36
9	Mamberamo Raya	56,90	57,18	57,55	57,77	58,00	58,29
Provinsi Papua		65.90	66.08	66.34	66.44	66.54	66.80

Sumber: Bps Provinsi Papua

II.2.1.7 Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel II.170 Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Masyarakat					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Jayapura	14.781	14.922	15.176	14.763	14.937	15.189
2	Jayapura	10.055	10.160	10.375	9.898	9.989	10.230
3	Biak Numfor	9.812	9.969	10.211	9.705	9.607	9.788
4	Keerom	8.824	8.918	9.136	8.910	8.926	9.153
5	Kepulauan Yapen	7.605	7.739	7.785	7.484	7.491	7.685
6	Waropen	6.810	6.978	7.018	6.732	6.788	6.919
7	Sarmi	6.723	6.814	6.860	6.600	6.617	6.864
8	Supiori	5.655	5.769	5.820	5.677	5.708	5.904
9	Mamberamo Raya	4.596	4.755	4.807	4.581	4.603	4.806
Provinsi Papua		8.318	8.447	8.576	8.261	8.296	8.504

Sumber: BPS Provinsi Papua

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua mengalami kenaikan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2017 hingga 2022 di setiap kabupaten kota di Provinsi Papua. Kabupaten dengan nilai tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 15.189 oleh Kota Jayapura sedangkan kabupaten Mamberamo Raya yg terendah dengan nilai 4.806.

II.2.1.8 Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak

berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di provinsi papua dapat melihat tabel berikut.

Tabel II.31 Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	BB/U				TB/U			
	Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
Jayapura	38	226	2130	169	88	292	2030	9
Kepulauan Yapen	48	154	1614	16	58	212	1546	14
Biak Numfor	106	460	2680	129	131	294	2830	22
Sarmi	11	66	529	51	15	82	554	6
Keerom	34	152	1339	108	34	169	1419	3
Waropen	37	112	445	13	28	70	393	5
Supiori	27	100	419	15	22	93	445	0
Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	167	776	6788	558	248	653	7187	58

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Tabel II.18 Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

Kabupaten/Kota	BB/TB					
	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
Jayapura	34	143	1 835	281	98	30
Kepulauan Yapen	24	124	1 611	56	13	4
Biak Numfor	91	256	2 495	267	86	65
Sarmi	16	41	517	60	15	7
Keerom	31	101	1 297	133	40	23
Waropen	36	65	381	16	2	0
Supiori	14	44	465	26	11	1
Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	159	591	6 422	654	226	112

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

II.2.1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua mencapai 652,046 jiwa, yang terdiri dari 597,410 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 61,10% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 218,902 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua mencapai 34,484 jiwa atau sebanyak 5,77% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua dengan jumlah mencapai 241,422 jiwa, yang terdiri dari 210,625 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,75% dan 87,522 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua berada pada Kabupaten Keerom. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Keerom mencapai 76,91% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1,41%.

Kota Jayapura memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67% atau sebanyak 17,961 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua dapat melihat tabel berikut.

Tabel II.33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Penduduk 15+	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	Jayapura	97.424	90.845	61.008	5.208	31.208	67,97	7,87
2	Kepulauan Yapen	71.762	64.755	44.751	1.134	25.877	63,94	2,47
3	Biak Numfor	111.388	109.947	70.036	7.344	34.008	69,47	9,49
4	Sarmi	30.202	28.329	19.984	725	9.493	68,57	3,50
5	Keerom	44.430	47.019	33.690	481	10.259	76,91	1,41

No	Kabupaten/Kota	Penduduk 15+	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
6	Waropen	23.870	17.009	12.309	1.152	10.409	56,39	8,56
7	Supiori	14.575	14.270	9.726	266	4.583	68,56	2,66
8	Mamberamo Raya	16.973	14.611	10.962	213	5.543	66,84	1,91
9	Kota Jayapura	241.422	210.625	135.939	17.961	87.522	63,75	11,67

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua, (BPS Papua)

II.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia

Selama tahun 2017-2022, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus "rendah" menjadi berstatus "sedang". IPM kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2022 sebagian masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2022 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 80,61 poin, kemudian di ikuti dengan Kabupaten Biak Numfor pada urutan ke-2, dan Kabupaten Jayapura di urutan ke-3. Adapun pada tahun 2022 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Mamberamo Raya. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	70,97	71,25	71,84	71,69	72,03	72,67
2	Kepulauan Yapen	66,07	67	67,76	67,66	67,72	68,41
3	Biak Numfor	71,56	71,96	72,57	72,19	72,33	72,85

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Sarmi	62,31	63	63,45	63,63	63,94	64,86
5	Keerom	64,99	65,75	66,59	66,40	66,49	67,24
6	Waropen	64,08	64,80	65,34	64,94	65,10	65,67
7	Supiori	61,23	61,84	62,30	62,30	62,72	63,65
8	Mamberamo Raya	50,25	51,24	52,20	51,78	52,18	53,10
9	Jayapura	79,23	79,58	80,16	79,94	80,11	80,61
Provinsi Papua		64.87	65.63	66.27	66.91	66.73	66.96

Sumber: BPS Provinsi Papua

II.2.1.11 Indeks Gini

Indeks gini rasio pada umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk pada suatu wilayah tertentu. Berikut ini terlihat data rasio gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam 5 (Lima) tahun terakhir yang terlihat sebagai berikut.

Tabel II.35 Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	Rasio Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	0,281	0,337	0,401	0,432	0,378
2	Kepulauan yapen	0,325	0,374	0,381	0,400	0,387
3	Biak Numfor	0,361	0,430	0,372	0,401	0,374
4	Sarmi	0,400	0,420	0,436	0,424	0,409
5	Keerom	0,358	0,382	0,432	0,396	0,393
6	Waropen	0,344	0,279	0,369	0,346	0,405
7	Supiori	0,252	0,382	0,364	0,319	0,320
8	Mamberamo Raya	0,203	0,405	0,411	0,211	0,324
9	Kota Jayapura	0,317	0,310	0,305	0,278	0,276
Provinsi Papua		0.316	0.369	0.369	0.356	0.363

Sumber: BPS Provinsi Papua

Dari data di atas terlihat bahwa secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode 2017 s/d Maret 2021 terus mengalami fluktuasi, data terakhir di 2021 menunjukkan indeks gini ratio Provinsi Papua sebesar 0,363.

II.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

Perekonomian Provinsi Papua dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha dalam mengidentifikasi sektor basis, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.36 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.387.174,48	6.607.796,12	6.743.567,28	6.731.111,36	6.849.317,46
B	Pertambangan dan Penggalian	381.647,05	396.811,03	412.537,82	422.502,76	434.868,91
C	Industri Pengolahan	1.359.306,63	1.416.941,71	1.431.617	1.425.165,06	1.451.509,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26.187,63	27.412,58	28.508,97	28.378,66	29.355,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.993,70	57.511,45	57.568,85	57.258,99	58.227,51
F	Konstruksi	7.248.136,78	7.583.140,16	8.109.169,01	8.180.838,31	8.563.907,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.842.812,85	6.198.002,36	6.583.747,59	6.049.632,16	6.892.304,45
H	Transportasi dan Pergudangan	3.224.177,50	3.457.360,65	3.673.256,25	2.467.803,62	2.686.529,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	623.925,13	653.042,78	682.743	545.653,70	577.486,67
J	Informasi dan Komunikasi	2.912.841,85	3.040.273,37	3.137.810,76	3.399.464,50	3.560.063,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.282.025,49	1.376.171,95	1.450.551,75	1.420.411,14	1.450.249,37
L	Real Estate	1.981.508,29	2.069.589,28	2.157.697,49	2.177.507,76	2.271.894,89
M,N	Jasa Perusahaan	1.008.914,61	1.095.037,74	1.178.184,96	1.111.542,69	1.183.941,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.674.555,20	6.074.717,41	6.488.340,51	6.292.418,90	6.305.169,15
P	Jasa Pendidikan	1.610.069,72	1.708.182,42	1.764.970,50	1.748.311,59	1.718.038,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.218.330,83	1.297.923,60	1.388.814,86	1.465.160,67	1.523.478,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	861.718,38	920.228,14	983.411,05	971.860,57	1.005.088,22
PDRB		41.698.326,12	43.980.142,75	46.272.497,65	44.495.022,44	46.561.429,80

Sumber: BPS Provinsi Papua

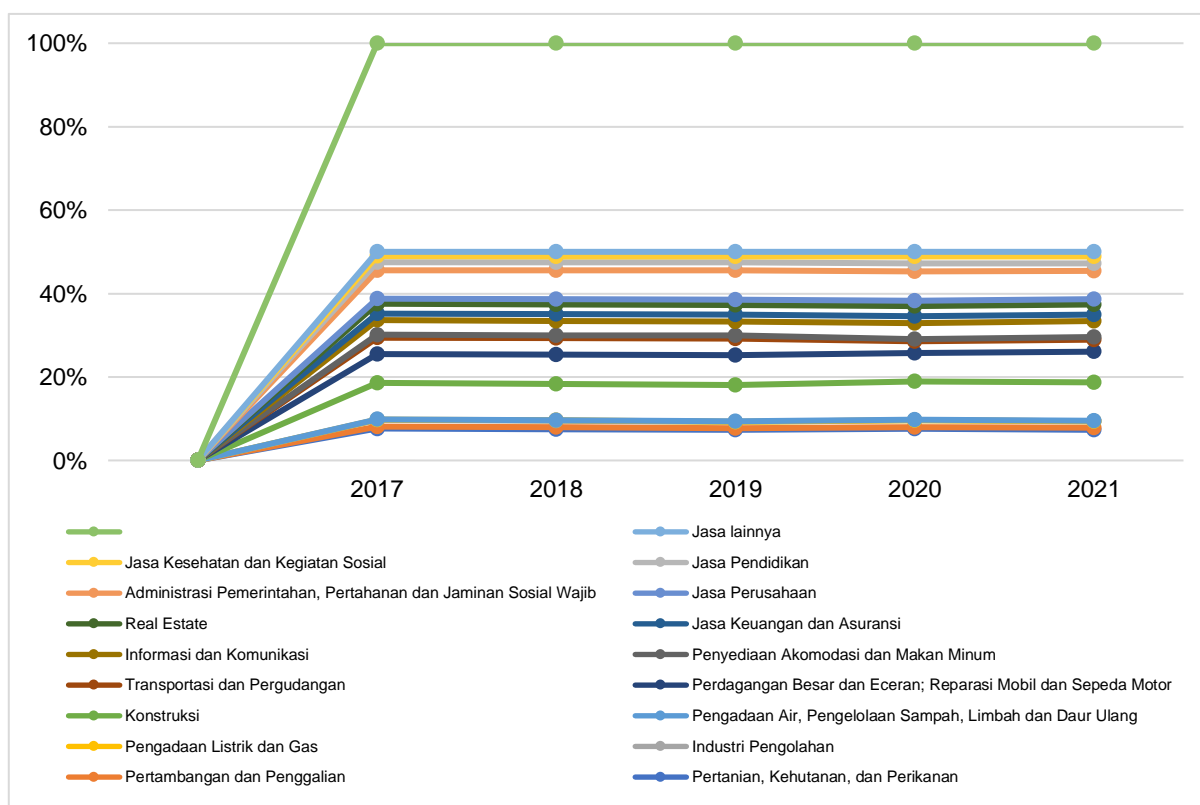
Tabel II.19 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (persen)

No	Lapangan usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,32%	15,02%	14,57%	15,13%	14,71%	14,95%
B	Pertambangan dan Penggalian	0,92%	0,90%	0,89%	0,95%	0,93%	0,92%
C	Industri Pengolahan	3,26%	3,22%	3,09%	3,20%	3,12%	3,18%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13%	0,13%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%
F	Konstruksi	17,38%	17,24%	17,52%	18,39%	18,39%	17,79%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,01%	14,09%	14,23%	13,60%	14,80%	14,15%
H	Transportasi dan Pergudangan	7,73%	7,86%	7,94%	5,55%	5,77%	6,97%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50%	1,48%	1,48%	1,23%	1,24%	1,38%
J	Informasi dan Komunikasi	6,99%	6,91%	6,78%	7,64%	7,65%	7,19%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07%	3,13%	3,13%	3,19%	3,11%	3,13%
L	Real Estate	4,75%	4,71%	4,66%	4,89%	4,88%	4,78%
M,N	Jasa Perusahaan	2,42%	2,49%	2,55%	2,50%	2,54%	2,50%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,61%	13,81%	14,02%	14,14%	13,54%	13,83%
P	Jasa Pendidikan	3,86%	3,88%	3,81%	3,93%	3,69%	3,84%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,92%	2,95%	3%	3,29%	3,27%	3,09%
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07%	2,09%	2,13%	2,18%	2,16%	2,13%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2017-2021, dengan sektor konstruksi yang memiliki kontribusi rata-rata terbesar yakni 17,79%, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,95% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,83%.

Gambar II.7 Grafik Fluktuasi Kontribusi Sektor lapangan Usaha terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sektor konstruksi merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua, berbeda dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menjadi sektor yang berkontribusi rendah dalam PDRB.

Tabel II.20 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.925.821,09	9.459.130,54	9.982.090,28	10.126.614,17	10.523.447,31
B	Pertambangan dan Penggalian	1.248.838	1.327.957,24	1.423.264,11	1.467.062,07	1.520.335,38
C	Industri Pengolahan	1.864.694,96	2.026.876,03	2.117.034,21	2.155.933,65	2.239.326,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.442,71	40.221,72	43.518,91	43.038,81	45.341,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69.288,67	74.076,90	75.200,11	73.230,40	76.107
F	Konstruksi	11.432.510,66	12.417.078,67	13.559.578,46	14.127.333,72	15.010.948,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.080.900,31	8.885.602,85	9.672.241,98	9.994.327,96	10.687.140,95
H	Transportasi dan Pergudangan	5.235.042,24	5.967.961,97	6.672.824,22	4.298.253,34	4.752.423,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899.747,52	961.779,46	1.045.975,44	862.573,57	909.381,07
J	Informasi dan Komunikasi	3.477.009,43	3.697.340,25	3.894.208,58	4.267.786,35	4.522.228,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.862.465,62	2.064.224,26	2.194.267,02	2.177.179,02	2.293.191,26
L	Real Estate	2.763.155,74	2.925.458,44	3.156.695,94	3.212.644,87	3.435.254,79
M,N	Jasa Perusahaan	1.309.212,85	1.475.750,33	1.616.996,03	1.613.801,17	1.683.728,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.545.992,05	8.322.958,48	9.077.278,16	9.229.800,85	9.248.396,05
P	Jasa Pendidikan	1.829.991,07	1.967.529,74	2.073.211,07	2.078.824,98	1.995.674,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.573.016,28	1.697.288,73	1.827.814,39	2.048.209,48	2.197.133,45
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.040.593,55	1.126.901,01	1.228.147,60	1.258.251,56	1.327.873,49
PDRB		59.194.722,75	64.438.136,62	69.660.346,51	69.034.865,97	72.467.931,92

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel II.21 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (persen)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,08%	14,68%	14,33%	14,67%	14,52%	14,66%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11%	2,06%	2,04%	2,13%	2,10%	2,09%
C	Industri Pengolahan	3,15%	3,15%	3,04%	3,12%	3,09%	3,11%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
F	Konstruksi	19,31%	19,27%	19,47%	20,46%	20,71%	19,85%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,65%	13,79%	13,88%	14,48%	14,75%	14,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	8,84%	9,26%	9,58%	6,23%	6,56%	8,09%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,52%	1,49%	1,50%	1,25%	1,25%	1,40%
J	Informasi dan Komunikasi	5,87%	5,74%	5,59%	6,18%	6,24%	5,92%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15%	3,20%	3,15%	3,15%	3,16%	3,16%
L	Real Estate	4,67%	4,54%	4,53%	4,65%	4,74%	4,63%
M,N	Jasa Perusahaan	2,21%	2,29%	2,32%	2,34%	2,32%	2,30%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,75%	12,92%	13,03%	13,37%	12,76%	12,97%
P	Jasa Pendidikan	3,09%	3,05%	2,98%	3,01%	2,75%	2,98%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,66%	2,63%	2,62%	2,97%	3,03%	2,78%
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,76%	1,75%	1,76%	1,82%	1,83%	1,78%
PDRB		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Papua

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2021 di Provinsi Papua pada sektor Konstruksi 19,85%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,66%, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,11%.

II.2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada : (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

II.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

G. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
		7-12			13-15			16-18		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kota Jayapura	97.76	97.75	98.03	97.94	98.07	97.69	92.78	92.21	97.12
2	Jayapura	96.36	95.92	95.95	94.70	94.63	95.23	83.75	82.25	84.32
3	Keerom	90.83	90.74	89.40	89.09	88.82	88.74	74.93	70.33	77.88
4	Sarmi	92.97	92.95	91.02	91.33	91.00	91.38	72.08	71.99	71.75
5	Mamberamo Raya	97.41	97.41	96.44	96.11	96.27	96.57	64.91	68.94	68.88
6	Kepulauan Yapen	94.69	94.67	93.78	95.90	95.03	95.12	78.06	78.73	78.86
7	Biak Numfor	94.77	97.62	97.50	97.49	97.96	97.47	82.48	84.96	89.11
8	Waropen	93.21	96.87	96.52	94.10	93.71	93.45	79.00	77.72	78.60
9	Supiori	94.54	96.57	96.20	91.93	92.19	92.11	77.03	76.55	76.46
Provinsi Papua		94.73	95.61	94.98	94.29	94.19	94.20	78.34	78.19	80.33

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

2. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Provinsi Papua terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi. Jumlah TK/RA yang terdapat di Provinsi Papua sebanyak 237 unit, SD/MI sebanyak 849 unit, SMP/MTs sebanyak 279 unit, SMA/SMK/MA sebanyak 168 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 30 unit.

Tabel II.41 Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua (unit), 2021/2022				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
1	Jayapura	52	141	50	34	5
2	Kepulauan Yapen	14	124	36	18	3
3	Biak Numfor	18	167	55	26	6
4	Sarmi	6	65	19	9	0
5	Keerom	51	81	20	13	0
6	Waropen	2	54	18	8	0

No	Kabupaten	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua (unit), 2021/2022				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
7	Supiori	29	40	13	8	0
8	Mamberamo Raya	2	71	20	6	0
9	Kota Jayapura	63	106	48	46	16
Total		237	849	279	168	30

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2020



Gambar II.8 Kondisi Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua

3. Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua stabil dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua mencapai 17.543 dan mengalami peningkatan menjadi 17.859 pada tahun 2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.42 Perkembangan Guru di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Jayapura	1.708	1.756	1.592	1.542	3.300	3.298
2	Kepulauan Yapen	962	1022	679	745	1641	1767
3	Biak Numfor	1.497	1.493	1340	1343	2.837	2.836
4	Sarmi	582	622	274	250	856	872
5	Keerom	964	1033	502	485	1466	1518
6	Waropen	528	499	175	175	703	674
7	Supiori	443	490	182	202	625	692
8	Mamberamo Raya	287	358	64	71	351	429
9	Kota Jayapura	2.930	3.009	2.834	2.764	5.764	5.773
Total						17.543	17.859

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Jumlah murid di Provinsi Papua stabil dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 jumlah murid yang tersedia di Provinsi Papua mencapai 226.845 dan mengalami peningkatan menjadi 229.344 pada tahun 2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.43 Perkembangan Murid di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Jayapura	22.787	23.284	18.785	19.096	41.572	42.380
2	Kepulauan Yapen	14.475	14.503	12.337	13.170	26.812	27.673
3	Biak Numfor	22.936	23.008	17.080	17.094	40.016	40.102
4	Sarmi	7.360	7.626	3.891	3.842	11.251	11.468
5	Keerom	11.139	11.274	5.264	4.970	16.403	16.244
6	Waropen	5.959	6.024	1.837	1.796	7.796	7.820
7	Supiori	5.123	5.148	2.709	2.712	7.832	7.860

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
8	Mamberamo Raya	7.460	7.502	1.006	952	8.466	8.454
9	Kota Jayapura	38.890	39.537	27.807	27.806	66.697	67.343
Total						226.845	229.344

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

H. Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup)

Tabel II.22 Angka Kematian Bayi

No	Kabupaten	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah kematian bayi	Jumlah kelahiran hidup	Per 1000 KH
1	Jayapura	12	2.041	6
2	Kepulauan Yapen	37	2.010	18
3	Biak Numfor	14	1.453	10
4	Sarmi	0	235	0
5	Keerom	13	793	16
6	Waropen	2	30	67
7	Supiori	3	387	8
8	Mamberamo Raya	0	86	0
9	Kota Jayapura	10	4.955	2
10	Provinsi Papua (Akumulasi 29 Kab/Kota)	373	33.589	11

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 Kab/kota.

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel II.45 Angka Kematian Ibu

No	Kabupaten	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kelahiran hidup	Per 100.000 KH
1	Jayapura	4	2041	196
2	Kepulauan Yapen	3	2010	149
3	Biak Numfor	2	1453	138
4	Sarmi	0	235	0
5	Keerom	4	793	504
6	Waropen	1	30	3333
7	Supiori	1	387	258
8	Mamberamo Raya	0	86	0
9	Kota Jayapura	4	4955	81
10	Provinsi Papua (Akumulasi 29 Kab/Kota)	78	33589	232

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2021 angka kematian ibu mencapai angka 232 (Akumulasi dari 29 Kab/Kota)

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Provinsi Papua meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik dan puskesmas. Rumah sakit di Provinsi Papua sebanyak 20 unit, rumah sakit bersalin 2, poliklinik sebanyak 25 unit dan puskesmas sebanyak 118 unit (Akumulasi dari 9 Kab/Kota). Rincian fasilitas kesehatan di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.46 Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan 2021			
		RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas
1	Jayapura	1	2	7	21
2	Kepulauan Yapen	1	0	2	15
3	Biak Numfor	4	0	2	21
4	Sarmi	1	0	2	11
5	Keerom	0	0	2	9
6	Waropen	2	0	1	11
7	Supiori	2	0	0	5
8	Mamberamo Raya	1	0	0	11
9	Kota Jayapura	8	0	9	14
Total		20	2	25	118

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2020



Gambar II.29 Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua

I. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.23 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)

Kab/Kota	Panjang Jalan (Km)		
	Aspal	Lainnya	Total
Jayapura	178	206.1	384.1
Kepulauan Yapen	58	117.01	175.01
Biak Numfor	164.4	7.6	172
Sarmi	0	37.7	37.7
Keerom	12	79.8	91.8

Kab/Kota	Panjang Jalan (Km)		
	Aspal	Lainnya	Total
Waropen	45.5	57	102.5
Supiori	30	49.21	79.21
Mamberamo Raya	0	75.6	75.6
Kota Jayapura	96.38	8	104.38
Provinsi Papua	584.28	638.02	1.222.3

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

J. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua semenjak tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 500 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel II.24 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	RUMAH SWADAYA (UNIT)							RUMAH KHUSUS (UNIT)							BANTUAN PSU	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
1	Biak Numfor	300	320	450	160	100	-	35	87	25	10	-	-	-	-	-	-
2	Jayapura	200	-	725	431	261	66	162	50	25	25	-	12	-	-	60	92
3	Keerom	-	-	615	190	100	129	177	-	-	-	25	-	-	-	-	-
4	Kepulauan Yapen	-	-	290	166	250	165	165	110	25	-	-	-	-	20	-	-
5	Mamberamo Raya	-	270	-	70	150	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarmi	-	200	-	196	185	-	-	-	10	-	-	20	-	-	-	-
7	Supiori	200	550	-	180	100	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
8	Waropen	-	190	160	170	250	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
9	Kota Jayapura	300	150	460	205	444	20	550	-	-	-	-	-	-	-	235	454
Total Unit Per/Tahun		1000	1680	2700	1768	1840	380	1089	247	129	35	25	61	0	20	295	546

Sumber : data RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode 12 September 2022)

K. Urusan Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

L. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

II.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua mencapai 652,046 jiwa, yang terdiri dari 597,410 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 61,10% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 218,902 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua mencapai 34,484 jiwa atau sebanyak 5,77% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua dengan jumlah mencapai 241,422 jiwa, yang terdiri dari 210,625 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,75% dan 87,522 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua berada pada Kabupaten Keerom. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Keerom mencapai 76,91% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1,41%. Kota Jayapura memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67% atau sebanyak 17,961 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua dapat melihat tabel berikut.

Tabel II.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk 15+	Angk. Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angk. Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1 Jayapura	97,424	90,845	618	5,208	31,208	67,97	7,87
2 Kepulauan Yapen	71,762	64,755	44,751	1,134	25,877	63,94	2,47
3 Biak Numfor	111,388	109,947	70,036	7,344	348	69,47	9,49
4 Sarmi	30,202	28,329	19,984	725	9,493	68,57	3,50
5 Keerom	44,430	47,019	33,690	481	10,259	76,91	1,41
6 Waropen	23,870	179	12,309	1,152	10,409	56,39	8,56

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk 15+	Angk. Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angk. Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
7 Supiori	14,575	14,270	9,726	266	4,583	68,56	2,66
8 Mamberamo Raya	16,973	14,611	10,962	213	5,543	66,84	1,91
9 Kota Jayapura	241,422	210,625	135,939	17,961	87,522	63,75	11,67
Provinsi Papua	652,046	597,410	398,405	34,484	218,902	61.10	5.77

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua mencapai 12,918 jiwa atau sebesar 47,69% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua. Kota Jayapura merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.592 atau sebesar 20.07% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kota Jayapura. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020

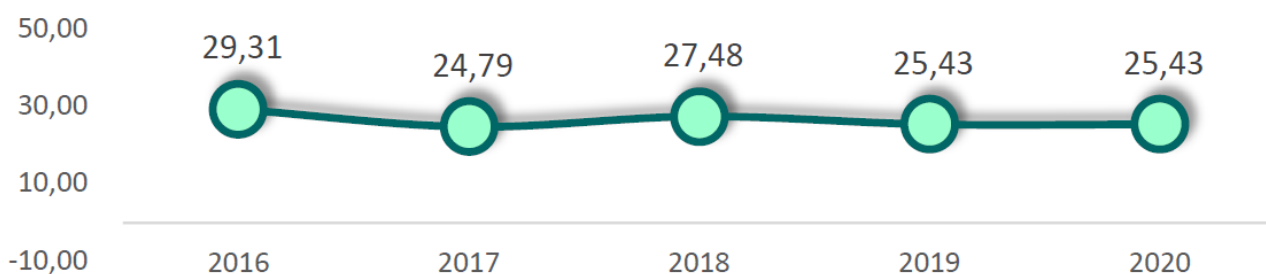
No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	1.970	2.384	4.354
2	Kepulauan Yapen	2.036	1.539	3.575
3	Biak Numfor	2.193	2.081	4.274
4	Sarmi	1.247	910	2.157
5	Keerom	1.474	1.277	2.751
6	Waropen	1.217	742	1.959
7	Supiori	1.304	958	2.262
8	Mamberamo raya	1.003	435	1.438
9	Kota Jayapura	1.725	2.592	4.317
Provinsi Papua		14.169	12.918	27.087

Sumber: BPS Provinsi Papua,

C. Urusan Pangan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 Kkal/Kapita/Hari tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 29,3, turun menjadi 24,79 di tahun 2017. Kemudian meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 27,48 selanjutnya kembali menurun hingga tahun 2020 menjadi 25,43.

Gambar II.22 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Tahun 2016-2020



Sumber : BPS RI,2022

Untuk konsumsi kedelai atau setara kedelai pada tahun 2020 sebesar 2,23 kg/kapita/tahun untuk Tahu, sementara konsumsi tempe sebesar 1,65 kg/kapita/tahun dan untuk kecap sebesar 0,34 kg/kapita/tahun.

Tabel II.51 Konsumsi kedelai yang terdapat pada tahu, tempe dan kecap di Provinsi Papua Tahun 2020

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber : BPS RI,2022

Selanjutnya bila dilihat pertahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 3,42 kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 3,66 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,22 kg/kapita/tahun, dengan laju pertumbuhan sebesar 11,09 per tahun.

**Tabel II.52 Konsumsi total setara kedelai (tahu, tempe dan kecap)
per Provinsi Tahun 2018 – 2020**

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber : BPS RI,2022

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 15,12 dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 7,58.

Gambar II.53 Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	9,85	15,12	10,98	8,68	7,58
Indonesia	8,66	6,86	5,42	5,12	4,79

Sumber : BPS RI,2022

Selanjutnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di provinsi papua sepanjang tahun 2017-2020 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 sebesar 34,27 meningkat menjadi 37,37 di tahun 2021, meskipun pada tahun 2018 sempat mencapai 38,35.

Tabel II.54 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	34,27	38,35	38,21	31,49	37,37
Indonesia	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49

Sumber : BPS RI,2022

D. Urusan Pertanahan

Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 7.057 ha yang dialihkan turun menjadi 5.887 ha yang dialihkan pada tahun 2017, dimana peralihan tanah paling banyak adalah jual-beli sebanyak 6.208 ha ditahun 2016 dan 5.211 ha ditahun 2017.

Tabel II.55 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

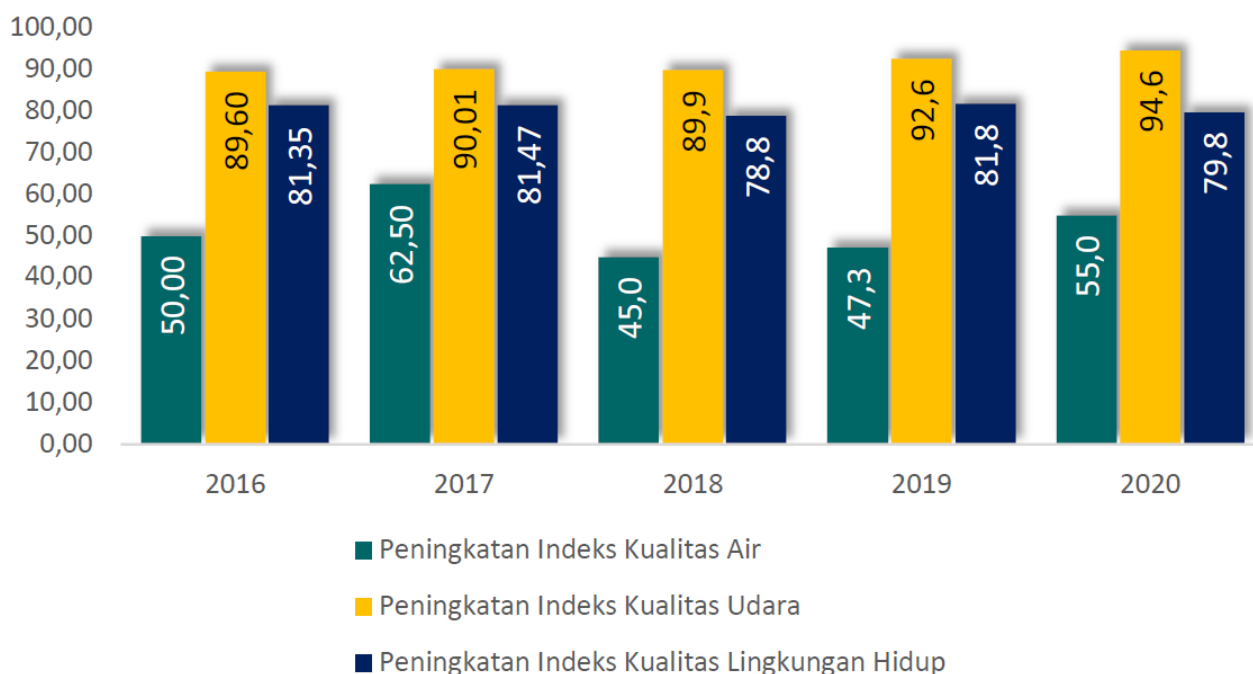
Tahun	Jual-beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7.057
2017	5.211	451	197	3	25	5.887

E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai

dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam gambar di bawah ini diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 81,36 menjadi 79,80 di tahun 2020. Adapun Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki trend yang cenderung meningkat yaitu dari 89,60 poin menjadi 94,6 poin di tahun 2020. Selanjutnya kontribusi IKA yaitu 50 poin di tahun 2016 dan meningkat menjadi 79,8 poin di tahun 2020.

Gambar II.23 Indeks Kualitas Air, Udara dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (data diolah, 2021)

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil

Persentase Penduduk usia 0-17 Tahun yang memiliki akte kelahiran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua tahun 2020 rata-rata sudah diatas 50%. Namun terdapat satu Kabupaten dengan persentase dibawah 50% yaitu Kabupaten Mamberamo Raya.

Tabel II.56 Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020

No	Kabupaten	Persentase (%)
1	Jayapura	75.94
2	Kepulauan Yapen	60.91
3	Biak Numfor	58.93
4	Sarmi	73.28
5	Keerom	76.88
6	Waropen	78.87
7	Supiori	68.54
8	Mamberamo Raya	11.16
9	Kota Jayapura	90.49

Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Selain kepemilikan terhadap akta kelahiran, persentase penduduk berbasis NIK di salah satu Kabupaten terlihat masih rendah di Papua. Sampai dengan tahun 2020, tercatat persentase penduduk yang memiliki KTP rata-rata sudah diatas 80%. Sampai dengan tahun 2020 juga tercatat salah satu daerah dengan kepemilikan KTP terbilang rendah yaitu kurang dari 50% adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

Tabel II.57 Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020

No	Kabupaten	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.98	86.68	86.84
2	Kepulauan Yapen	84.86	83.41	84.16
3	Biak Numfor	89.47	88.69	89.09
4	Sarmi	88.47	88.75	88.59
5	Keerom	82.25	84.46	83.24
6	Waropen	87.94	87.69	87.82
7	Supiori	99.42	98.84	99.15
8	Mamberamo Raya	39.72	41.12	40.36
9	Kota Jayapura	94.95	95.6	95.24

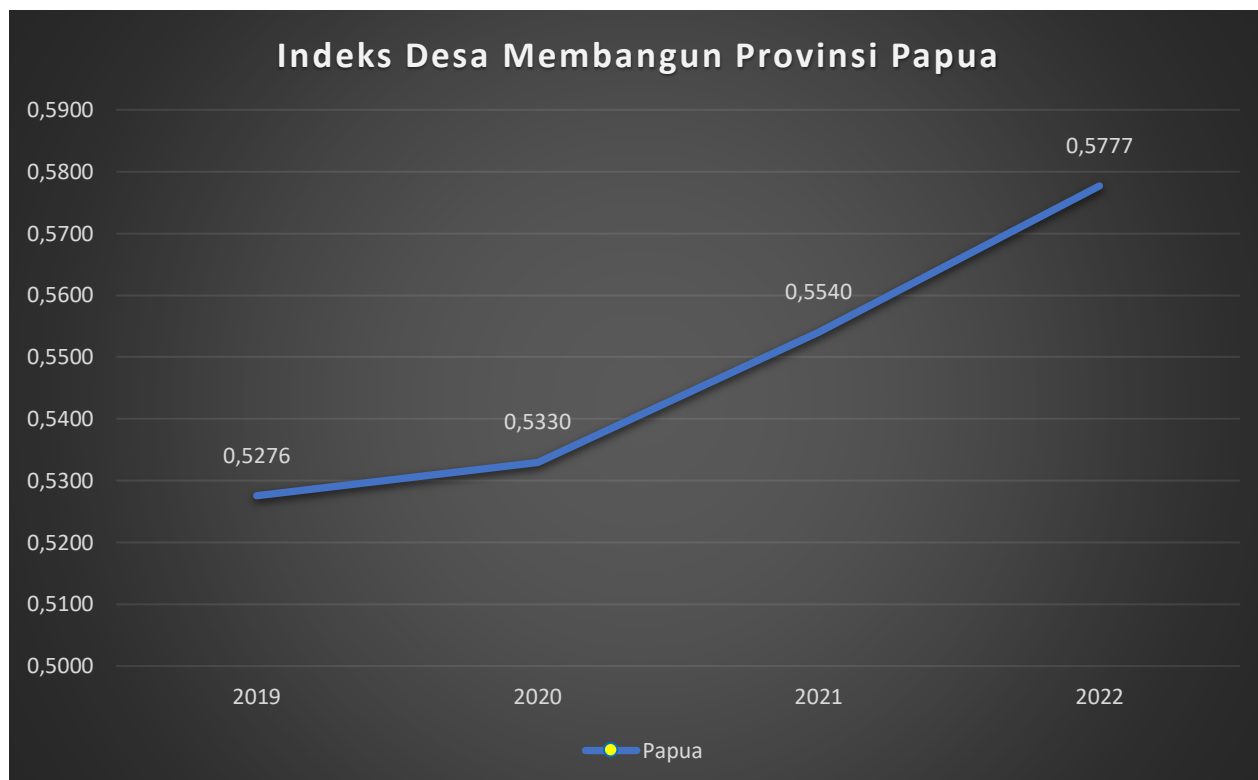
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Hal itu tecermin dari rata-rata indeks desa membangun (IDM) di Papua nilainya paling rendah di antara provinsi yang lain, yakni 0,5777.

Angka tersebut meningkat sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata IDM sebesar 0,5540. Hingga 2022, sebanyak 3.604 atau 66,6% desa di Papua berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 5.411 desa yang ada di wilayah tersebut. Sisanya sebanyak 1.464 atau 27,05% merupakan desa tertinggal, 316 desa atau 5,8% berstatus berkembang, 26 desa atau 0,48% berstatus maju, dan hanya 1 desa berstatus sebagai desa mandiri

Gambar II.24 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, (data diolah)

Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

Tabel II.58 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)

Tahun	Uraian	Dana Desa	Total TKDD	% DD Terhadap TKDD
2020	Anggaran	964.17	7817.78	12.33
	Realisasi	964.14	7765.70	12.42
	Realisasi Capaian	100.00	99.33	100.67
2021	Anggaran	985.10	7807.25	12.62
	Realisasi	983.54	7735.30	12.71
	Realisasi Capaian	99.84	99.08	100.77
2022	Anggaran	802.71	9218.91	8.71
	Realisasi	802.12	9576.53	8.38
	Realisasi Capaian	99.93	103.88	96.19

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)

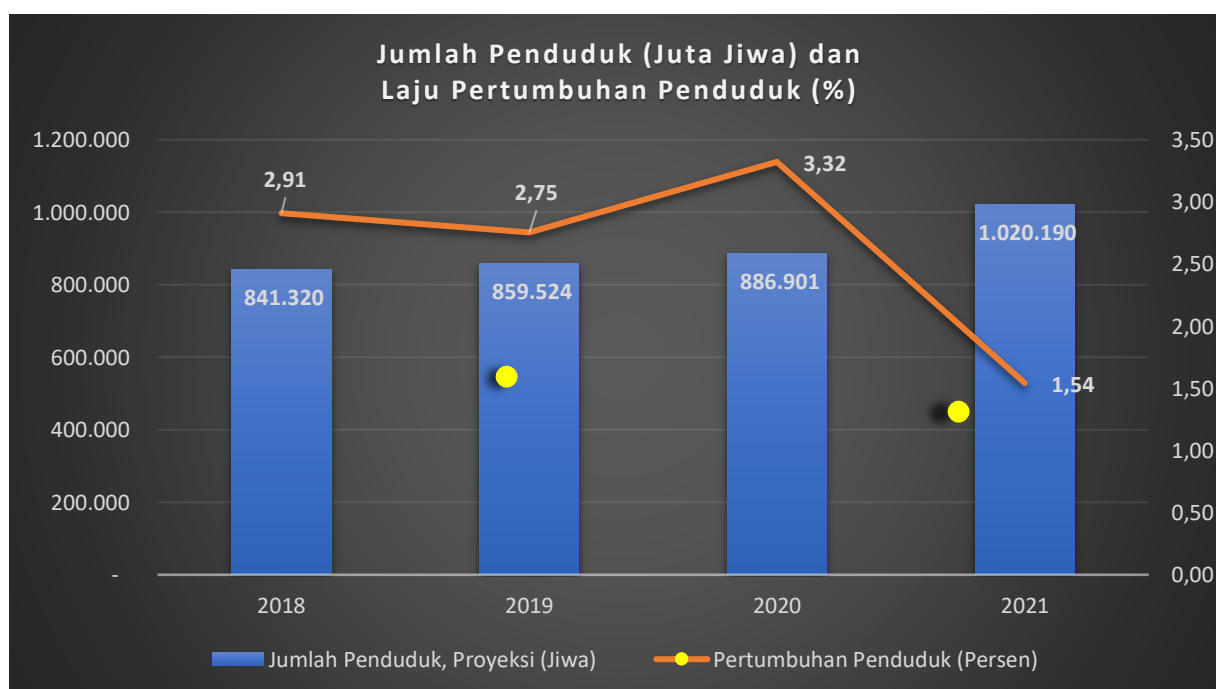
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

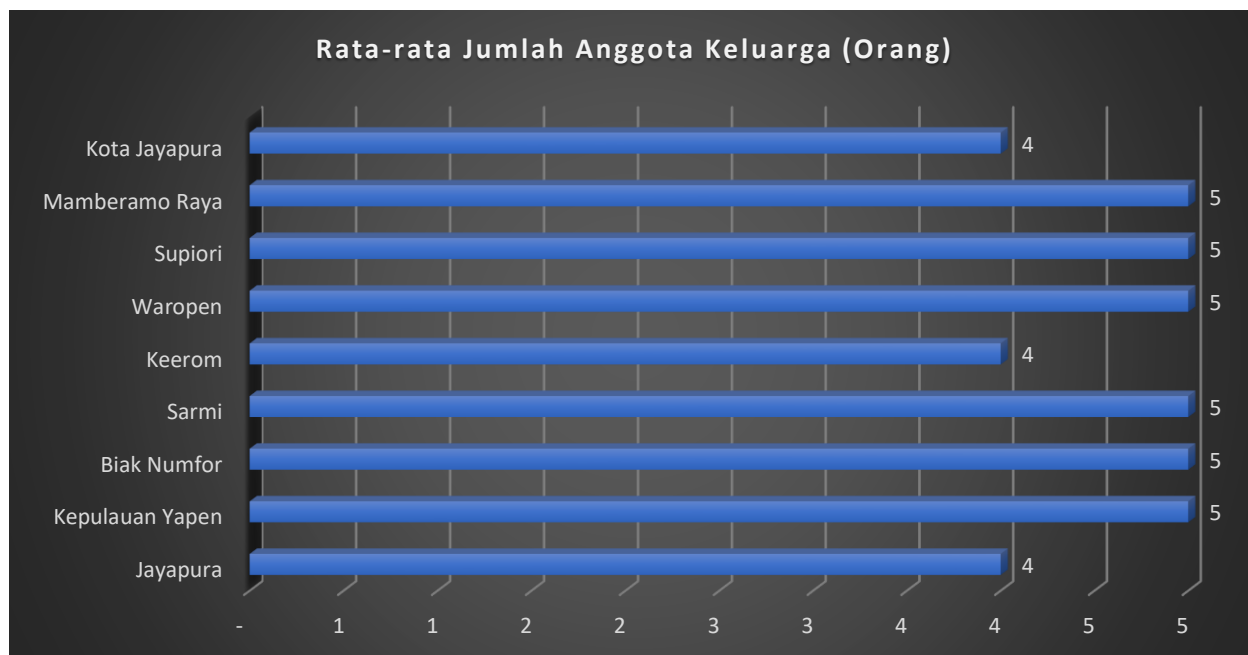
Gambar II.25 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua

Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

Gambar II.26 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua

2) Keluarga Berencana

Tabel II.59 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	22,729	24,189	13,814	1,143	1,865
2	Kepulauan Yapen	5,113	7,474	478	5,209	6,426
3	Biak Numfor	13,378	15,189	18,031	1,653	7,568
4	Sarmi	514	1,354	19,093	19,093	7,901
5	Keerom	2,863	4,588	6,824	8,225	8,984
6	Waropen	865	2,340	5,602	5,977	7,179
7	Supiori	463	651	876	889	76
8	Mamberamo Raya	961	171	299	907	907
9	Kota Jayapura	60,326	33,394	48,066	46,727	50,876
Papua		107,212	89,350	113,083	89,823	91,782

Sumber: BPS Provinsi Papua

I. Urusan Perhubungan

1) Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 rata-rata perbandingan Panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan bermotor. Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- Entrop di Kota Jayapura;
- Wamenadi Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Gambar II.27 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)

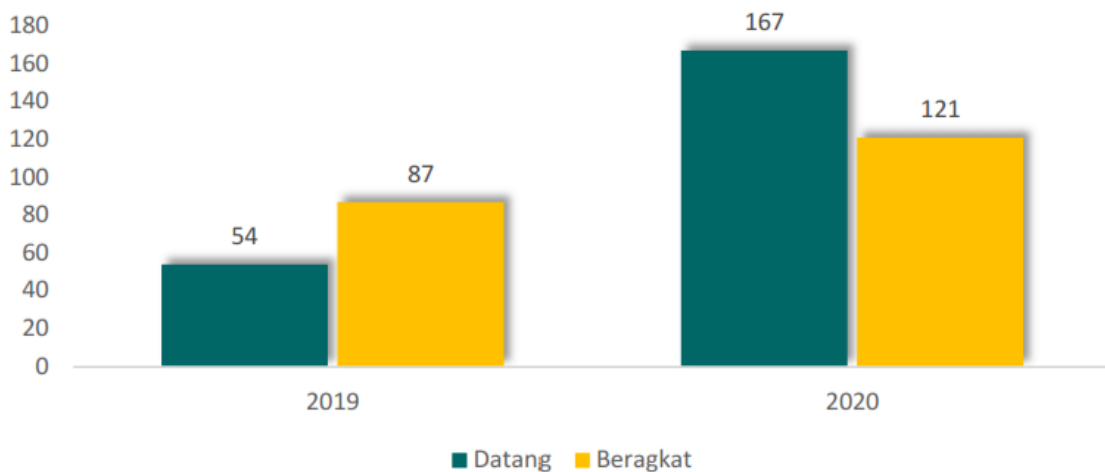


Sumber: BPS Provinsi Papua

2) Transportasi Udara

Jumlah penumpang internasional berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua mengalami lonjakan dari tahun 2019 sebanyak 54 penumpang meningkat di tahun 2020 menjadi 167 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 87 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 121 penumpang yang berangkat.

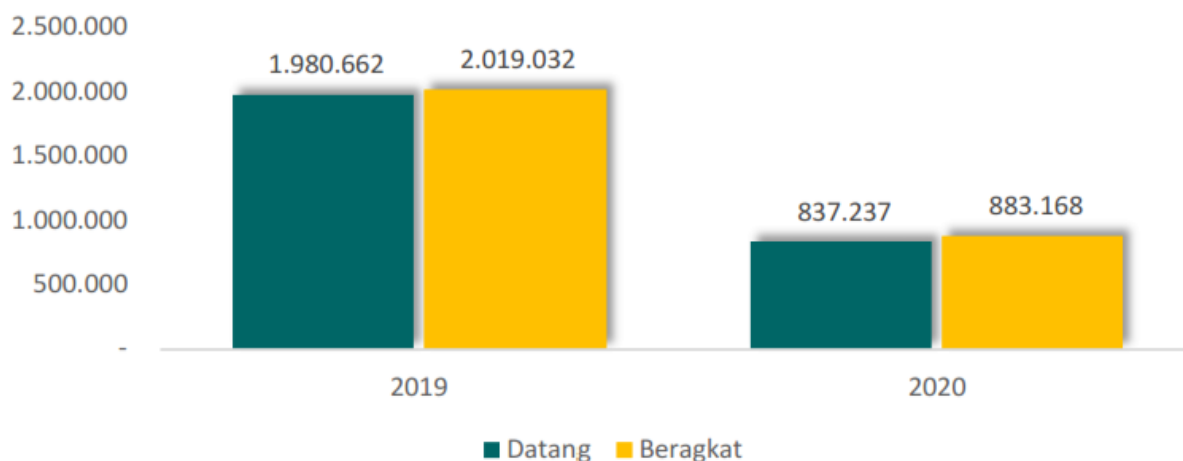
Gambar II.28 Jumlah Penumpang Internasional Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang)



Sumber: BPS RI, 2022

Berbeda dengan jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.980,66 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 837,23 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 2.019,03 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 883,16 penumpang yang berangkat.

Gambar II.31 Jumlah Penumpang Domestik Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang)

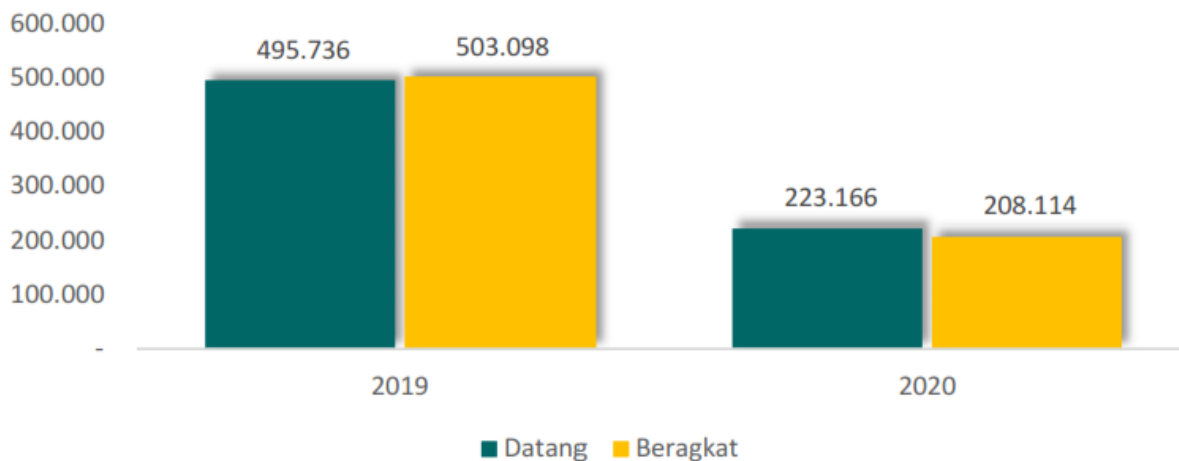


Sumber: BPS RI, 2022

3) Transportasi Laut

Jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi kapal di Provinsi Papua mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 495,73 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 223,16 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 503,09 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 208,114 penumpang yang berangkat menggunakan kapal laut.

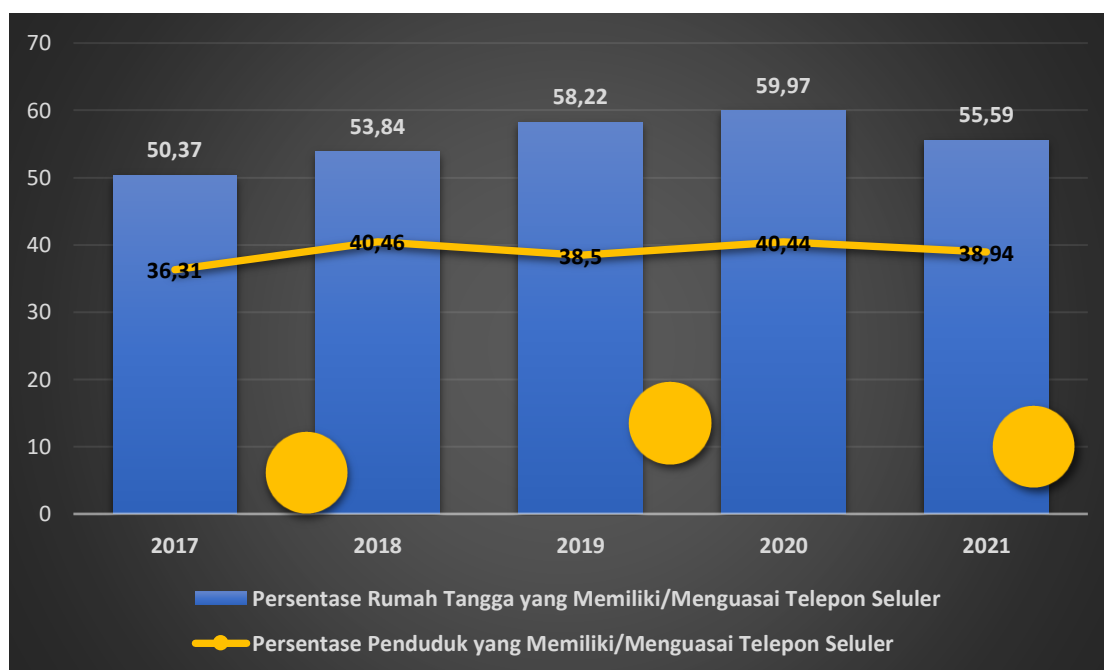
Gambar II.32 Jumlah Penumpang Domestik Berdasarkan Moda Transportasi Kapal (orang)



Sumber: BPS RI, 2022

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Gambar II.33 Persentase Penduduk dan Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler

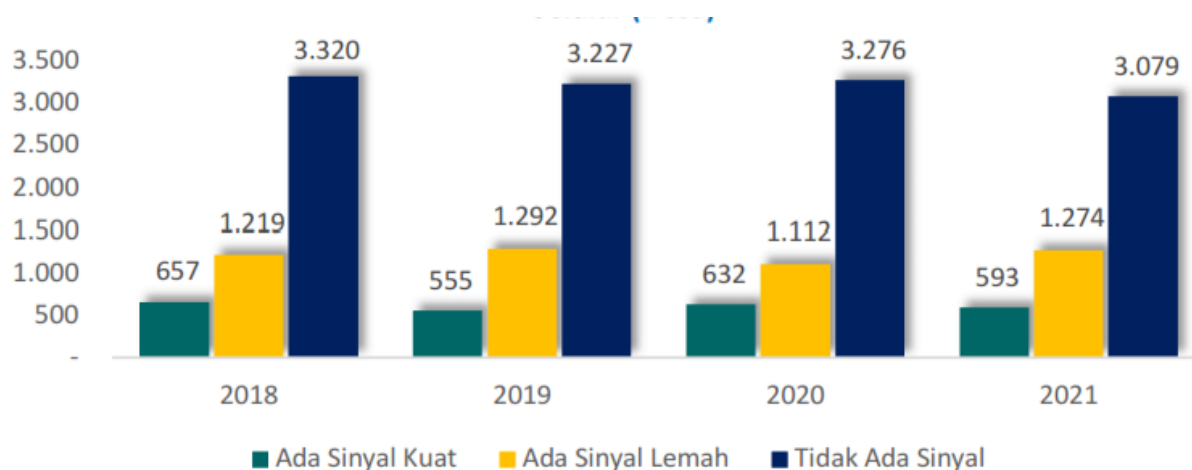


Sumber : BPS RI, 2022

Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota

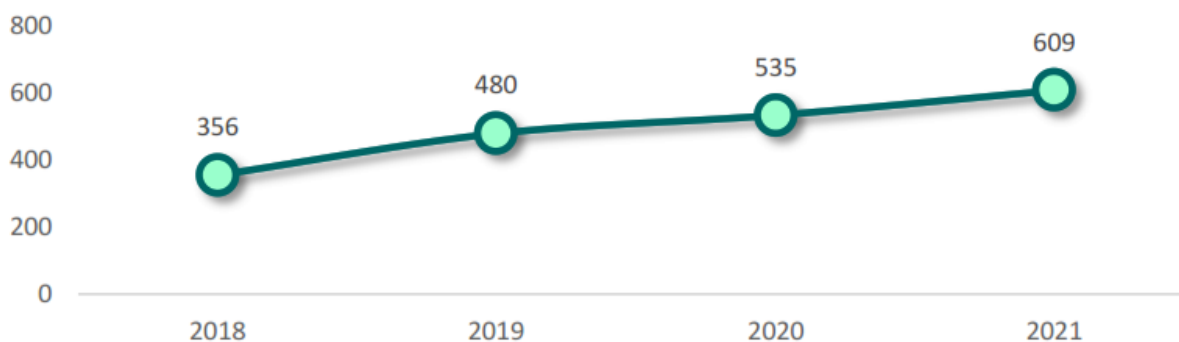
Persentase rumahtangga yang memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 50,37% meningkat ditahun 2021 menjadi 55,59%.

Gambar II.34 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler (Desa)



Sumber : BPS RI, 2022

Gambar II.35 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS (Desa)



Sumber : BPS RI, 2022

banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara Base Transceiver Station (BTS) di desa mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 sebanyak 356 desa yang memiliki BTS mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 609 desa yang memiliki BTS.

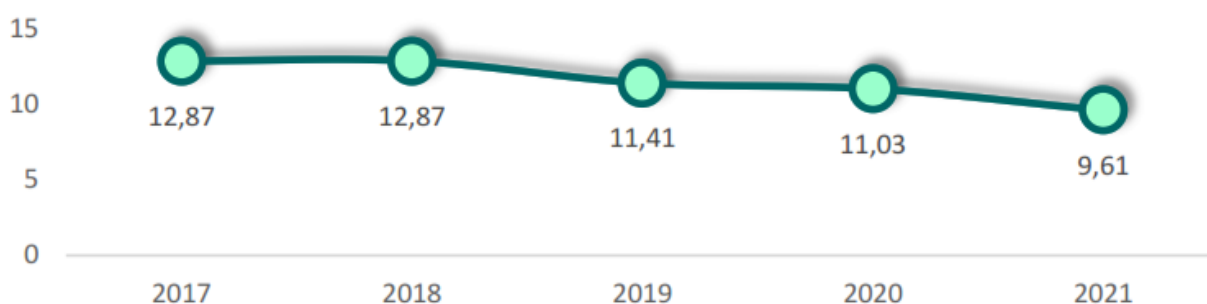
Gambar II.36 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah (Desa)



Sumber : BPS RI, 2022

Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 270 desa meningkat menjadi 363 desa di tahun 2021.

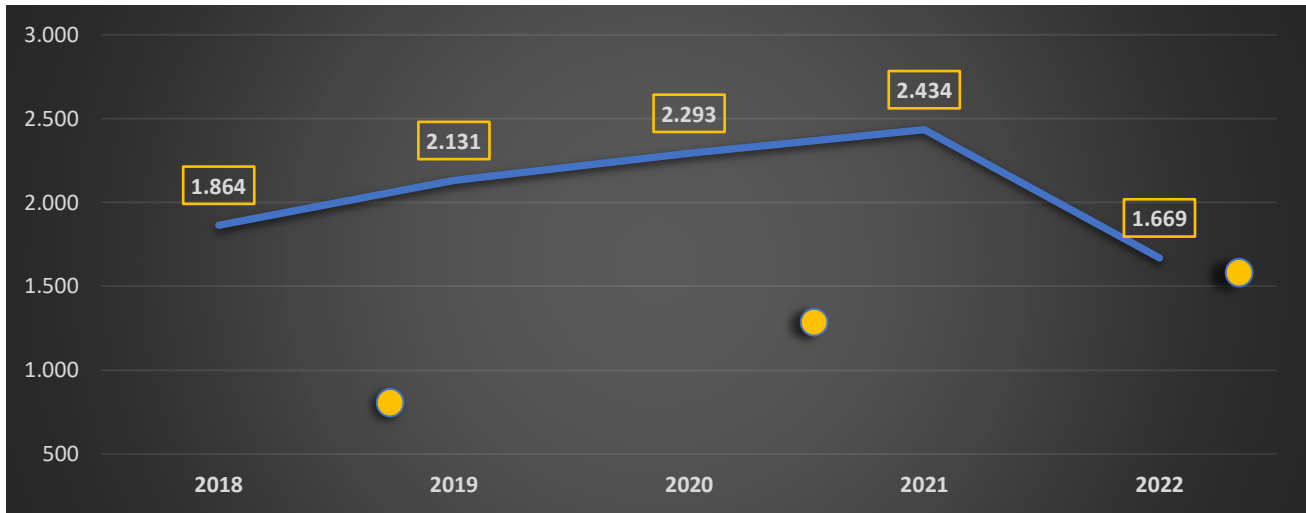
Gambar II.37 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki/Menguasai Komputer



Sumber : BPS RI, 2022

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambar II.38 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 (Unit)



Sumber: BPS RI, 2018-2021 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, 2022

Tabel II.60 Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Persentase Koperasi Aktif 2022

No.	Kabupaten/Kota	Koperasi			
		Aktif	Tidak Aktif	Total	%
1	Jayapura	91	129	220	41.36
2	Kepulauan Yapen	40	106	146	27.40
3	Biak Numfor	74	188	262	28.24
4	Sarmi	33	4	37	89.19
5	Keerom	55	80	135	40.74
6	Waropen	18	12	30	60.00
7	Supiori	37	4	41	90.24
8	Mamberamo Raya	18	5	23	78.26
9	Kota Jayapura	90	146	236	38.14
Provinsi Papua		456	674	1130	40.35

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, (Data Diolah 2023)

L. Urusan Penanaman Modal

Sepanjang tahun 2017-2021 jumlah investor PMA di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah investor PMA adalah sebanyak 95 proyek. Selain itu,

realisasi investasi PMA dinilai sangat tinggi. Realisasi investasi PMA adalah sebesar 1,49 miliar US\$.

Tabel II.61 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017-2021 (Unit)(Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	135	102	127	184	95	1.924	1.132	941	568	1.489
Indonesia	26.257	21.972	30.354	56.726	27.271	32.240	29.308	28.209	28.666	31.093

Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya realisasi penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana sampai denan tahun 2021 sebanyak 1.218 unit proyek dengan nilai investasi mencapai 911 miliar rupiah.

Tabel II.62 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (juta Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	33	23	68	323	473	1.218	105	568	2.722,2	911
Indonesia	8.838	10.815	30.451	96.623	106.002	262.351	328.605	386.498	413.536	447.064

Sumber: BPS RI, 2022

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olahraga sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata bertumbuh sebesar 3,41% per tahunnya. Sampai dengan tahun tahun 2019 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 130 klub dengan berbagai macam cabang. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 223 orang tenaga keolahragaan dan

terus meningkat sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 365 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

Tabel 2.63 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	31	36	42	45	45
Jumlah atlet berprestasi	115	495	401	500	650
Jumlah club olahraga	114	125	129	130	130
Jumlah tenaga keolahragaan	223	253	275	365	365

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

2) Organisasi Kepemudaan

Dari 4 (empat) indikator di atas 3 (tiga) indikator pemberdayaan pemuda mengalami peningkatan yang positif diantaranya adalah Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina dan Jumlah Organisasi Pemuda. Sedangkan pelatihat kewirausahaan terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 52 organisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2019 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina.

Tabel 2.64 Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2016-2019 (unit)

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	47	47	52	52
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	30	33	33	33
Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	30	115	35	35

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3) Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga yang terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olahraga 34 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 190 unit.

Tabel 2.65 Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2016-2019 (Unit)

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	186	186	186	186
Jumlah Gedung olahraga	15	15	16	34
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	176	177	190

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

N. Urusan Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG. PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan

kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua.

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan e-Government yang dapat diakses melalui website : https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel.

O. Urusan Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan

tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

Tabel 2.66 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

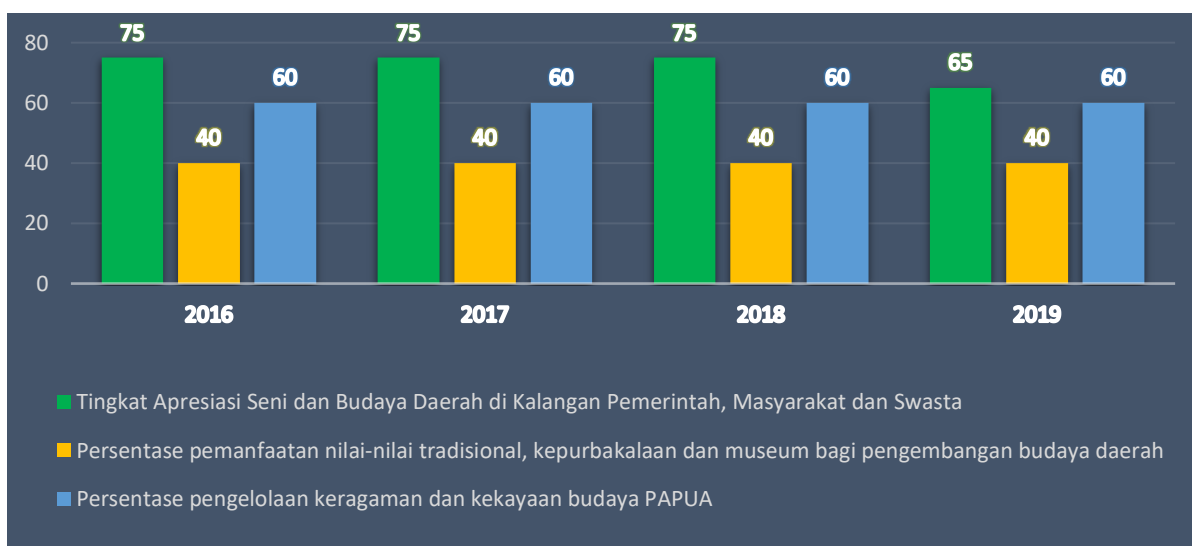
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018'

Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak

menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Gambar II.39 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber :

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

P. Urusan Perpustakaan

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang

seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

Gambar II.40 Kondisi Perpustakaan Provinsi Papua

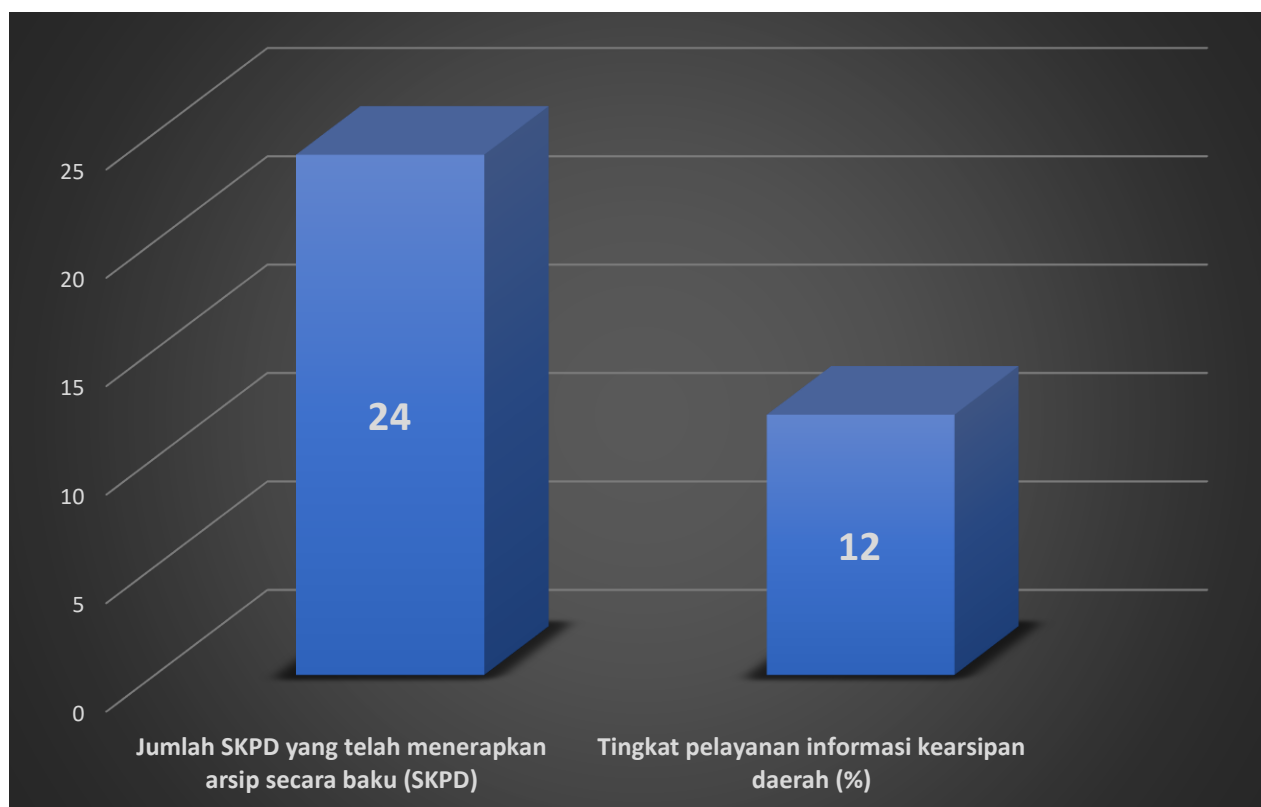


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Q. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar II.41 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

II.2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut, sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.

Tabel II.67 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten	Perikanan tangkap di laut		Perikanan perairan umum daratan	
	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)
1 Jayapura	19.015	690.399.360	741	6.704.392
2 Yapen	6.165	193.500.017	-	-
3 Biak Numfor	41.124	1.474.923.137	-	-
4 Sarmi	16.396	489.494.238	-	-
5 Keerom	-	-	-	-
6 Waropen	831	21.100.857	511	4.602.888
7 Supriori	1.889	54.290.770	-	-
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	41.255	1.496.675.020	-	-
Provinsi Papua	126.675	4.420.383.399	1.252	11.307.280

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

B. Urusan Pariwisata

Provinsi Papua memiliki jumlah akomodasi sebanyak 28 unit, 2148 kamar dan 3019 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Jayapura, kepulauan Yapen, Biak Numfor dan kota Jayapura pada tahun 2021. Kota Jayapura merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata.

Tabel II.68 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua

No	Kabupaten	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	Jayapura	4	293	463	5	231	611	5	428	695
2	Kepulauan Yapen	1	31	50	1	26	51	1	30	51
3	Biak Numfor	2	78	106	2	57	106	2	78	111
4	Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Keerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Supiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mamberamo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kota Jayapura	15	1170	1886	15	1093	1756	20	1612	2162
PROVINSI PAPUA		22	1572	2505	23	1407	2524	28	2148	3019

Sumber: BPS Provinsi Papua

C. Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua mencapai 6.340,06 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 2.601,42 Ton Tahun 2021. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupten Jayapura. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.69 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
1 Jayapura	3193.21	813.87	591	1044
2 Yapen	-	-	167	162
3 Biak Numfor	-	-	764	-

Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
4 Sarmi	78.94	44.84	209	37
5 Keerom	135.92	77.21	517	290
6 Waropen	56.49	32.08	64	38
7 Supriori	-	-	12	-
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	2875.5	1633.42	321	5
Provinsi Papua	6340.06	2601.42	2645	1576

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data Papua dalam angka tahun 2023, daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh. Listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/ hilang sebesar 70.309.468 KWh.

Tabel II.70 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten	Daya terpasang KW	Produksi listrik KWh	Listrik terjual KWh	Dipakai sendiri KWh	Susut hilang KWh
1 Jayapura	32.876	114.740.369	104.309.426	-	10.430.943
2 Yapen	1.400	34.819.284	28.826.054	2.015	5.991.215
3 Biak Numfor	49.892	79.862.556	71.349.975	995.682	7.516.899
4 Sarmi	4.890	12.730.661	11.366.662	-	1.363.999
5 Keerom	306	24.068.325	22.121.622	-	1.946.703
6 Waropen	1.172	8.206.725	7.147.972	-	1.058.753
7 Supriori	-	10.068.731	8.832.220	-	1.236.511
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	181.099	409.188.130	360.518.176	7.905.509	40.764.445
Provinsi Papua	271.635	693.684.781	614.472.107	8.903.206	70.309.468

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

E. Urusan Perdagangan

Perihal perdagangan di Provinsi Papua, penjelasan disampaikan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai eksport masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021.

F. Urusan Perindustrian

Pada tahun 2020, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Papua sebanyak 40 perusahaan. Jumlah industri mikro dan kecil pada tahun 2020 di Provinsi Papua sebanyak 15.481 perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan industri besar dan sedang pada tahun 2020 yang terbanyak adalah pada kelompok Industri Makanan (10) dan kelompok Industri Minuman (11) yaitu masing-masing sebanyak 11 perusahaan. Pada tahun 2020, Industri Besar dan Sedang di Provinsi Papua menyerap tenaga kerja sebanyak 6.676 orang. Sedangkan Industri Kecil dan Mikro pada tahun 2020 di Provinsi Papua mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 27.333 orang.

II.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Urusan Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

Sementara itu, RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD IV atas RPJPD Provinsi Papua. dan Selanjutnya, sesuai Inmendagri nomor 52 Tahun 2023 yang mengharuskan setiap daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir di tahun 2023, wajib menyusun dokumen transisi. Dokumen transisi tersebut yaitu RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024-2026 merupakan dokumen sebagai pedoman selama kepala daerah masih dijabat oleh Pejabat Gubernur.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Papua selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan. Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Papua, RPJMD Provinsi Papua, RTRW Provinsi Papua, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

B. Urusan Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor ...Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, updating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Provinsi Papua agar dapat tetap mempertahankan Opini WTP pada tahun berikutnya

C. Urusan Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II, serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Provinsi Papua mengalami penambahan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 97.895 orang PNS instansi daerah dan 13.544 PNS instansi Pusat, dari tahun 2020 sebanyak 93.164 Orang PNS instansi daerah dan PNS instansi pusat sebanyak 13.693 sedangkan tahun 2022 PNS instansi daerah sebanyak 97.585 orang dan 14.465 orang PNS instansi pusat. Penambahan ini antara lain adalah karena adanya penerimaan ASN baru pada tahun 2022, walaupun juga ada pengurangan dari ASN yang purna tugas dan meninggal dunia, namun secara keseluruhan terdapat penambahan sebanyak 14.465 orang. Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.75 berikut.

Tabel II.71 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	PNS Instansi Daerah		Jumlah	PNS Instansi Pusat		Jumlah
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	2020	53.782	39.382	93.164	8.927	4.766	13.693
2	2021	56.098	41.797	97.895	8.820	4.724	13.544
3	2022	55.781	41.804	97.585	9.450	5.015	14.465

Sumber : BKN Pusat, 2022

D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel II.72 Riset Unggulan Daerah/Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Judul	Lembaga/Instansi/Pelaksana
1	2021	Evaluasi pemanfaatan Hutan Rakyat dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pelestariannya di Provinsi Papua	Bappeda
2	2021	Evaluasi terhadap kualitas Kinerja Pelayanan Publik pada masa Pandemi Covid-19	Bappeda
3	2022	Kajian Kebijakan Penanganan Stunting di Provinsi Papua	Bappeda
4	2022	Kajian Kebijakan Pengembangan Wisata di Provinsi Papua	Bappeda
5	2023	Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit Menular, Malaria (dan dampak penghentian KPS terhadap Penduduk Orang Asli Papua)	Bappeda

Sumber : Litbang Bappeda Provinsi Papua, 2022

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan kebutuhan

Tabel II.73 Riset Bersama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Judul	Lembaga/Instansi/Pelaksana
1	2021	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	Bappeda Provinsi Papua
2	2021	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda Provinsi Papua
3	2022	Penelitian dan Pengembangan Dampak kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Bappeda Provinsi Papua

Sumber : Litbang Bappeda Provinsi Papua, 2022

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di Provinsi Papua. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Provinsi Papua. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan di Provinsi Papua. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Provinsi Papua lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua.

E. Urusan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah adalah

- (1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Papua adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya

manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tabel II.74 Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2017-2021

Tingkat Maturitas SPIP	2018	2019	2020	2021	2022
Level	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berekembang Level 2

Sumber : Inpektorat Provinsi Papua, 2023

F. Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD/DPRD. Sekretariat DPRD/DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD/DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperdasus) diupayakan

untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2021, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak Raperda yang terdiri dari Raperda inisiatif dan Raperda usulan Gubernur Papua. Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak Perda, terdiri dariPerda inisiatif dan Perda usulan Gubernur

G. Urusan Sekretariat MRP

Sekretariat MRP adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang MRP. Sekretariat MRP membantu pencapaian kinerja MRP, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) menjadi Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Usulan Raperdasus yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perdasus. Pada tahun 2022, usulan Raperdasus yang masuk ke Propemperdasus sebanyakRaperdasus.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperdasus, tidak semua usulan Raperdasus menjadi Perdasus. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah Raperdasus yang berhasil ditetapkan menjadi Perdasus yaitu sebanyak Perdasus.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut : (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintah Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan; (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiscal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam UU Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja Keuangan masa lalu adalah selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 dan tahun 2019 hingga tahun 2023 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 3 (tiga) tahun kedepan yaitu mulai tahun 2024-2026. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (ii) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut.

III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

1. Bantuan/hibah
2. Dana darurat
3. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah 2022 menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua selama kurun waktu 2019 hingga Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar -7,72 persen. Pada tahun 2019 pendapatan Provinsi Papua tercatat sebesar Rp 15,10 Triliun, sehubungan dampak pandemi Covid-19 pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 12,66 Triliun kembali meningkat seiring pulihnya perekonomian nasional menjadi Rp 15,82 Triliun pada tahun 2021 dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 10.764.787.934.427. Jika melihat sebagian besar komponen Pendapatan Provinsi Papua menunjukkan nilai pertumbuhan yang negatif. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan	15.104.934.356.670	12.662.509.557.913,50	15.826.765.456.928,80	10.764.787.934.427	-7,72
1.1	Pedapatan Asli Daerah	1.903.014.146.178,85	1.255.685.466.969,77	2.103.322.309.869,82	2.152.707.624.061	11,94
1.1.1	Pajak Daerah	1.469.202.829.921	986.672.016.100	1.627.364.000.469	1.069.726.272.973	-0,72
1.1.2	Retribusi Daerah	27.038.220.738,61	1.953.733.848,33	18.406.439.197,78	7.410.091.220	230
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.739.418.877	31.983.026.838	40.489.377.934	766.767.946.987	-14,708
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	382.033.676.642,24	217.493.110.183,44	417.062.492.269,04	308.803.312.881	-17,10
1.2	Dana Perimbangan	4.522.405.712.374	3.402.100.028.906	3.807.733.369.924	0	-6,42
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.243.299.539	694.866.304.495	1.009.724.770.219	0	21,78
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.616.545.381.000	2.330.020.003.000	2.314.320.067	0	5,8
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.198.617.031.835	377.213.721.411	483.088.532.705	0	-20,23
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	0	0	0	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.679.514.498.118	8.004.724.062.037,72	9.915.709.777.135	0	8,05
1.3.1	Hibah	612.000.000	1.567.116.824	6.786.105.833	0	244,55
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaan	0	0	0	0	0
1.3.5	Dana Otonomi Khusus	5.850.230.158.000	5.288.694.844.000	6.611.349.330.000	0	7,71
1.3.6	Dana Tambahan Infrastruktur	2.824.446.537.000	2.711.275.076.000	3.278.447.679.000	0,00	8,46
1.3.7	Sumbahangan Pihak Ketiga	4.225.803.118	3.187.025.213,72	3.442.244.302	0,00	-8,29
1.3.8	Dana Insentif Daerah	0	0	15.684.418.000	0,00	0,00
2	Belanja	15.447.447.791.782,00	15.147.965.315.411,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.714.540.387.363,00	9.671.621.623.225,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	2.592.327.810.676,00	2.745.631.145.498,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.666.884.724.722,00	3.793.818.759.807,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	172.479.648.483,00	61.109.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	864.941.143.882,00	528.416.508.008,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	2.392.907.059.600,00	2.517.646.209.912,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	7.732.907.404.419,00	5.476.343.692.186,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	318.547.927.725,00	279.932.952.308,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.165.655.388,00	4.051.069.719.180,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	2.614.193.821.306,00	1.145.341.020.698,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembiayaan	302.151.249.232,00	594.990.678.582,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	352.151.249.232,00	594.990.678.582,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan	0,00	0,00	14.763.746.028.757,00	10.764.787.934.427	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	1.903.014.146.178,85	2.152.707.624.061	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	0,00	0,00	1.398.183.395.930	1.069.726.272.973	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	27.714.487.808	7.410.091.220	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	25.304.838.272	766.767.946.987	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	314.448.887.747	308.803.312.881	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	12.996.594.419.000	8.612.080.310.366	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	12.996.594.419.000	8.612.080.310.366	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	1.500.000.000	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	1.500.000.000	0,00	0,00
5	Belanja	0,00	0,00	15.758.964.362.330	15.147.965.315.411	0,00

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	11.478.415.041.575	9.729.837.877.802	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	4.262.598.475.082	3.063.415.619.287	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	4.171.551.173.244	4.887.557.345.186	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	2.943.998.856.688	1.725.059.365.734	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	100.266.536.561	53.805.547.595	0,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	1.244.687.958.046	2.192.435.355.168	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	26.157.500.000	26.100.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	212.294.843.060	252.867.650.551	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	825.825.134.362	1.122.081.473.128	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	162.897.169.367	786.882.181.489	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	3.275.752.500	4.504.050.000	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	14.237.558.757	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	150.000.000.000	328.275.344.112	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	150.000.000.000	328.275.344.112	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	2.885.861.362.709	659.960.672.645	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	767.987.401.259	659.960.672.645	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	2.117.873.961.450	0,00	0,00
6	Pembiayaan	0,00	0,00	995.218.333.573	995.218.333.573	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	1.115.218.333.573	2.165.721.315.300	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	1.115.218.333.573	1.865.721.315.300	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	300.000.000.000	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	120.000.000.000	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	120.000.000.000	20.000.000.000,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diasumsikan pendapatan daerah Provinsi Papua meningkat sebesar 4,41% selama dua tahun atau sebesar 2,205% per tahun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan ini akan digunakan menjadi dasar perhitungan proyeksi pendapatan Provinsi Papua hingga tahun 2026.

III.1.2 Neraca Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Komponen Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuiatas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khususnya Neraca yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengetahui Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Rata – rata pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	-
1.1.	ASET IANCAR	-
1.1.1.	Kas	25%
1.1.2.	Piutang	25%
1.1.3	Persediaan	25%
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1	Tanah	25%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	25%
1.2.3.	Gedung dan bangunan	13%
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	23%
1.2.5	Aset tetap lainnya	25%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	48%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	27%

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.	ASET LAINNYA	27%
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	25%
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-
1.3.4.	Aset tak berwujud	25%
1.3.5.	Aset Lain-lain	25%
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	-
3.1.2.	Cadangan piutang	
3.1.3.	Cadangan persediaan	-
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	-
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-
	JUMIAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-

III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan.

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 3 (tiga) tahun kedepan yaitu mulai tahun 2024-2026.

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Banten pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur provinsi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel III.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2022	3.063.415.619.287	15.167.965.315.411	28,10
2	Tahun Anggaran 2021	4.262.598.475.082	15.878.964.362.330	19,29
3	Tahun Anggaran 2020	3.025.564.097.806	15.197.965.315.411	19,91
4	Tahun Anggaran 2019	2.910.875.738.401	15.497.447.791.782	18,78

III.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel III.4 Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	15.104.934.356.670	12.662.509.557.913	15.826.765.456.928	10.764.787.934.427
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja daerah	15.447.447.791.782	15.147.965.315.411	15.758.964.362.330	15.147.965.315.411
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	302.151.249.232	594.990.678.582	995.218.333.573	995.218.333.573
	Defisit riil	644.664.684.344	3.080.446.436.079	927.417.238.974	5.378.395.714.557

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi APBD Provinsi Papua selalu mengalami defisit dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan semakin besarnya SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan pada tahun – tahun

berikutnya. Pada tahun 2022 mengamai defisit anggaran terbesar jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Tabel III.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua

No	Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	-	1.115.218.333.573	1.865.721.315.300
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	300.000.000.000
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2021 dan 2022 terdapat penggunaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat selisih pendapatan dan pengeluaran yang besar di dua tahun tersebut.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No	Uraian	2019		2020		2021		2022	
		Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	-	-	-	-	1.115.218.333.573	100	1.865.721.315.300	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019		2020		2021		2022	
		Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA	Rp	(%) dari SiLPA
	lainnya								
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-

III.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2022, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2024 hingga tahun 2026 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan proyeksi belanja Provinsi Papua menggunakan dasar belanja Provinsi Papua tahun 2023 yang dihitung mengikuti pendapatan Provinsi Papua sebesar -7,72%. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi belanja Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7 Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

Nomor	Uraian	Proyeksi Pendapatan (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
	Proyeksi Peningkatan Pendapatan		1%	1%	1%
1	Pendapatan	2.926.498.854.800	3.145.198.206.876	3.208.102.171.014	3.272.264.214.434
1.1	Pendapatan Asli Daerah	587.427.517.800	599.175.966.156	611.159.485.479	623.382.675.189
1.1.1	Pajak Daerah	366.773.261.800	374.108.727.036	381.590.901.577	389.222.719.608
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000	14.800.200.000	15.096.204.000	15.398.128.080
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000	42.349.138.260	43.196.121.025	44.060.043.446
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000	167.917.900.860	171.276.258.877	174.701.784.055
1.2	Dana Perimbangan	2.339.071.337.000	2.546.022.240.720	2.596.942.685.534	2.648.881.539.245
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	243.175.790.000	408.208.782.780	416.372.958.436	424.700.417.604
1.2.1.1	Pajak	71.488.076.000	72.917.837.520	74.376.194.270	75.863.718.156
1.2.1.1.1	PPH	43.195.451.000	44.059.360.020	44.940.547.220	45.839.358.165
1.2.1.1.2	PBB	28.292.625.000	28.858.477.500	29.435.647.050	30.024.359.991
1.2.1.2	Sumber Daya Alam	171.687.714.000	175.121.468.280	178.623.897.646	182.196.375.599
1.2.1.2.1	Kehutanan (IUPH + PSDH)	14.658.815.000	14.951.991.300	15.251.031.126	15.556.051.749
1.2.1.2.1.2	DR (Reboisasi)	3.572.241.000	3.643.685.820	3.716.559.536	3.790.890.727
1.2.1.2.2	Minerba	11.086.574.000	11.308.305.480	11.534.471.590	11.765.161.021
1.2.2	Dana Alokasi Umum	157.028.899.000	160.169.476.980	163.372.866.520	166.640.323.850
1.2.2.1	Tidak Ditentukan Penggunaannya	824.236.308.000	840.721.034.160	857.535.454.843	874.686.163.940

Nomor	Uraian	Proyeksi Pendapatan (Rp)			
		2023	2024	2025	2026
	Proyeksi Peningkatan Pendapatan		1%	1%	1%
1.2.2.2	Ditentukan Penggunaannya	673.096.641.000	686.558.573.820	700.289.745.296	714.295.540.202
1.2.2.2.1	Penggajian Formasi PPPK	151.139.667.000	154.162.460.340	157.245.709.547	160.390.623.738
1.2.2.2.2	Bidang Pendidikan	5.438.497.000	5.547.266.940	5.658.212.279	5.771.376.524
1.2.2.2.3	Bidang Kesehatan	35.570.177.000	36.281.580.540	37.007.212.151	37.747.356.394
1.2.2.2.4	Bidang Pekerjaan	51.648.208.000	52.681.172.160	53.734.795.603	54.809.491.515
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.482.785.000	59.652.440.700	60.845.489.514	62.062.399.304
1.2.4	Dana Otonomi Khusus	220.460.581.000	224.869.792.620	229.367.188.472	233.954.532.242
1.2.4.1	Penerimaan Umum	470.837.581.000	480.254.332.620	489.859.419.272	499.656.607.658
1.2.4.2	Penerimaan Berbasis Kinerja	209.261.147.000	213.446.369.940	217.715.297.339	222.069.603.286
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	261.576.434.000	266.807.962.680	272.144.121.934	277.587.004.372
1.3.1	Hibah	580.361.077.000	591.968.298.540	603.807.664.511	615.883.817.801
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian	0	0	0	0
1.3.5	Dana Tambahan Infrastruktur	0	0	0	0
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	580.361.077.000	591.968.298.540	603.807.664.511	615.883.817.801
1.3.7	Dana Intensif Daerah	0	0	0	0
		0	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Papua, 2023

Perhitungan proyeksi belanja Provinsi Papua menggunakan dasar belanja Provinsi Papua tahun 2023 yang dihitung mengikuti pendapatan Provinsi Papua sebesar -7,72%. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi belanja Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026

Nomor	Uraian	2023	2024	2025	2026
			1%	1%	1%
5	Belanja	3.492.754.004.800	3.145.198.206.876	3.208.102.171.014	3.272.264.214.434
5.1	Belanja Operasi	2.415.353.019.764	2.463.660.080.159	2.512.933.281.762	2.563.191.947.398
5.1.01	Belanja Pegawai	849.073.619.230	866.055.091.615	883.376.193.447	901.043.717.316
	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183	1.484.718.844.387	1.514.413.221.274	1.544.701.485.700
	Belanja Hibah	93.750.778.950	95.625.794.529	97.538.310.420	99.489.076.628
	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401	17.260.349.629	17.605.556.622	17.957.667.754
5.2	Belanja Modal	519.816.636.316	530.212.969.042	540.817.228.423	551.633.572.992
	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000	3.570.000.000	3.641.400.000	3.714.228.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813	119.930.035.129	122.328.635.832	124.775.208.548
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452	104.531.193.701	106.621.817.575	108.754.253.927
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.575.408.051	300.466.916.212	306.476.254.536	312.605.779.627

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000	694.824.000	708.720.480	722.894.890
5.3	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000	1.020.000.000	1.040.400.000	1.061.208.000
	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000	11.060.000.000	11.281.200.000	11.506.824.000
5.4	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000	11.060.000.000	11.281.200.000	11.506.824.000
	Belanja Transfer	154.584.348.720	140.265.157.674	143.070.460.828	145.931.870.044
	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720	140.265.157.674	143.070.460.828	145.931.870.044
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800	3.145.198.206.876	3.208.102.171.014	3.272.264.214.434
	Total Surplus/(Defisit)	(566.255.150.000)	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Papua, 2023

III.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran dikelompokkan 3 (tiga) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prioritas II, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Prioritas III, Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

III.3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2022, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan

pembangunan daerah dari tahun 2024 hingga tahun 2026 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Tabel III.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	3.145.198.206.876	3.208.102.171.014	3.272.264.214.434
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-
	Pengeluaran pembiayaan daerah	-	-	-
	Total penerimaan	3.145.198.206.876	3.208.102.171.014	3.272.264.214.434
	Dikurangi:			
4	Belanja Tidak Langsung	990.001.235.773	1.009.801.260.489	1.029.997.285.698
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.155.196.971.103	2.198.300.910.525	2.242.266.928.736

Kapasitas riil kemampuan kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, pencairan dana cadangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran dikurangi belanja wajib mengikat (Belanja Tidak Langsung) dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam hal ini kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan melalui skema pendanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Tabel III.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.155.196.971.103	2.198.300.910.525	2.242.266.928.736
	Prioritas II			
	Belanja Program/kegiatan	2.155.196.971.103	2.198.300.910.525	2.242.266.928.736
	...			

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS

IV.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan penting dilakukan sebagai basis merumuskan isu strategis. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Provinsi Papua 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut.

Tabel IV.1 Permasalahan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Persentase Tingkat Kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan Provinsi Papua mencapai 17,12 persen, sebelum DOB sebesar Tahun 2021 sebesar 26,86 persen. Kondisi ini meskipun masih dibawah persentase kemiskinan nasional, namun memerlukan penanganan yang lebih intensif mengingat persentasenya masih tinggi sampai data tahun 2021.

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				<p>Hal lainnya yang harus menjadi perhatian adalah trend persentase kemiskinan di wilayah perdesaan.</p> <p>Permasalahan lainnya dalam aspek kemiskinan adalah perlunya mengurangi perbedaan kondisi kemiskinan antar daerah di Provinsi Provinsi Papua. Beberapa kabupaten dan kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi seperti Kabupaten Supiori (37,91 persen) dan Kabupaten Waropen (29,85 persen) perlu mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah Provinsi. Jumlah pendapatan penduduk di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah agar dapat mengurangi jumlah penduduk yang termasuk di bawah garis kemiskinan.</p>
		Tingginya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Tahun 2021 menurun diangka 3,33% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 4,28%.
		Prevalensi balita gizi buruk masih cukup tinggi	Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.
		Belum optimalnya pendayagunaan komoditas unggulan berbasis potensi lokal untuk penciptaan pertumbuhan	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebelum DOB tahun 2021 mencapai 15,11 persen dan kontribusi terbesar berasal dari pertambangan dan penggalan. Pasca DOB, sektor yang menjadi kontributor tersebut tidak lagi berada pada wilayah Provinsi Papua.

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		ekonomi yang berkualitas		Selain itu, beberapa sektor penting lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penunjang perekonomian daerah kontribusinya cenderung menurun setiap tahunnya. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan potensi ekonomi daerah yang hendaknya menekankan pada pengembangan komoditas unggulan yang disesuaikan dengan potensi lokal berbasis kewilayahan dan juga memperhatikan sektor-sektor pendukung lainnya yang dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
2	Aspek Pelayanan Umum	Meningkatnya angka putus sekolah	Persentase angka putus sekolah	Perkembangan siswa putus sekolah rentang 16-18 tahun dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 79 siswa yang putus sekolah dari total 106.766 siswa (0,07%). Tetapi pada tahun 2019, angka putus sekolah naik menjadi 1.213 siswa putus sekolah dari 102.353 siswa (1.19%) dan pada tahun 2020 sebanyak 26 anak putus sekolah dari 98.094 siswa (0,03%). Di tahun 2021, naik menjadi 633 siswa (0,54%) dari 118.197 siswa. Berdasarkan perkembangan diatas, jumlah siswa SMA putus sekolah rentang 16-18 tahun cukup besar di wilayah Provinsi Papua sehingga Perlu adanya koordinasi secara kontinyu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai daerah yang membutuhkan layanan pendidikan disertai dengan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang bermutu dan berkualitas. agar semua anak-anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan

IV.2 Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua

Visi dan Misi RPJPD diselaraskan dengan prioritas pembangunan pada tahap tahun berjalan, yaitu tahap IV. Visi provinsi Papua pada RPJPD yaitu "Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik." Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang

dan harmonis dengan alam. Papua yang mandiri adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat asli Papua berdasarkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai universal. Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang luas serta keberpihakan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandiriannya dalam kerangka NKRI. Visi kemandirian melingkupi kemandirian sosial, kemandirian budaya, kemandirian ekonomi, dan kemandirian politik.

Dalam menyelenggarakan rencana pembangunan, kebijakan yang dilakukan harus terarah menuju kepada visi dan misi yang dicanangkan. Untuk mencapai kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tersematkan dalam visi dan misi, serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka beberapa kebijakan yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian sosial:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Pembangunan yang merata dan adil
2. Mewujudkan kemandirian budaya:
 - a. Pembangunan kehidupan keagamaan
 - b. Pengembangan jatidiri
 - c. Peningkatan budaya berprestasi dan inovatif

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
 - a. Pembangunan perekonomian dengan menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah
 - b. Peningkatan infrastruktur wilayah
 - c. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan
 - d. Pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
 - a. Mewujudkan masyarakat yang demokratis
 - b. Mewujudkan masyarakat Papua aman dan damai yang berdasarkan hukum
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua
 - a. Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua
 - b. Percepatan peningkatan kapasitas kualitas hidup dan kemampuan masyarakat asli Papua untuk berperan pada pembangunan
 - c. Percepatan penguatan ekonomi yang selaras dengan kearifan tradisional masyarakat asli Papua
 - d. Pengembangan dan peningkatan inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal
 - e. Penguatan politik orang asli Papua

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi kedepan mengacu atau berdampak penting pada wilayah administrative Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua. Konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah di Papua menjadikan perlu dilakukannya beberapa perubahan dan penyesuaian rencana pembangunan. Provinsi Papua yang semula memiliki 29 Kabupaten/kota kini setelah adanya daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi provinsi Papua (Papua induk) hanya memiliki 9 wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut berpengaruh terhadap prioritas pembangunan yang hendaknya disikapi dengan baik dan justru semakin kecil wilayah administrasinya akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam RPJPD Tahap IV (2022 – 2025) adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam”

Pada periode pembangunan Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner, berdasarkan sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan, terpenuhinya kenyamanan dan kualitas hidup yang mampu menggerakkan setiap individu berperilaku jujur, terbuka, berbela rasa baik kepada sesama dan alam ciptaan sebagai konsep dan pola pikir hidup sosial, didukung oleh keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal, paham dan mampu terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, persentase penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbaru, ketersediaan air bersih, ketersediaan dan keamanan pranata hukum, sosial, serta kelembagaannya, yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tahap akhir dari perencanaan ini di tahun 2025 terbentuknya masyarakat Papua yang mandiri disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, keamanan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang sehingga mampu tercapainya visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV:

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua 2005-2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah
3. Peningkatan Pelayanan Umum
4. Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

dengan indikator kuantitatif pada tabel berikut.

Tabel IV.2 Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Target Akhir	Target Kinerja			
				Awal (2006)	(2025)	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat	IPM	Indeks	62,70	85,00	65,30	70,00	75,00	80,00
		Angka Melek Huruf	%	75,40	90,00	75,80	77,00	80,00	85,00
		Umur Harapan Hidup	tahun	67,60	75,00	70,29	72,02	73,79	75,00
		Penolong kelahiran dengan tenaga medis	%	48,90	75,00	55,04	62,49	69,94	75,00
		Rata-rata lama sekolah	tahun	6,50	12,00	6,70	8,00	10,00	12,00
		AKB per 1000 kelahiran hidup	jiwa	41,00	19,00	28,00	23,00	19,00	19,00
		AKI per 100,000 kelahiran hidup	jiwa	326,00	115,00	200,00	100,00	160,00	115,00
		Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+	%	36,40	70,00	41,43	50,00	60,00	70,00
		Persentase penduduk miskin (2011)	%	40,78	5,00	31,20	22,00	15,00	5,00
2	Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Non tambang	%/Thn	8,80	Rata-rata 7	Rata-rata 7	Rata-rata 7	Rata-rata 7	Rata-rata 7
		Gini Ratio	%	0,42	0,31	0,42	0,40	0,40	0,40
		Produksi Padi	Ton/ha	3,85	6,00	3,83	4,63	5,38	6,00
		Produksi Ubi Jalar	Ton/ha	10,07	12,57	10,07	11,07	11,82	12,57
		Produksi Ubi Kayu	Ton/ha	11,89	14,47	11,89	12,97	13,72	14,47
		Produksi Jagung	Ton/ha	1,75	3,92	1,75	2,42	3,17	3,92
		Perikanan	Ton	240115,00	432433,55	240,12	292136,61	355428,86	432433,55
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,80	2,50	3,90	2,50	2,50	2,50
3	Peningkatan Pelayanan Umum	Persentase Rumah Sehat	%		81,40	69,40	69,40	75,40	81,40
		Rasio Elektrifikasi	%	36,70	60,00	36,70	40,00	50,00	60,00
		Rasio Guru SD Terhadap Sekolah	%	7,00	14,00	8,00	9,00	11,00	12,00
		Rasio Murid SD Terhadap Ruang Belajar	%	29,08	40,00	31,00	35,00	30,00	30,00
		Rasio Murid SD Terhadap Guru	%	29,60	30,00	32,00	32,00	30,00	30,00
		Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah	%	15,00	14,00	9,00	10,00	12,00	14,00
		Rasio Murid SMP Terhadap Ruang Belajar	%	34,00	40,00	35,18	35,00	35,00	40,00
		Rasio Murid SMP Terhadap Guru	%	14,00	30,00	21,33	25,00	30,00	30,00
		Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah	%	24,00	22,00	16,00	17,00	20,00	22,00
Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar	%	30,00	40,00	30,00	35,00	35,00	40,00		
Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru	%	11,00	40,00	19,00	25,00	30,00	40,00		

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Target Akhir	Target Kinerja			
				Awal (2006)	(2025)	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
4	Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	%	5,65	2500,00	3,87	3400,00	3000,00	2500,00
		Rasio Bidan Terhadap Penduduk	%	1,17	700,00	1,02	1000,00	900,00	700,00
		Rasio Perawat Terhadap Penduduk	%	827,00	500,00	730,00	700,00	600,00	500,00
		Proporsi Akses Air Bersih	%	31,30	70,00	35,00	40,00	50,00	70,00
		Persentase Rumah Sehat	%	63,40	0,81	63,40	69,40	75,40	81,40
		Panjang Jalan Nasional	km	13,87	17000,00	14000,00	15000,00	16000,00	17000,00
		Panjang Jalan Provinsi	km	4,76	5000,00	6000,00	7000,00	8000,00	9000,00
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Jumlah Barang Dibongkar Melalui Pelabuhan Udara	Kg	83839163,00	174295598,50	83839163,00	107002378,00	136565162,10	174295598,50
		Jumlah Barang Dimuat Melalui Pelabuhan Udara	Kg	84453427,00	175572609,20	84453427,00	107786351,80	137565733,50	175572609,20
		Jumlah Barang Antar Negara Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1489,00	1729,00	1489,00	1564,95	1644,78	1729,00
		Jumlah Barang Antar Negara Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	5,00	10,40	5,00	6,80	8,60	10,40
		Jumlah Barang Antar Pulau Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1386958,00	1386963,00	1386958,00	1386960,00	1400830,61	1386963,00
		Jumlah Barang Antar Pulau Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	154657,00	179551,98	154657,00	162546,06	170837,54	179551,98
		Akses air bersih	%	58,70	75,00	60,00	60,00	70,00	75,00
		5	Peningkatan Iklim Berinvestasi	Luas Kawasan Hutan	%	94,99	94,99	94,99	94,99
Persentase Luas Hutan Lindung	%			61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45
Persentase Luas Hutan Produksi	%			33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54
Area Penggunaan Lain	%			5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Jumlah Proyek PMDN	Proyek			29,00	121,14	29,00	46,70	75,22	121,14
Jumlah Proyek PMA	Proyek			79,00	142,27	79,00	96,12	116,94	142,27
Realisasi nilai investasi PMDN	Rp Triliun			-9,50	10,03	3,87	6,23	10,03	10,03
Realisasi nilai investasi PMA	Rp Triliun			-4,30	19,77	11,04	14,78	19,77	19,77
Total Investasi	Rp Triliun			10,65	29,80	10,65	14,91	21,00	29,80
Jumlah Unit Bank	Unit			203,00		203,00			

IV.3 Kebijakan dalam RPJMN

- Target makro dan penyesuaiannya (dapat mengacu rancangan RKP 2024)
- Major Project dan Proyek Prioritas Nasional di Provinsi Papua (target indikator kinerja dan kebijakan pendanaan jika ada) -> Konfirmasi dan konsolidasi dengan bappenas, terutama dengan adanya pemekaran DOB

Tabel IV.3 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber : RPJP Nasional 2005-2025

IV.4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Penyelarasan terhadap RTRW (visi/misi dan tujuan penataan ruang dalam RTRW, serta konsep pengembangan ruang di Papua)
- Dampak DOB terhadap indikasi program dalam RTRW pada tahap IV (24-26), terutama perubahan struktur ruang Provinsi Papua

IV.5 Evaluasi Capaian SDGs

- Perumusan penerjemahan indikator tujuan SDGs terhadap indikator capaian papua (jika tidak ada laporan evaluasi capaian, maka dapat dirumuskan indikator tujuan-sasaran RPJMD periode sebelumnya yang sekiranya dapat merepresentasikan SDGs di Papua, sesuai 17 poin SDGs)

IV.6 Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis merupakan isu atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus yang ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu ini harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas tahapan dalam pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa isu strategis juga didasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah, isu nasional, dan isu internasional.

IV.6.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang dipertimbangkan dalam perumusan tujuan-sasaran dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 merupakan isu – isu global yang mempengaruhi kehidupan beraktivitas masyarakat Papua. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen Millenium Develepment Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Provinsi Papua bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang

saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain: penerapan green economic (ekonomi ramah lingkungan) yang diantaranya ditempuh melalui pembangunan rendah karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam; krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian; perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional; penerapan sumber-sumber alternatif untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia; mengantisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change); serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat yang mampu mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

IV.6.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kestaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industry dan inovasi;

10. Mengurangi ketimpangan;
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen perintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan Presiden ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana- rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 – 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya

- b. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua
- c. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
- d. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024
- e. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- f. Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar

Gambar IV.1 Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : *United Nations, 2015*

IV.6.1.2 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang berawal di China pada akhir tahun 2019 ini hingga akhir Februari 2022 telah menyebar ke 229 negara di dunia. Jumlah orang yang tercatat telah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan berat ini mendekati 445 juta, dan sekitar 6 juta di antaranya meninggal dunia. Secara nasional, hingga akhir akhir Februari 2022 tercatat 5,6 juta kasus dengan kematian 149 ribu jiwa. Sejak dilaporkannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi ini mengalami 3 kali puncak kasus antara lain bulan Januari 2021, Juli 2021 dan Februari 2022, dengan angka kematian tertinggi pada bulan Juli 2021. Menanggapi pandemi ini,

pemerintah pusat hingga daerah telah menetapkan serangkaian kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan penanggulangan baik di bidang kesehatan maupun dalam mengatasi dampak sosial ekonomi. Kebijakan ini juga telah diikuti dengan refocusing anggaran terhadap upaya-upaya penanggulangan dan penyediaan bantuan sosial.

Di antara respon yang dijalankan oleh pemerintah, selain upaya pencegahan penularan secara individu, penanganan kasus, vaksinasi dan pembatasan penyebaran penyakit, secara periodik dilakukan Asesmen Situasi Penanggulangan COVID-19 untuk menentukan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Asesmen ini menggunakan 2 kategori yaitu tingkat penularan dan kapasitas respon. Kategori tingkat penularan dibentuk oleh indikator kasus konfirmasi, perawatan, dan kematian. Sedangkan kapasitas respon dibentuk oleh indikator testing, pelacakan kasus, dan penanganan pasien.

Dengan penurunan jumlah kasus baru harian sejak puncak terakhir di bulan Februari 2022, beberapa negara mulai memelopori pelonggaran pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dan memasuki masa transisi status pandemi Covid-19 dari menjadi endemi. Penetapan status ini setelah melakukan penilaian situasi berdasarkan beberapa indikator, seperti positivity rate di bawah 5%, angka keterisian rumah sakit (bed occupancy ratio/ BOR) di bawah 5%, laju transmisi (R_t) di bawah angka 1, dan vaksinasi 2 dosis lebih dari 70% dari total populasi. Semua indikator ini harus dipenuhi secara konsisten selama enam bulan. Indonesia sendiri belum memenuhi kriteria ini hingga awal Maret 2022.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini berdampak bukan saja pada bidang kesehatan, tetapi pada hampir semua sektor kehidupan. Dampak negatif covid-19 terasa di seluruh perekonomian dunia, yang membawa kontraksi yang sangat buruk termasuk Indonesia dan Papua khususnya. Salah satu indikatornya, PDRB ADHB Papua yang sempat mencapai pada tahun 2019 sebesar 5,62%, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar -1,11%.

Sektor-sektor yang mengalami penurunan ekonomi selama pandemi antara lain transportasi, akomodasi dan kuliner, perdagangan, jasa perusahaan, listrik dan gas, serta

pertanian dan perikanan. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada bidang sosial ekonomi, antara lain terjadinya PHK di banyak industri dan pengurangan pendapatan yang diikuti dengan menurunnya daya beli. Pada sektor pendidikan, dengan diambilnya kebijakan belajar di rumah secara online diikuti dengan berbagai permasalahan, mulai dari sarana, kebutuhan jaringan internet, penguasaan teknologi yang masih rendah.

Dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, perencanaan pembangunan pun wajib mempertimbangkan segala faktor yang terkait dan atau terdampak pandemi. Selain itu upaya penanggulangan dan pemulihan yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung masih tetap diperlukan hingga kondisi kehidupan masyarakat telah beradaptasi dengan Covid-19 sebagai salah satu penyakit endemis.

IV.6.1.3 Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khusus Provinsi Papua untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

IV.6.1.4 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The

2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

IV.6.2 Isu Strategis Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Selain itu secara tegas presiden memberikan arahan terhadap periode kepemimpinannya yang di rangkum menjadi 5 arahan, yaitu sebagai berikut.

IV.6.2.1 Pembangunan SDM

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. 3 (tiga) fokus utama dalam pembangunan SDM adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter.

Dalam hal peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, isu strategis yang diangkat adalah mengenai tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan serta kualitas anak, perempuan dan pemuda. Untuk peningkatan produktivitas, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, penguasaan iptek dan penciptaan inovasi serta prestasi olahraga. Sedangkan dalam hal pembangunan karakter, isu strategis yang diangkat adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

IV.6.2.2 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan perkotaan. Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Papua merupakan bagian dari wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di wilayah Papua.

IV.6.2.3 Penyederhanaan Regulasi

Arahan Presiden untuk menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law diwujudkan dengan menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta

Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Saat ini telah terbentuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 dan membawa perubahan terhadap 19 bidang termasuk cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut 2 (dua) UU dan mengubah 82 UU. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Karya yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pemerintah Daerah diupayakan juga melakukan harmonisasi dan penyederhaan baik itu Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sebagai tidak lanjut dari aturan Undang- Undang Cipta Kerja ini.

IV.6.2.4 Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan mandat Presiden yang pada pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019. Tujuan dan sasaran penyederhanaan birokrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang lebih dinamis, agile dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional terus dilakukan dari pusat hingga daerah. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan output dan keahlian. Dalam hal ini termasuk pula pemerintah daerah menjadi salah satu yang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penyederhanaan birokrasi yang sudah mulai pelaksanaannya tahun ini dan akan diketahui efektivitasnya pada tahun-tahun mendatang.

IV.6.2.5 Transformasi Ekonomi

Dalam mencapai sasaran Visi Indonesia maka perlu penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut yang dimulai pada Tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam arahan presiden, transformasi ekonomi menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan utama untuk mencapai sasaran Visi Indonesia. Transformasi ekonomi yang dilakukan dengan mengubah ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ketujuh agenda pembangunan, terdapat 2 (dua) agenda yang termasuk dalam bidang transformasi ekonomi meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

IV.6.3 Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 – 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Papua untuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan sintesis dari permasalahan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2023, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta masalah yang muncul dari setiap bidang urusan, permasalahan pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen. Adapun Isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya
- b. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua

- c. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
- d. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024
- e. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- f. Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar

Melalui penyelarasan dan pertimbangan di atas, telah dirumuskan 6 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

IV.6.3.1 Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);

Isu peningkatan Kualitas SDM tidak hanya menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 saja, tetapi juga dalam RKPD Tahun 2022 dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Sebagaimana diketahui, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua relatif menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi 4 Provinsi, melihat kondisi kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021 sebesar 26,86 % dan data kemiskinan Provinsi Papua pasca penetapan 3 Daerah Otonomi Baru sebesar 17,12 % apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi lainnya di Pulau Papua. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua merupakan nilai terendah kedua setelah di Pulau Papua. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen serta Mamberamo Raya memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua secara keseluruhan. Hal lain, angka IPM 72,96 (hasil olahan data pasca penetapan 3 DOB) juga menunjukkan secara umum kenaikan positif namun terjadi

pelambatan, perlu terobosan luar biasa khususnya pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 52,18, Kabupaten Supiori 62,72 dan Kabupaten Sarmi sebesar 63,94. Perlambatan ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dan kesenjangan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua wilayah tersebut dan juga di sektor-sektor pendukung IPM, seperti Pendidikan dan Kesehatan.

Dari sisi Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 6-11 tahun masih di bawah rata-rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi fokus adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5 dengan target nasional 16. Angka kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target nasional untuk Provinsi Papua masih belum bisa tercapai lewat capaian yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai komitmen untuk pengurangan pengangguran, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada Tahun 2021 sebanyak 82.662 jiwa dan diupayakan turun signifikan di tahun 2026. Masalah pengangguran yang sebagaimana diketahui kualitas Pendidikan yang masih rendah menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja.

IV.6.3.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebelum DOB tahun 2021 sebesar 15,11 persen (dengan tambang). Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 36,84 persen serta menyumbangkan 13,44 persen dari total 15,11 persen pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan sisanya disumbangkan oleh sektor lainnya. Namun pasca penetapan DOB di Provinsi Papua, beberapa sektor yang bersifat strategis dan berkontribusi besar terhadap perekonomian serta keterkaitan sektor

dan spasialnya akan mengalami perubahan yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Salah satu yang akan terpengaruh adalah pertambangan dan penggalian karena mengingat PT. Freeport Indonesia yang berada di Kabupaten Mimika telah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal ini tentunya akan berdampak langsung maupun tidak langsung sehingga perlu disediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak ekonomi guna peningkatan peranan dan sumbangan dari sektor-sektor lainnya melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan sumberdaya komoditas unggulan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan di internal wilayah Provinsi Papua. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tanpa menyertakan tambang selama periode 2017-2020 cenderung melambat dengan rata-rata sekitar -2,86 persen per tahun. Namun demikian, peningkatan terjadi di tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 2,49 persen. Hal ini tentunya perlu menjadi fokus perhatian pemerintah agar lebih serius terhadap pendayagunaan dan peningkatan kontribusi dari sektor unggulan lainnya, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan, khususnya usaha kecil menengah, dalam rangka peningkatan perekonomian di Provinsi Papua selain dari sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, tanpa adanya penanganan yang baik maka dikhawatirkan dapat menyebabkan menurunnya daya saing Provinsi Papua untuk dapat menarik investasi di masa mendatang.

Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, menyebabkan dinamika ekonomi yang cukup tinggi karena meningkatkan ketidakpastian iklim berusaha yang pada akhirnya menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi sehingga diperlukan upaya untuk dapat meyakinkan pasar agar dapat berinvestasi di Provinsi Papua. Dengan meningkatnya investasi maka sektor-sektor produktif diberikan peluang untuk menciptakan nilai tambah dan juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mendorong percepatan kinerja perekonomian. Selain itu, tentunya dapat menciptakan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya tidak hanya melihat pada pertumbuhan sektoral saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan dalam

implementasinya karena merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua serta merupakan gambaran yang menunjukkan kecenderungan semakin majunya pembangunan ekonomi tersebut. Besaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua memiliki keragaman yang berbeda-beda. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Jayapura sebesar 5,06 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 1,33 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Papua tentunya akan berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang jika terjadi dalam jangka panjang akan berdampak pada semakin besarnya ketimpangan antar wilayah. Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah maka perlu tersedia sarana prasarana yang mendukung produktivitas wilayah dengan tetap mengedepankan komoditas dan karakteristik lokal.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan sehingga sangat diperlukan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman, seperti penyediaan perumahan layak huni, peningkatan cakupan layanan air bersih dan air baku, sanitasi yang layak, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Penataan ruang dan pembangunan wilayah juga perlu memperhatikan RTRW dan melihat potensi di setiap daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini dibagi menjadi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) I, Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II, dan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III yang diharapkan bahwa pada setiap SWP terdapat desain pembangunan kewilayahan dan prioritas pembangunan yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

IV.6.3.3 Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

IV.6.3.4 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pendekatan paradigma pembangunan dewasa ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) namun secara lebih komperhensif pada pendekatan kualitas pembangunan yang mengakomodir keberlanjutan (sustainability) dan pemerataan. Isu global terkait dengan perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Papua. Perubahan iklim yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi diyakini akan memberikan dampak yang justru dapat membebani perekonomian disuatu wilayah. Kesadaran akan hal tersebut menuntut implementasi kebijakan pembangunan daerah yang ramah lingkungan termasuk di dalamnya langkah antisipatif dalam bentuk mitigasi penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari seluruh stakeholder yang memiliki peranan dalam aksi bersama penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Selain itu, proses pembangunan di masa mendatang diharapkan tidak hanya menghadirkan kesejahteraan untuk wilayah, kelompok dan generasi tertentu namun pembangunan dengan manfaat dan dampak yang dirasakan oleh wilayah, kelompok dan berbagai generasi secara terus menerus. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan program

pembangunan juga mengedepankan mitigasi akan dampak yang ditimbulkan termasuk fenomena alam dalam hal ini terkait kebencanaan.

Provinsi Papua dengan luas wilayah sekitar 32.498.762 ha dan perairan laut sebesar 8.845.701.386 ha merupakan provinsi percontohan implementasi dari Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development Initiative* (LCDI) di Indonesia sebagai wujud dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya tujuan ke-13 dari SDGs, dan mendukung pencapaian Visi Papua 2100.

Pulau Papua mempunyai hutan tropis ketiga terluas dengan keanekaragaman hayati dan species serta keunikan ekosistem. Beberapa ekosistem penting dunia terdapat di Papua diantaranya Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Wasur, Pegunungan Foja Daerah Aliran Sungai Mamberamo, segitiga terumbu karang karang Raja Ampat. Hutan mangrove dunia seluas 20% berada pada wilayah Indonesia yang dari jumlah tersebut terdapat 70% di wilayah Pulau Papua Indonesia juga memiliki 48 jenis mangrove dari total 52 jenis mangrove yang ada di wilayah Asia Tenggara, dan 40 jenis mangrove dari total yang ada berada pada wilayah Papua. Selain itu sepertiga hutan gambut yang ada di Indonesia berada pada wilayah Papua. Di Indonesia seluas 20,6 juta ha atau 10,8% dari luas daratan Indonesia dan 38,7% berada pada Pulau Papua. Namun dengan kekayaan Sumber Daya Alam dan budaya yang ada jika disandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disajikan pada bab sebelumnya, tidak sebanding dan tidak sesuai dengan harapan dari kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Oleh sebab itu Provinsi Papua harus melakukan pembangunan guna mengejar ketertinggalan tersebut dan mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya **Pembangunan Rendah Karbon** dan Ekonomi Hijau yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon, ada 2 (dua) skenario yang dapat dilakukan agar pencapaian target dapat terjadi secara signifikan yaitu skenario fair dan ambisius. Dari aspek lingkungan, kontribusi terbesar emisi adalah sektor lahan (hutan dan mangrove) diikuti dengan sektor energi, sektor lahan dari pertanian dan sektor sampah Total emisi 24.861.278-ton CO₂ artinya terjadi peningkatan emisi lebih dari 100%. Dengan skenario fair pada tahun 2030 dapat menurunkan emisi hingga 22%, pada tahun 2045

menjadi 40%, dan selanjutnya 56% pada tahun 2060. Sektor lahan dari hutan dan mangrove dapat menurun sampai 83%, sementara energi dapat ditekan sampai 41%. Sektor limbah dan sektor lahan dari pertanian berkontribusi 22% dan 7%. Dengan skenario ambisious, sektor hutan pada akhir periode mampu menyerap karbon. Sementara untuk sektor energi dan sektor pertanian meskipun sudah dilakukan maksimal namun tetap tidak akan mencapai zero emission. Hanya dengan keseimbangan yang dilakukan oleh sektor hutan dapat mencapai net zero emission.

Pada tahun 2030 terjadi penurunan emisi sebesar 24%, dan tahun 2045 sudah mencapai penurunan 80%. Pada tahun 2060 total emisi sudah melebihi net zero yaitu terjadi penyerapan emisi sebesar 4% dari emisi pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan sektor lahan dari hutan dan mangrove memberikan dampak positif yaitu dapat menyerap emisi 50%, artinya hutan mempunyai potensi yang sangat signifikan mendukung net zero emission.

Sedangkan ditinjau dari pilar aspek ekonomi, hasil simulasi yang dibuat dari pemodelan sistem dinamis menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon yang mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan mampu memberikan pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dalam jangka panjang dibandingkan dengan skenario baseline. Implikasinya baik PDRB maupun PDRB per kapita Papua juga akan semakin tinggi hingga 1,6x lipat. Hal ini memberikan peluang-peluang peningkatan nilai ekonomi masyarakat Papua. Dengan skenario fair dan ambisious kegiatan ekonomi hijau dapat meningkat dan memberikan peningkatan ekonomi baik bagi masyarakat dan maupun pemerintah.

Dengan skenario fair target penurunan intensitas emisi menjadi 23%, kemudian 46% tahun 2045 dan 66% tahun 2060. Sedangkan dengan skenario ambitious mampu menurunkan 42% pada tahun 2030, 84% tahun 2045 bahkan 93% pada tahun 2060. Untuk nilai intensitas emisi yang ditargetkan setiap skenario dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Intensitas Emisi (ton CO2/Miliar Rp)

Tahun	Skenario Baseline	Skenario Fair	Skenario Ambisius
2010	30,73	30,74	30,74
2030	28,68	22,09	16,52
2045	25	13,58	3,98
2060	24,84	8,44	1,84

Lalu dari pilar aspek sosial, dengan peningkatan PDRB berdampak terhadap nilai PDRB per kapita. Skenario fair pada akhir periode terjadi peningkatan 1,343 kali. Sedang apabila dilakukan skenario ambisius terjadi peningkatan 1,504 kali. Artinya Pembangunan Rendah Karbon memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Selain itu, dari aspek emisi per kapita, semakin jauh menurun, yang artinya aktivitas sehari-hari masyarakat Papua juga semakin ramah lingkungan. Pada tahun 2010 emisi per kapita adalah 4,2 ton CO₂/kapita. Dengan skenario baseline tahun 2030 adalah 3,72 ton CO₂/kapita, menjadi 3,33 ton CO₂/kapita tahun 2045 dan sebesar 3, 15 ton CO₂/kapita tahun 2060. Apabila dengan skenario fair maka pada tahun 2030 adalah 2,90 ton CO₂/kapita, pada tahun 2045 sebesar 2,03 ton CO₂/kapita dan pada tahun 2060 adalah sebesar 1,44 ton CO₂/kapita. Apabila dengan skenario ambitious maka pada tahun 2030 adalah 2,19 ton CO₂/kapita, pada tahun 2045 sebesar 0,63 ton CO₂/kapita dan pada tahun 2060 adalah sebesar 0, 35 ton CO₂/kapita.

IV.6.3.5 Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu strategis bagi Provinsi Papua, khususnya terkait dengan optimalisasi capaian Reformasi Birokrasi, seperti diketahui skor indeks capaian reformasi birokrasi Provinsi Papua masih berada pada kategori B dengan nilai 61,12. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan. Tata kelola pemerintahan ini pun tidak terlepas dari harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan, kelembagaan pusat juga lembaga vertikal lainnya dimana diperlukan juga keharmonisan dengan aparat

penegak hukum dalam rangka menjaga ketahanan nasional di Provinsi Papua dalam upaya kondusifitas wilayah dari berbagai isu SARA dan penegakan ideologi Pancasila yang juga penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa.

IV.6.3.6 Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan

Kondisi kurang stabilnya kemandirian serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permasalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan adalah; masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah, masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik, masih banyaknya kasus money politik dalam berdemokrasi.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

V.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.

Tabel V.1 Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026
Mewujudkan kemandirian sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing
Mewujudkan kemandirian budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Mewujudkan	Memperkuat Stabilitas	Kualitas Reformasi	Terwujudnya Tata

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026
kemandirian politik	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kelola Pemerintahan yang Baik
		Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur	
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

mempunyai 2 tujuan dan 16 sasaran, yaitu:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah

3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

V.2 Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

V.3 Penyeragaman dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyeragaman yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan

keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Tabel V.2 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
T1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5 – 6,5	6,5-6,7	6,7-6,9	6,9-7,2	6,9-7,2
S1	Pembangunan kampung mandiri ekonomi	Pencapaian pembangunan di Lokus Kampung Mandiri Ekonomi	persen	0	25	50	25	100
S2	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	77	85	90	100	100
		Produktivitas tanaman pangan utama	Ha	45,05	45,5	45,95	46,41	46,41
		Produktivitas perikanan	Ton/tahun	317.329,33	320.502,62	323.707,65	326.944,73	330.214,18
		Konsumsi ikan	kilogram	64,3	65	70	75	75
S3	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Produksi perikanan	Ton/Tahun	317.329,33	320.502,62	323.707,65	326.944,73	330.214,18
		Nilai tukar petani sub sektor perikanan	indeks	114,55	115,7	116,86	118,03	119,21
S4	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	persen	10,71	10,85	10,95	11,71	11,71
		Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	persen	36,14	10	11	12	12
S5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	81,46	82,27	83,09	83,92	83,92
		tingkat emisi gas rumah kaca	persen	1.866	1.885	1.904	1.923	1.923
		Indeks Kualitas Udara	indeks	95,32	96,27	97,23	98,2	98,2
		Indeks Kualitas Air	indeks	55,07	55,63	56,18	56,7418	56,7418
		Indeks Kualitas air laut	indeks	87,29	88,16	89,04	97,29	97,29
S6	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen	98	98	98	98	98
		Laju Deforestasi	Ha	34.918	-	-	-	-
S7	Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	persen	9,37	9,47	9,57	9,67	9,67
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	persen	1,8	2	2,8	3	3
		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	unit	-	-	-	-	-
		Cakupan bina kelompok pengrajin	kelompok	1.726	1.750	1.800	1.850	1.850

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
		Jumlah Industri rakyat yang dikembangkan	unit	7.308	7.500	7.750	8.000	8.000
		jumlah koperasi aktif	unit	2434	628	648	658	658
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	15,11	15,26	15,41	15,56	15,56
		Jumlah UMKM OAP yang berkembang	unit	377	381	385	389	389
S8	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Persentase Pendapatan wilayah di sektor pertambangan	Persen	-	-	-	-	-
		Jumlah unit usaha masyarakat di sektor pertambangan	Unit	-	-	-	-	-
		Persentase tenaga kerja sektor pertambangan	persen	-	-	-	-	-
S9	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp	70.038.818	-	-	-	-
		Jumlah perusahaan PMDN dan PMA	unit	507	253	258	264	264
		Jumlah tenaga kerja	Orang	6.676	NA	NA	NA	NA
T2	Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar	Persentase Kebutuhan Dasar Masyarakat	Persen	95	95	95	95	95
S10	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	Persen	95	95	95	95	95
		Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota	Persen	9	9	9	9	9
S11	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)	Persen	-	-	-	-	-
S12	Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Cakupan Panjang Jalan	kilometer	2100	2150	2200	2250	2250
S13	Menyiapkan papua gerbang ekspor	Tersedianya Papua Gerbang ekspor	Unit	1	1	1	1	1
S14	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	Persen	64,77	-	-	-	-
S15	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	persen	79,12	85	90	95	95
		Rasio Ketersediaan Daya Listrik	persen	26,17	30,17	40	50	50
		Jumlah energi Alternatif yang dikembangkan	Unit	-	-	-	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
S16	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60	61	62	63	63
T3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri dan Berdaya Saing	IPM	Indeks	67,67	67,85	68,03	68,21	68,21
S17	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,14	9,19	9,22	9,26	9,26
		Harapan lama sekolah	tahun	13,09	13,29	13,35	13,48	13,48
S18	Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp ribu /Orang	8.504	8.754	9.004	9.254	9.254
S19	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	66,54	66,64	66,74	66,84	66,84
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80,50	80,50
S20	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
S21	Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	95	95	95	95	95
S22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Papua, 2023

V.4 Penyelarasan dengan RIPPP tahun 2022 – 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 – 2041 perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro. Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalah "*Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera*", yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran indikator, yaitu:

1. **Misi 1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang se hat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. **Misi 2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. **Misi 3:** meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta

pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi:

Pembangunan **ekonomi** yang diarahkan pada:

1. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.
2. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Menjaga stailitas makro ekonomi Papua serta menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

VI.1 Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2024-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan **Papua Produktif**, yaitu:

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip keefisiensi.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

- a. Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

3. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

- a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan.
- b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional.
- c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*development skill centre*) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu *Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah

Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu

memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah kebijakan untuk Provinsi Papua selama periode 2024-2026, berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

VI.3 Program Prioritas Daerah

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Tabel VI.1 Tabel Prioritas Pembangunan Daerah

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
T1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung	Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan Infrastruktur																	
S1	Meningkatnya aktivitas ekonomi kampung	Peningkatan kemudahan investasi untuk ekonomi kampung berbasis komoditas unggulan Kopi dan Kakao	2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	2,5	3,700,000,000	3	3,737,000,000	3,5	3,774,370,000	4	3,812,113,700	4	11,323,483,700	Dinas Perindustrian Perdagangan n Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
			2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	70	400,000,000	80	404,000,000	90	408,040,000	100	412,120,400	100	1,224,160,400	Dinas Perindustrian Perdagangan n Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
		Peningkatan partisipasi tenaga kerja terhadap penyelenggaraan UMKM ekonomi kampung	2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	80	1,500,000,000	80	1,515,000,000	80	1,530,150,000	80	1,545,451,500	80	4,590,601,500	Dinas Perindustrian Perdagangan n Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
			2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	87	300,000,000	90	303,000,000	93	306,030,000	96	309,090,300	96	918,120,300	Dinas Perindustrian Perdagangan n Koperasi Usaha Kecil Menengah	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
																	Dan Tenaga Kerja		
		Penguatan kerja sama kampung melalui sistem integrasi komoditas unggulan masing-masing kampung	2	13	2	Program Penataan Desa	Jumlah Kampung mandiri	0	500,000,000	1	505,000,000	1	510,050,000	1	515,150,500	1	1,530,200,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	Papua
		Penguatan kelembagaan kampung dalam wilayah adat	2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kerjasama pemerintah desa yang difasilitasi		5,000,000,000		5,050,000,000		5,100,500,000		5,151,505,000		15,302,005,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	Papua
			2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		7,000,000,000		7,070,000,000		7,140,700,000		7,212,107,000		21,422,807,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	Papua
		Peningkatan kontrol dana otsus untuk mendukung program ekonomi dan UMKM kampung dalam pengolahan komoditas sektor unggulan	5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah		727,500,000,000		734,775,000,000		742,122,750,000		749,543,977,500		2,226,441,727,500	Badan Pengelola Keuangan Dan Arsip Daerah	Papua
		Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi	2	13	2	Program Penataan Desa			500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500		1,530,200,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		kampung															Dan Orang Asli Papua		
S2	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan	Peningkatan dukungan terhadap petani sagu dan umbi-umbian	3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	2,5	5,500,000,000	5,555,000,000	2,5	5,610,550,000	2,5	5,666,655,500	2,5	16,832,205,500	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua	
		Penguatan kelembagaan pertanian desa/kampung dengan sistem koperasi	2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kampung berkembang		5,000,000,000	5,050,000,000		5,100,500,000		5,151,505,000		15,302,005,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	Papua	
		Pengadaan pelatihan petani	3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pertanian dan Perernak yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	5,500,000,000	60	5,555,000,000	60	5,610,550,000	60	5,666,655,500	60	16,832,205,500	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
		Pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi	2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan	50	1,000,000,000	50	1,010,000,000	50	1,020,100,000	50	1,030,301,000	50	3,060,401,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
		Penguatan lumbung pangan provinsi	2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan	50	1,000,000,000	50	1,010,000,000	50	1,020,100,000	50	1,030,301,000	50	3,060,401,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
		Penguatan pengendalian harga hasil panen petani	2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	PPH Ketersediaan Pangan	100	11,000,000,000	100	11,110,000,000	100	11,221,100,000	100	11,333,311,000	100	33,664,411,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						Masyarakat													
		Peningkatan infrastruktur logistik dan distribusi pangan provinsi	2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Infrastruktur Logistik dan Distribusi Pangan	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
		Stabilisasi harga pangan	2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPH konsumsi pangan		11,000,000,000		11,110,000,000		11,221,100,000		11,333,311,000		33,664,411,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
S3	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan	Pemberian insentif dan kompensasi bagi kegiatan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi		700,000,000		707,000,000		714,070,000		721,210,700		2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
		Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya laut	3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Laut	12.000	6,200,000,000	13.000	6,262,000,000	14.000	6,324,620,000	15.000	6,387,866,200	15.000	18,974,486,200	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua
		Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya tambak	3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tambak	1.000	6,200,000,000	1.200	6,262,000,000	1.300	6,324,620,000	1.400	6,387,866,200	1.400	18,974,486,200	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua
		Memaksimalkan produktivitas pertambangan mineral di kawasan perairan pesisir sesuai RZWP3K	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen RZWP3K	1	699,999,999	1	706,999,999	1	714,069,999	1	721,210,699	1	2,142,280,697	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
		Penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan	3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	160.000	5,999,999,999	170.000	6,059,999,999	180.000	6,120,599,999	190.000	6,181,805,999	190.000	18,362,405,997	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		kelautan dan perikanan																	
		Penguatan struktur kelembagaan pengelola sumber daya maritim	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	90	699,999,999	90	706,999,999	90	714,069,999	90	721,210,699	90	2,142,280,697	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
S4	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Penguatan industri UMKM dalam melakukan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertanian, dan perkebunan	3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak		6,300,000,000		6,363,000,000		6,426,630,000		6,490,896,300		19,280,526,300	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
			3	28	2	Program Perencanaan Hutan	Tersediaannya Dokumen Rencana Pengolahan Hutan	3	10,000,000,000	3	10,100,000,000	3	10,201,000,000	3	10,303,010,000	3	30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
			3	28	3	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	100	37,000,000,000	100	37,370,000,000	100	37,743,700,000	100	38,121,137,000	100	113,234,837,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
			3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Angka Konsumsi Ikan	65	50,000,000,000	66	50,500,000,000	67	51,005,000,000	68	51,515,000,000	69	153,020,050,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
			2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Unit Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	81	3,700,000,000	86	3,737,000,000	91	3,774,370,000	96	3,812,113,700	96	11,323,483,700	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
																	Tenaga Kerja		
		Penguatan kelembagaan kampung adat untuk mengelola kawasan pariwisata	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik/Destina si Wisata yang ditingkatkan		6,000,000,000		6,060,000,000		6,120,600,000		6,181,806,000		18,362,406,000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Papua
		Perlindungan terhadap sumber daya laut dan hutan	2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	75	50,000,000,000	76,5	50,500,000,000	77	51,005,000,000	77,5	51,515,050,000	77,5	153,020,050,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
		Pemetaan potensi produksi sumber daya alam unggulan untuk masing-masing kampung adat	2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
		Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas jalur distribusi kawasan produksi menuju pusat aktivitas wilayah	1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pengembangan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang di tangani	80,94	5,000,000,000	81,38	5,050,000,000	84,04	5,100,500,000	84,88	5,151,505,000	84,88	15,302,005,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan produksi energi terbarukan	3	29	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	345,92	500,000,000	715,69	505,000,000	1073,54	510,050,000	1431,38	515,150,500	1431,38	1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
		Penguatan kelembagaan dan perizinan kegiatan usaha di kawasan hutan dan pesisir	3	28	5	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Cakupan Masyarakat OAP dan Penyuluh Serta Polhut yang Mendapatkan Pemberdayaan Kehutanan	150	2,250,000,000	200	2,272,500,000	250	2,295,225,000	300	2,318,177,250	500	6,885,902,250	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Pelestarian ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun	3	28	4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah Yang di Terkelola		7,100,000,000		7,171,000,000		7,242,710,000		7,315,137,100		21,728,847,100	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
			3	28	3	Program Pengelolaan Hutan	Presentasi Kerusakan Hutan Pertahun (Defortasi)	100	37,000,000,000	100	37,370,000,000	100	37,743,700,000	100	38,121,137,000	100	113,234,837,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
		3	28	4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Cakupan Kawasan Daerah Konservasi yang Terkelola	75	7,100,000,000	75	7,171,000,000	80	7,242,710,000	85	7,315,137,100	85	21,728,847,100	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		3	28	6	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Lahan DAS yang di Pulihkan Kondisinya	75	50,000,000,000	75	50,500,000,000	75	51,005,000,000	75	51,515,050,000	75	153,020,050,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume debit air baku (liter/detik)	100	16,882,785,000	100	17,051,612,850	100	17,222,128,979	100	17,394,350,268	100	51,668,092,097	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Eksplorasi dan Pengembangan energi terbarukan sesuai dengan RUED	3	29	5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	80	500,000,000	80	505,000,000	80	510,050,000	80	515,150,500	80	1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
			3	29	5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Energi Terbarukan	80	500,000,000	80	505,000,000	80	510,050,000	80	515,150,500	80	1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
		Penguatan kawasan lindung sebagai penyedia jasa ekosistem	3	28	3	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan Kawasan Lindung sebagai Penyedia Jasa Ekosistem	100	37,000,000,000	100	37,370,000,000	100	37,743,700,000	100	38,121,137,000	100	113,234,837,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
		Pemanfaatan kawasan <i>buffer</i> sebagai kawasan pariwisata intensitas rendah dan <i>ecotourism</i> sesuai arahan pemanfaatan ruang	1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Regulasi	80	10,000,000,000	80	10,100,000,000	80	10,201,000,000	80	10,303,010,000	80	30,604,010,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
			3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan daya Tarik/destinasi wisata yang ditingkatkan	75	6,000,000,000	75	6,060,000,000	75	6,120,600,000	75	6,181,806,000	75	18,362,406,000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Papua
		Penguatan pengendalian dan perizinan pemanfaatan lahan untuk usaha	3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik	65	6,000,000,001	65	6,060,000,001	65	6,120,600,001	65	6,181,806,001	65	18,362,406,003	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Papua
			3	31	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan Batasan ijin usaha sesuai regulasi	55	1,000,000,000	55	1,010,000,000	60	1,020,100,000	65	1,030,301,000	100	3,060,401,000	Dinas Perindustrian Perdaganganan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			3	30	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presetase jumlah perusahaan yang mendapatkan ijin usaha	60	500,000,000	60	505,000,000	60	510,050,000	60	515,150,500	60	1,530,200,500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
		Penguatan regulasi pengolahan limbah dan penyediaan infrastruktur pengolahan limbah	1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah IPLT/IPAL yang terbangun		350,000,000		353,500,000		357,035,000		360,605,350		1,071,140,350	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah	Papua
		Peningkatan pembangunan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan	3	29	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Atau Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan		500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500		1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
		Peningkatan konektivitas untuk kawasan potensial penghasil energi terbarukan	3	29	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Atau Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan		500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500		1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
		Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	2	11	3	Program Pengendalian Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup		50,000,000,000		50,500,000,000		51,005,000,000		51,515,050,000		153,020,050,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan investasi untuk pembangunan energi terbarukan	3	29	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500		1,530,200,500	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua	
		Penguatan kelembagaan dan perizinan untuk alih fungsi lahan	3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		9,000,000,000		9,090,000,000		9,180,900,000		9,272,709,000		27,543,609,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua	
		Peningkatan pengelolaan sampah domestik sebagai upaya penurunan emisi karbon	1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah TPA/TPST yang	5,000,000,000		5,050,000,000		5,100,500,000		5,151,505,000		15,302,005,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua	
S7	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas hutan produksi terbatas	3	28	2	Program Perencanaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		Peningkatan produktivitas hutan mangrove dan hutan rawa	3	28	2	Program Perencanaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		Perumusan kebijakan untuk mengintegrasikan KPHL dan KPHP dengan program pemerintah pusat	3	28	2	Program Perencanaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
			3	28	3	Program Pengelolaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan	Papua	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
																	n Hidup		
		Penguatan kelembagaan dan perizinan untuk alih fungsi lahan hutan	3	28	3	Program Pengelolaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		Pengendalian izin pertambangan	3	29	3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		600,000,000		606,000,000		612,060,000		618,180,600		1,836,240,600	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua	
		Pemberian insentif untuk kegiatan pengelolaan hutan secara gotong rotong dengan prinsip Co-Ownership, Co-Operation/ Co-Management dan Co-Responsibility	3	28	3	Program Pengelolaan Hutan		37,000,000,000		37,370,000,000		37,743,700,000		38,121,137,000		113,234,837,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua	
		Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas	3	28	2	Program Perencanaan Hutan	Tersediaannya Dokumen Rencana Pengolahan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas	3	28	2	Program Perencanaan Hutan	Tersediaannya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan		10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
S8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditas unggulan Papua	Peningkatan jumlah investasi untuk sektor perkebunan Kopi dan Kakao	2	18	2	Program Pengembangan Iklm Penanaman Modal	Jumlah iinvestasi perkebunan kopi dan kakao	3	800,000,000	5	808,000,000	5	816,080,000	5	824,240,800	5	2,448,320,800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Papua
			2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan pertahun	5	1,600,000,000	5	1,616,000,000	5	1,632,160,000	5	1,648,481,600		4,896,641,600	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Papua
		Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian abadi/LP2B	3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemberian sarana pada kelompok peternak		6,300,000,000		6,363,000,000		6,426,630,000		6,490,896,300		19,280,526,300	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
			1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	90	700,000,000	90	707,000,000	90	714,070,000	90	721,210,700	90	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
S9	Mengoptimalkan	Peningkatan partisipasi	3	29	3	Program Pengelolaan	Cakupan partisipasi	60	600,000,000	80	606,000,	80	612,060,	80	618,180,6	80	1,836,240,	Dinas Energi Dan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	masyarakat kampung dalam sektor pertambangan				Mineral Dan Batubara	masyarakat kampung dalam sector pertambangan				000		000		00		600	Sumber Daya Mineral	
		Peningkatan kapasitas industri pengolahan hasil tambang untuk mendukung hilirisasi tambang	2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investasi perkebunan kopi dan kakao		800,000,000		808,000,000		816,080,000		824,240,800		2,448,320,800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Papua
			3	29	3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Cakupan kapasitas industri tambang batubara	20	600,000,000	20	606,000,000	20	612,060,000	20	618,180,600	20	1,836,240,600	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Papua
		Peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kegiatan pertambangan yang memenuhi prinsip minimum pembangunan berkelanjutan	1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	4	510,000,000,000	4	515,100,000,000	4	520,251,000,000	4	525,453,510,000	4	1,560,804,510,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penguatan struktur kelembagaan kampung untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertumbuhan skala kecil-menengah	2	13	3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Presentase kerjasama pemerintah desa yang di fasilitasi	50	750,000,000	50	757,500,000	60	765,075,000	60	772,725,750	80	2,295,300,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua	Papua
		Pengendalian perizinan pembukaan lahan untuk kegiatan pertumbuhan	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	90	700,000,000	90	707,000,000	90	714,070,000	90	721,210,700	90	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
		Pengendalian investasi sektor pertumbuhan	2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal			1,600,000,001		1,616,000,001		1,632,160,001		1,648,481,601		4,896,641,603	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Papua
		Penguatan kelembagaan untuk mencegah adanya kawasan pertumbuhan ilegal dan tidak berkelanjutan	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	90	700,000,000	90	707,000,000	90	714,070,000	90	721,210,700	90	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
S10	Meningkatnya daya saing dan realisasi	Pembangunan infrastruktur pendukung	3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada	80	9,000,000,000	85	9,090,000,000	85	9,180,900,000	85	9,272,709,000	85	27,543,609,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	investasi pada sektor-sektor andalan daerah	hilirisasi produk unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan				n Sarana Pertanian	Kelompok Peternak												
3			27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peternak	80	2,100,000,000	85	2,121,000,000	85	2,142,210,000	85	2,163,632,100	85	6,426,842,100	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua	
3			25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	10	4,000,000,000	20	4,040,000,000	30	4,080,400,000	40	4,121,204,000	40	12,241,604,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua	
3		25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana dan Sarana Budidaya	5	6,200,000,000	15	6,262,000,000	20	6,324,620,000	30	6,387,866,200	35	18,974,486,200	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua		
3		30	5	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	5	750,000,000	5	757,500,000	5	765,075,000	5	772,725,750	5	2,295,300,750	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua		
	Peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan dari UMKM kampung	Peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan dari UMKM kampung	2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah Komoditas Unggulan Berbasis Kampung	6	3,700,000,000	15	3,737,000,000	15	3,774,370,000	15	3,812,113,700	15	11,323,483,700	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
3			27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Teknologi Terbarukan Sektor Pertanian	12	6,300,000,000	13	6,363,000,000	14	6,426,630,000	15	6,490,896,300	15	19,280,526,300	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembangunan dan penguatan sarana perdagangan pasar	2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Produktivitas, Nilai pasar dan Akses Pembiayaan, Penguwatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha	80	750,000,000	80	757,500,000	80	765,075,000	80	772,725,750	80	2,295,300,750	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
			3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sasaran Distribusi Perdagangan Bagi Usaha	80	500,000,000	80	505,000,000	80	510,050,000	80	515,150,500	80	1,530,200,500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
		Penguatan aktivitas pertanian dan stabilisasi harga jual komoditas pertanian	3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Tertanggulangnya Pasaka Bencana Terhadap Stabilitas Harga Jual Komoditas Pertanian	65	3,000,000,000	75	3,030,000,000	85	3,060,300,000	95	3,090,903,000		9,181,203,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
		Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dan jaringan distribusi logistik untuk kawasan produsen	1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4	510,000,000,000	4	515,100,000,000	4	520,251,000,000	4	525,453,510,000	4	1,560,804,510,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Perumahan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		komoditas unggulan	3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Logistik	10	4,000,000,000	10	4,040,000,000	10	4,080,400,000	10	4,121,204,000	10	12,241,604,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua
		Penguatan dan pembangunan sentra perdagangan skala wilayah sebagai pusat distribusi komoditas unggulan berorientasi ekspor	3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rantai Dingin	10	750,000,000	30	757,500,000	40	765,075,000	60	772,725,750	60	2,295,300,750	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
		Diversifikasi komoditas unggulan Papua menjadi komoditas produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan	3	28	3	Program Pengelolaan Hutan			37,000,000,000		37,370,000,000		37,743,700,000		38,121,137,000		113,234,837,000	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Papua
			3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Olahan Komoditas Perikanan	20	4,000,000,000	100	4,040,000,000	100	4,080,400,000	100	4,121,204,000	100	12,241,604,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
T2	Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar																		
S11	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang	Penguatan fungsi Pusat Kegiatan Nasional dan konektivitas simpul wilayah dalam sistem perkotaan Papua	1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		5,000,000,000	97	5,050,000,000	98	5,100,500,000	99	5,151,505,000	99	15,302,005,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
			1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4	510,000,000,000	4	515,100,000,000	4	520,251,000,000	4	525,453,510,000	4	1,560,804,510,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
		Penguatan peran kawasan andalan provinsi dalam mendukung perekonomian daerah	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang yang terselesaikan tepat waktu	65	700,000,000	70	707,000,000	80	714,070,000	90	721,210,700	90	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
		Penguatan fungsi Pos Lintas Batas Negara	5	5	6	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase peningkatan batas wilayah	80	10,400,000,000	80	10,504,000,000	80	10,609,040,000	80	10,715,130,400	80	31,828,170,400	Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama	Papua
		Penguatan pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan penyangga dan kawasan lindung	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang yang terselesaikan tepat waktu	4	700,000,000	4	707,000,000	4	714,070,000	4	721,210,700	4	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
		Penyusunan dan penyesuaian Rencana Tata Ruang pasca pemekaran	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang yang terselesaikan	4	700,000,000	4	707,000,000	4	714,070,000	4	721,210,700	4	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung mobilitas penduduk sesuai rencana struktur ruang antar kabupaten/kota	1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Kontruksi yang Terlata di Wilayah Provinsi	75	7,900,000,000	75	7,979,000,000	75	8,058,790,000	75	8,139,377,900	75	24,177,167,900	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
		Melakukan evaluasi penataan ruang	1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang yang terselesaikan tepat waktu	4	700,000,000	4	707,000,000	4	714,070,000	4	721,210,700	4	2,142,280,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Papua
S12	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar	Peningkatan pengelolaan sumber daya air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air	1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Volume debit air baku (liter/detik)	100	16,882,785,000		17,051,612,850		17,222,128,979		17,394,350,268		51,668,092,097	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Pembangunan dan pengelolaan daerah irigasi yang terintegrasi antar wilayah				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas Daerah Irigasi yang terbangun (Ha)	100	16,882,785,000		17,051,612,850		17,222,128,979		17,394,350,268		51,668,092,097	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
		Penguatan kelembagaan pertanian desa/kampung dalam pengelolaan sistem irigasi	1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Jumlah kelompok pengelola DI yang terbentuk (Kelompok)	2	16,882,785,000		17,051,612,850		17,222,128,979		17,394,350,268		51,668,092,097	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
		Pengendalian daya rusak air	1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di WS Provinsi (Km)	88	16,882,785,000		17,051,612,850		17,222,128,979		17,394,350,268		51,668,092,097	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
S13	Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4	510,000,000,000	4	515,100,000,000	4	520,251,000,000	4	525,453,510,000	4	1,560,804,510,000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Papua
		Penambahan sistem transportasi antar moda	2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per	500.000	5,000,000,000	500.000	5,050,000,000	500.000	5,100,500,000	500.000	5,151,505,000	500.000	15,302,005,000	Dinas Perhubungan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	seluruh wilayah						hari												
			2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	3	13,200,000,000	3	13,332,000,000	4	13,465,320,000	4	13,599,973,200	4	40,397,293,200	Dinas Perhubungan	Papua
			2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan			5,000,000,000		5,050,000,000		5,100,500,000		5,151,505,000		15,302,005,000	Dinas Perhubungan	Papua
S14	Meningkatkannya ekspor komoditas Papua	Pengoptimalan fungsi pusat kegiatan sebagai pusat industri jasa hasil pertanian dan perkebunan berorientasi ekspor	3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan tersedianya Sarana dan Prasara Pertanian, Perkebunan	55	6,300,000,000	60	6,363,000,000	60	6,426,630,000	60	6,490,896,300	60	19,280,526,300	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
			3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan tersedianya Sarana dan Prasara Pertanian, Perkebunan	55	9,000,000,000	60	9,090,000,000	60	9,180,900,000	60	9,272,709,000	60	27,543,609,000	Dinas Pertanian Dan Pangan	Papua
			3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Fasilitas Pelaku Ekspor yang di Binah	65	750,000,000	70	757,500,000	75	765,075,000	75	772,725,750	75	2,295,300,750	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
			2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan	2,5	3,700,000,000	3	3,737,000,000	3,5	3,774,370,000	4	3,812,113,700	4	11,323,483,700	Dinas Perindustrian Perdagangan dan	Papua

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						Dan Usaha Mikro (UMKM)	mandiri											Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	
		Pembangunan pusat kegiatan sebagai pusat pariwisata cagar budaya, wisata bahari, dan ekowisata	3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pengunjung Event dan Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	70	6,000,000,000	75	6,060,000,000	80	6,120,600,000	85	6,181,806,000	85	18,362,406,000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Papua
		Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional	3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online	70	500,000,000	75	505,000,000	80	510,050,000	85	515,150,500	85	1,530,200,500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Papua
		Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan wilayah untuk mendukung kegiatan pusat kegiatan nasional Provinsi Papua	3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			500,000,000		505,000,000		510,050,000		515,150,500		1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembangunan Papua Gerbang Ekspor	3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		750,000,000		757,500,000		765,075,000		772,725,750		2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
		Pengintegrasian dan peningkatan konektivitas kawasan produksi komoditas dengan industri pengolahan	1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	50	510,000,000,000	50	515,100,000,000	50	520,251,000,000	50	525,453,510,000	50	1,560,804,510,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
		Pembangunan dan pengembangan sarana Papua Gerbang Ekspor	3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		750,000,000		757,500,000		765,075,000		772,725,750		2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
		Perumusan regulasi untuk memfasilitasi investasi industri pengolahan dan upaya hilirisasi	3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2,000,000,000		2,020,000,000		2,040,200,000		2,060,602,000		6,120,802,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		1,000,000,000		1,010,000,000		1,020,100,000		1,030,301,000		3,060,401,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
S15	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan permukiman	Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum dan air bersih berbasis masyarakat	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak (SPM)	77.84	82,587,228,685		83,413,100,972		84,247,231,982		85,089,704,301		252,750,037,255	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
		Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan persampahan dan sanitasi berbasis masyarakat	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik	55	5,000,000,000	60	5,050,000,000	65	5,100,500,000	70	5,151,505,000	70	15,302,005,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
S16	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Limbah Domestik Layak Dan Aman (SPM)	72.52	10,000,000,000	72.52	10,100,000,000	72.52	10,201,000,000	72.52	10,303,010,000	72.52	30,604,010,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
			1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50	7,900,000,000	55	7,979,000,000	60	8,058,790,000	65	8,139,377,900	65	24,177,167,900	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
		3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	Persentase Tingkat Listrik dan Pemanfaatan Energi Listrik	30	16,500,000,000	35	16,665,000,000	40	16,831,650,000	60	16,999,966,500	60	50,496,616,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA	
		Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan cakupan jaringan listrik	3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	Persentase Tingkat Listrik dan Pemanfaatan Energi Listrik	30	16,500,000,000	35	16,665,000,000	40	16,831,650,000	60	16,999,966,500	60	50,496,616,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Perumusan kerangka investasi energi terbarukan di daerah terpencil	2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		800,000,000		808,000,000		816,080,000		824,240,800		2,448,320,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA	
		Perumusan regulasi pemanfaatan energi secara berkelanjutan	3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Atau Cakupan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	80	500,000,000	80	505,000,000	80	510,050,000	80	515,150,500	80	1,530,200,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA
S17	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan cakupan sarana komunikasi dan internet	2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi	51	700,000,000	51	707,000,000	51	714,070,000	51	721,210,700	51	2,142,280,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA
		Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah papua	2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi	51	700,000,000	51	707,000,000	51	714,070,000	51	721,210,700	51	2,142,280,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
T3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri dan Berdaya Saing																		
S18	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal Papua	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100	10,387,616,404	100	10,491,492,568	100	10,596,407,494	100	10,702,371,569	100	31,790,271,630	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
			1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100	17,353,810,250	100	17,527,348,353	100	17,702,621,836	100	17,879,648,054	100	53,109,618,243	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
			2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan SD, SMP, dan SMA	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		93,698,819,727	100	94,635,807,924	100	95,582,166,004	100	96,537,987,664	100	286,755,961,591	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
			1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100	17,353,810,250	100	17,527,348,353	100	17,702,621,836	100	17,879,648,054	100	53,109,618,243	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penguatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
		Penguatan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		93,698,819,727	100	94,635,807,924	100	95,582,166,004	100	96,537,987,664	100	286,755,961,591	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
S19	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		102,444,190,735		103,468,632,642		104,503,318,969		105,548,352,158		313,520,303,770	DINAS KESEHATAN	PAPUA	
		Integrasi layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		2,391,503,000		2,415,418,030		2,439,572,210		2,463,967,932		7,318,958,173	DINAS KESEHATAN	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		1,588,993,265		1,604,883,198		1,620,932,030		1,637,141,350		4,862,956,577	DINAS KESEHATAN	PAPUA	
		Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		31,570,873,870		31,886,582,609		32,205,448,435		32,527,502,919		96,619,533,963	DINAS KESEHATAN	PAPUA	
		Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan	1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
		Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pemenuhan gizi masyarakat	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		20,039,163,200		20,239,554,832		20,441,950,380		20,646,369,884		61,327,875,096	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	PAPUA	
		Mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		31,570,873,870		31,886,582,609		32,205,448,435		32,527,502,919		96,619,533,963	DINAS KESEHATAN	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		7,800,000,000		7,878,000,000		7,956,780,000		8,036,347,800		23,871,127,800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	PAPUA	
		Peningkatkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan melalui BLUD	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		9,500,000,000		9,595,000,000		9,690,950,000		9,787,859,500		29,073,809,500	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	PAPUA	
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan	1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		31,570,873,870		31,886,582,609		32,205,448,435		32,527,502,919		96,619,533,963	DINAS KESEHATAN	PAPUA	
		Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC, dan Malaria	1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		2,391,503,000		2,415,418,030		2,439,572,210		2,463,967,932		7,318,958,173	DINAS KESEHATAN	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana	1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		20,039,163,200		20,239,554,832		20,441,950,380		20,646,369,884		61,327,875,096	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	PAPUA	
S20	Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat	Peningkatan akses lapangan kerja yang terdiversifikasi untuk menyerap angkatan kerja	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1,500,000,000		1,515,000,000		1,530,150,000		1,545,451,500		4,590,601,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
		Peningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tenaga kerja	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1,500,000,000		1,515,000,000		1,530,150,000		1,545,451,500		4,590,601,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
		Peningkatkan partisipasi pendidikan untuk penduduk usia belajar	1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		93,698,819,727	100	94,635,807,924	100	95,582,166,004	100	96,537,987,664	100	286,755,961,591	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan akses terhadap kredit usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan dan pemodalan UMKM	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		400,000,000		404,000,000		408,040,000		412,120,400		1,224,160,400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
		Peningkatan dan fasilitasi kerangka regulasi investasi PMA/PMDN	2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1,600,000,000		1,616,000,000		1,632,160,000		1,648,481,600		4,896,641,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA	
		Peningkatan konektivitas antar sarana perdagangan dan stimulasi aktivitas ekonomi masyarakat	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		400,000,000		404,000,000		408,040,000		412,120,400		1,224,160,400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Peningkatan kerja sama pemerintah terhadap kelembagaan, organisasi, dan swasta dalam melakukan stimulasi aktivitas ekonomi masyarakat	2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		400,000,000		404,000,000		408,040,000		412,120,400		1,224,160,400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA	
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																		
S21	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Meneruskan reformasi birokrasi untuk setiap perangkat daerah	4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	12,11	13,477,000,000	12,12	13,611,700,000	12,13	13,747,887,700	12,14	13,885,366,577	12,14	41,245,024,277	BIRO ORGANISASI	PAPUA
			6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			10,000,000,000		10,100,000,000		10,201,000,000		10,303,010,000		30,604,010,000	INSPEKTORAT	PAPUA
		Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar	4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			13,477,000,000		13,611,700,000		13,747,887,700		13,885,366,577		41,245,024,277	BIRO ORGANISASI	PAPUA
			5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN			12,000,000,000		12,120,000,000		12,241,200,000		12,363,610,000		36,724,810,000	BADAN PERENCANAAN	PAPUA

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		perangkat daerah				PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				00,000		00,000		2,000		2,000	AAN PEMBANGUNAN DAERAH		
S22	Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua	Memfokuskan alokasi dana otsus untuk program pengembangan berbasis masyarakat	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		727,500,000,000		734,775,000,000		742,122,750,000		749,543,977,500		2,226,441,727,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
		Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan otonomi khusus Papua	4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		13,477,000,000		13,611,770,000		13,747,887,700		13,885,366,577		41,245,024,277	BIRO ORGANISASI	PAPUA	
		Memperkuat pendataan keuangan dan aset daerah yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus	5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		2,400,000,000		2,424,000,000		2,448,240,000		2,472,722,400		7,344,962,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			Urusan	B/Urusan	Program			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Memantapkan instrumen pengembangan afirmatif bagi OAP dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		727,500,000,000		734,775,000,000		742,122,750,000		749,543,977,500		2,226,441,727,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
		Memantapkan instrumen perencanaan dalam penganggaran program yang menggunakan dana otsus	5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		727,500,000,000		734,775,000,000		742,122,750,000		749,543,977,500		2,226,441,727,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA	
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otsus melalui pelaporan, monitoring, dan tagging program yang menggunakan alokasi dana otsus Papua	5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		12,000,000,000		12,120,000,000		12,241,200,000		12,363,612,000		36,724,812,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA	

Kode	Sasaran	Strategi	Kode Program			Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
			Uru san	B/U rus an	Prog ram			2023		2024		2025		2026		2026			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
S23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pengaplikasian teknologi e-government	2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		700,000,000		707,000,000		714,070,000		721,210,700		2,142,280,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

VII.1 Program Perangkat Daerah

Rencana Program Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada tabel sebagai berikut. (Terlampir)

Tabel VII.1 Rencana Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN														
1:01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100	93,698,819,727	100	94,635,807,924	100	95,582,166,004	100	96,537,987,664	100	286,755,961,591	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA
1.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	100	10,387,616,404	100	10,491,492,568	100	10,596,407,494	100	10,702,371,569	100	31,790,271,630	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	17,353,810,250	100	17,527,348,353	100	17,702,621,836	100	17,879,648,054	100	53,109,618,243	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA
1.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemberian perizinan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA
1.01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		100	3,000,000,000	100	3,030,000,000	100	3,060,300,000	100	3,090,903,000	100	9,181,203,000	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA

Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	12,354,620,000	100	12,478,166,200	100	12,602,947,862	100	12,728,977,341	100	37,810,091,403	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA
1.02	URUSAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	102,444,190,735	100	103,468,632,642	100	104,503,318,969	100	105,548,352,158	100	313,520,303,770	DINAS KESEHATAN	PAPUA
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	196,872,423,432	100	198,841,147,666	100	200,829,559,143	100	202,837,854,734	100	602,508,561,544	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	PAPUA
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	100	89,729,244,604	100	90,626,537,050	100	91,532,802,421	100	92,448,130,445	100	274,607,469,915	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	PAPUA
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat		36,674,420,000		37,041,164,200		37,411,575,842		37,785,691,600		112,238,431,642	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung	Lokasi

				2023		2024		2025		2026		2026		ngJawab	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.02 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100	31,570,873,870	100	31,886,582,609	100	32,205,448,435	100	32,527,502,919	100	96,619,533,963	DINAS KESEHATAN	PAPUA
1.02 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100	20,039,163,200	100	20,239,554,832	100	20,441,950,380	100	20,646,369,884	100	61,327,875,096	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	PAPUA
1.02 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100	7,800,000,000	100	7,878,000,000	100	7,956,780,000	100	8,036,347,800	100	23,871,127,800	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	PAPUA
1.02 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100	9,500,000,000	100	9,595,000,000	100	9,690,950,000	100	9,787,859,500	100	29,073,809,500	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	PAPUA
1.02 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/minuman	100	1,588,993,265	100	1,604,883,198	100	1,620,932,030	100	1,637,141,350	100	4,862,956,577	DINAS KESEHATAN	PAPUA
1.02 .05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	100	2,391,503,000	100	2,415,418,030	100	2,439,572,210	100	2,463,967,932	100	7,318,958,173	DINAS KESEHATAN	PAPUA
1.02 .07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan yang telah di akreditasi	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS KESEHATAN	PAPUA
x.xx .02	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	56,097,498,480	100	56,658,473,465	100	57,225,058,199	100	57,797,308,781	100	171,680,840,446	DINAS KESEHATAN	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung	Lokasi

				2023		2024		2025		2026		2026		ngJawab	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	129,558,676,648	100	130,854,263,414	100	132,162,806,049	100	133,484,434,109	100	396,501,503,572	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	PAPUA
x.xx .00	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,875,410,636	100	98,854,164,742	100	99,842,706,390	100	100,841,133,454	100	299,538,004,586	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	PAPUA
x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	43,125,727,663	100	43,556,984,940	100	43,992,554,789	100	44,432,480,337	100	131,982,020,066	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA	PAPUA
1.03	URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	100	16,882,785,000	100	17,051,612,850	100	17,222,128,979	100	17,394,350,268	100	51,668,092,097	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.03 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak	100	82,587,228,685	100	83,413,100,972	100	84,247,231,982	100	85,089,704,301	100	252,750,037,255	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2026				

				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.03 .05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.03 .08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	100	10,000,000,000	100	10,100,000,000	100	10,201,000,000	100	10,303,010,000	100	30,604,010,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.03 .10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	100	510,000,000,000	100	515,100,000,000	100	520,251,000,000	100	525,453,510,000	100	1,560,804,510,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.03 .11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	100	7,900,000,000	100	7,979,000,000	100	8,058,790,000	100	8,139,377,900	100	24,177,167,900	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.03 .12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	100	700,000,000	100	707,000,000	100	714,070,000	100	721,210,700	100	2,142,280,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA

x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75,000,000,000	100	75,750,000,000	100	76,507,500,000	100	77,272,575,000	100	229,530,075,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.04	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	% %	5,000,000,000		5,050,000,000		5,100,500,000		5,151,505,000		15,302,005,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.04 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani		750,000,000		757,500,000		765,075,000		772,725,750		2,295,300,750	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
1.04 .05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang dilayani PSU		20,000,000,000		20,200,000,000		20,402,000,000		20,606,020,000		61,208,020,000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
				2023	2024	2025	2026	2026							

				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.05	URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	1,800,000,000	100	1,818,000,000	100	1,836,180,000	100	1,854,541,800	100	5,508,721,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	PAPUA
1.05 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian penanggulangan bencana	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	PAPUA
1.05 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	350,000,000	100	353,500,000	100	357,035,000	100	360,605,350	100	1,071,140,350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	PAPUA
x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	47,227,492,970	100	47,699,767,900	100	48,176,765,579	100	48,658,533,234	100	144,535,066,713	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

1.06	URUSAN BIDANG SOSIAL														
1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas		800,000,000		808,000,000		816,080,000		824,240,800		2,448,320,800	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
1.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	3,200,000,000	100	3,232,000,000	100	3,264,320,000	100	3,296,963,200	100	9,793,283,200	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	900,000,000	100	909,000,000	100	918,090,000	100	927,270,900	100	2,754,360,900	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
1.06.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial		1,200,000,000		1,212,000,000		1,224,120,000		1,236,361,200		3,672,481,200	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	48,256,032,95 6	100	48,738,593, 286	100	49,225,979,218	100	49,718,239, 011	100	147,682,81 1,515	DINAS SOSIAL KEPENDUD UKAN PEMBERDAY AAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK	PAPUA
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
2.07	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA														
2.07 .02	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	1,300,000,000	100	1,313,000,0 00	100	1,326,130,000	100	1,339,391,3 00	100	3,978,521, 300	DINAS PERINDUST RIAN PERDAGAN GAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.07 .03	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	1,500,000,000	100	1,515,000,0 00	100	1,530,150,000	100	1,545,451,5 00	100	4,590,601, 500	DINAS PERINDUST RIAN PERDAGAN GAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.07.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.07.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.07.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2:08	URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														

2.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	100	48,256,032,956	100	48,738,593,286	100	49,225,979,218	100	49,718,239,011	100	147,682,811,515	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
2.08.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan Anak	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
2.08.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.08.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan	100	600,000,000	100	606,000,000	100	612,060,000	100	618,180,600	100	1,836,240,600	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN	PAPUA

			pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi												GAN ANAK	
2.08.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pengaduan	100	400,000,000	100	404,000,000	100	408,040,000	100	412,120,400	100	1,224,160,400	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA	
2.09	URUSAN BIDANG PANGAN															
2.09.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan	50	1,000,000,000	50	1,010,000,000	50	1,020,100,000	50	1,030,301,000	50	3,060,401,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA	
2.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan Pangan	100	11,000,000,000	100	11,110,000,000	100	11,221,100,000	100	11,333,311,000	100	33,664,411,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA	
2.09.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA	
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
				2023		2024		2025		2026		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2.09.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	100	2,250,000,000	100	2,272,500,000	100	2,295,225,000	100	2,318,177,250	100	6,885,902,250	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA	
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,256,764,400	100	97,219,332,044	100	98,191,525,364	100	99,173,440,618	100	294,584,298,027	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA	

		DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2.11 .06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		894,347,725		903,291,202		912,324,114		921,447,355		2,737,062,672	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
2.11 .07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Adat, kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11 .08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11 .09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	800,000,000	100	808,000,000	100	816,080,000	100	824,240,800	100	2,448,320,800	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.11.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota		900,000,000		909,000,000		918,090,000		927,270,900		2,754,360,900	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	133,583,062,485	100	134,918,893,110	100	136,268,082,041	100	137,630,762,861	100	408,817,738,012	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.12	URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2.12.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
2.12.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	1,100,000,000	100	1,111,000,000	100	1,122,110,000	100	1,133,331,100	100	3,366,441,100	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.12.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	100	1,750,000,000	100	1,767,500,000	100	1,785,175,000	100	1,803,026,750	100	5,355,701,750	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
2.12.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100	160,000,000	100	161,600,000	100	163,216,000	100	164,848,160	100	489,664,160	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PAPUA
2.13 URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
2.13.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerjasama pemerintah desa yang difasilitasi	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
2.13.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan diawasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan an kampung	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.13.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100	7,000,000,000	100	7,070,000,000	100	7,140,700,000	100	7,212,107,000	100	21,422,807,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
2.13.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah kampung	100	7,400,000,000	100	7,474,000,000	100	7,548,740,000	100	7,624,227,400	100	22,646,967,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
2.13.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Persentase tingkat kesejahteraan orang asli Pspua	100	37,000,000,000	100	37,370,000,000	100	37,743,700,000	100	38,121,137,000	100	113,234,837,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	11,551,787,900	100	11,667,305,779	100	11,783,978,837	100	11,901,818,625	100	35,353,103,241	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA	PAPUA
2.15	URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS PERHUBUNGAN	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.15.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton) Jumlah penumpang (keberangkatan/ke datangan) angkutan laut	100	13,200,000,000	100	13,332,000,000	100	13,465,320,000	100	13,599,973,200	100	40,397,293,200	DINAS PERHUBUNGAN	PAPUA
2.15.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah arus penumpang angkutan udara	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS PERHUBUNGAN	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15,000,000,000	100	15,150,000,000	100	15,301,500,000	100	15,454,515,000	100	45,906,015,000	DINAS PERHUBUNGAN	PAPUA
2.16	URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik terbuka	100	10,000,000,000	100	10,100,000,000	100	10,201,000,000	100	10,303,010,000	100	30,604,010,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA
2.16.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	700,000,000	100	707,000,000	100	714,070,000	100	721,210,700	100	2,142,280,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	8,000,000,000	100	8,080,000,000	100	8,160,800,000	100	8,242,408,000	100	24,483,208,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA
2.17	URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.17.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi binaan provinsi	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-Undangan Persentase koperasi aktif	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	100	450,000,000	100	454,500,000	100	459,045,000	100	463,635,450	100	1,377,180,450	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.17.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100	3,700,000,000	100	3,737,000,000	100	3,774,370,000	100	3,812,113,700	100	11,323,483,700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	100	400,000,000	100	404,000,000	100	408,040,000	100	412,120,400	100	1,224,160,400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & TENAGA KERJA	PAPUA
2.17.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI		100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

2.18 URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2.18.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		100	800,000,000		808,000,000	100	816,080,000	100	824,240,800	100	2,448,320,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA		
2.18.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	100	2,500,000,000		2,525,000,000	100	2,550,250,000	100	2,575,752,500	100	7,651,002,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA		
2.18.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perijinan & non perijinan yang di keluarkan pertahun	100	1,600,000,000		1,616,000,000	100	1,632,160,000	100	1,648,481,600	100	4,896,641,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA		
2.18.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	100	1,200,000,000	100	1,212,000,000	100	1,224,120,000	100	1,236,361,200	100	3,672,481,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA		
2.18.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	100	400,000,000	100	404,000,000	100	408,040,000	100	412,120,400	100	1,224,160,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA		
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				

2.18.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL		100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,000,000,000	100	13,130,000,000	100	13,261,300,000	100	13,393,913,000	100	39,785,213,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PAPUA
2.19	URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan organisasi kepemudaan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100	900,000,000	100	909,000,000	100	918,090,000	100	927,270,900	100	2,754,360,900	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	PAPUA
2.19.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang mendapat pengembangan	100	2,700,000,000	100	2,727,000,000	100	2,754,270,000	100	2,781,812,700	100	8,263,082,700	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	PAPUA
2.19.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan SDM Kepramukaan Provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	11,700,000,000	100	11,817,000,000	100	11,935,170,000	100	12,054,521,700	100	35,806,691,700	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.20	URUSAN BIDANG STATISTIK														

2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA		
2.21	URUSAN BIDANG PERSANDIAN																
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase penyelenggaraan pelayanan persandian	100	100,000,000	100	101,000,000	100	102,010,000	100	103,030,100	100	306,040,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PAPUA		
2.22	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna	100	3,000,000,000	100	3,030,000,000	100	3,060,300,000	100	3,090,903,000	100	9,181,203,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA		
2.22.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan seni budaya OAP guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	100	2,000,000,000	100	2,020,000,000	100	2,040,200,000	100	2,060,602,000	100	6,120,802,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA		
2.22.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		100	2,900,000,000	100	2,929,000,000	100	2,958,290,000	100	2,987,872,900	100	8,875,162,900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA		
2.22.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	100	1,600,000,000	100	1,616,000,000	100	1,632,160,000	100	1,648,481,600	100	4,896,641,600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA		
2.22.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Penetapan kebijakan dan perencanaan strategis Permuseuman	100	6,800,000,000	100	6,868,000,000	100	6,936,680,000	100	7,006,046,800	100	20,810,726,800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA		
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15,000,000,000	100	15,150,000,000	100	15,301,500,000	100	15,454,515,000	100	45,906,015,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA
2.23	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2.23 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis	100	5,491,900,000	100	5,546,819,000	100	5,602,287,190	100	5,658,310,062	100	16,807,416,252	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2.23 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Inventarisasi dan dokumentasi naskah kuno	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2.23 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Persentase Penetapan standar akreditasi perpustakaan	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2.24	URUSAN BIDANG KEARSIPAN														
2.24 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Penetapan kebijakan dan prosedur	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2.24 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Indeks Identifikasi dan evaluasi risiko	100	2,000,000,000	100	2,020,000,000	100	2,040,200,000	100	2,060,602,000	100	6,120,802,000	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.24 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Indeks Pengajuan permohonan izin	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

2.24.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Indeks Pemberian sertifikat atau akreditasi	100	250,000,000	100	252,500,000	100	255,025,000	100	257,575,250	100	765,100,250	DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3	URUSAN PILIHAN														
3.25	URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Indeks Pemetaan dan pemantauan ekosistem	100	2,500,000,000	100	2,525,000,000	100	2,550,250,000	100	2,575,752,500	100	7,651,002,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
3.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indeks penetapan kebijakan dan regulasi	100	4,000,000,000	100	4,040,000,000	100	4,080,400,000	100	4,121,204,000	100	12,241,604,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
3.25.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Laut	12.000	6,200,000,000	13.000	6,262,000,000	14.000	6,324,620,000	15.000	6,387,866,200	15.000	18,974,486,200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tambak	1.000	6,200,000,000	1.200	6,262,000,000	1.300	6,324,620,000	1.400	6,387,866,200	1.400	18,974,486,200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
3.25.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Indeks pengembangan kebijakan dan peraturan	1000	6,200,000,000	1.200	6,262,000,000	1.300	6,324,620,000	1.400	6,387,866,200	1.400	18,974,486,200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.25.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Indeks Peningkatan infrastruktur pengolahan	100	4,000,000,000	100	4,040,000,000	100	4,080,400,000	100	4,121,204,000	100	12,241,604,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA

x.xx .01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	12,190,000,000	100	12,311,900,000	100	12,435,019,000	100	12,559,369,190	100	37,306,288,190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAPUA
3.26	URUSAN BIDANG PARIWISATA														
3.26 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan infrastruktur pariwisata	100	6,000,000,000	100	6,060,000,000	100	6,120,600,000	100	6,181,806,000	100	18,362,406,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA
3.26 .03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran pariwisata	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA
3.26 .04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Indeks Peningkatan inovasi dan kreativitas	100	1,400,000,000	100	1,414,000,000	100	1,428,140,000	100	1,442,421,400	100	4,284,561,400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA
3.26 .05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Peningkatan kunjungan wisatawan	100	2,100,000,000	100	2,121,000,000	100	2,142,210,000	100	2,163,632,100	100	6,426,842,100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.27	URUSAN BIDANG PERTANIAN														
3.27 .02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan aksesibilitas	100	6,300,000,000	100	6,363,000,000	100	6,426,630,000	100	6,490,896,300	100	19,280,526,300	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA

3.27.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi pertanian	100	9,000,000,000	100	9,090,000,000	100	9,180,900,000	100	9,272,709,000	100	27,543,609,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA
3.27.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Pengendalian kesehatan Hewan	100	2,100,000,000	100	2,121,000,000	100	2,142,210,000	100	2,163,632,100	100	6,426,842,100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA
3.27.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Indeks Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	3,000,000,000	100	3,030,000,000	100	3,060,300,000	100	3,090,903,000	100	9,181,203,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA
3.27.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang dizinkan	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA
3.27.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Penyuluhan Pertanian	30	5,500,000,000		5,555,000,000	100	5,610,550,000	100	5,666,655,500	100	16,832,205,500	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PAPUA
3.28	URUSAN BIDANG KEHUTANAN														
3.28.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	Persentase Perencanaan Hutan	100	10,000,000,000	100	10,100,000,000	100	10,201,000,000	100	10,303,010,000	100	30,604,010,000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
3.28.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Pengelolaan Hutan	100	37,000,000,000	100	37,370,000,000	100	37,743,700,000	100	38,121,137,000	100	113,234,837,000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.28.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dikonservasi	100	7,100,000,000	100	7,171,000,000	100	7,242,710,000	100	7,315,137,100	100	21,728,847,100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA

3.28.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	100	2,250,000,000	100	2,272,500,000	100	2,295,225,000	100	2,318,177,250	100	6,885,902,250	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
3.28.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Penetapan dan perlindungan hutan lindung	100	50,000,000,000	100	50,500,000,000	100	51,005,000,000	100	51,515,050,000	100	153,020,050,000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
3.28.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	Persentase Pemetaan dan identifikasi hutan adat	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PAPUA
3.29	URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3.29.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Indeks Penyediaan data geologis	100	2,100,000,000		2,121,000,000	100	2,142,210,000	100	2,163,632,100	100	6,426,842,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA
3.29.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Indeks Kepatuhan terhadap Perasturan Lingkungan	100	600,000,000	100	606,000,000	100	612,060,000	100	618,180,600	100	1,836,240,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.29.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas energi terbarukan yang terpasang	150	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA

3.29.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Tingkat Ketersediaan Listrik	100	16,500,000,000	100	16,665,000,000	100	16,831,650,000	100	16,999,966,500	100	50,496,616,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelaksanaan penunjang Urusan pemerintahan	100	20,500,000,000	100	20,705,000,000	100	20,912,050,000	100	21,121,170,500	100	62,738,220,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PAPUA
3.30	URUSAN BIDANG PERDAGANGAN														
3.30.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Infrastruktur Distribusi	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.30.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks Stabilitas Harga	100	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.30.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai Ekspor	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA

3.30.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tingkat Kepatuhan pelaku Usaha	100	1,050,000,000	100	1,060,500,000	100	1,071,105,000	100	1,081,816,050	100	3,213,421,050	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.30.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan pangsa pasar produk dalam negeri	100	750,000,000	100	757,500,000	100	765,075,000	100	772,725,750	100	2,295,300,750	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	23,700,000,000		23,937,000,000	100	24,176,370,000	100	24,418,133,700	100	72,531,503,700	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.31	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri	100	2,000,000,000	100	2,020,000,000	100	2,040,200,000	100	2,060,602,000	100	6,120,802,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.31.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin Usaha Yang diberikan	500	1,000,000,000	100	1,010,000,000	100	1,020,100,000	100	1,030,301,000	100	3,060,401,000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA

3.31.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Indeks Sistem Informasi industri Nasional	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.32 URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3.32.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang direncanakan	100	300,000,000	100	303,000,000	100	306,030,000	100	309,090,300	100	918,120,300	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.32.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Kawasan Transmigrasi yang dibangun	100	500,000,000	100	505,000,000	100	510,050,000	100	515,150,500	100	1,530,200,500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
3.32.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Kawasan Transmigrasi yang dikembangkamn	100	400,000,000	100	404,000,000	100	408,040,000	100	412,120,400	100	1,224,160,400	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PAPUA
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01 URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH															
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Penataan Organisasi	36	1,000,000,000	36	1,010,000,000	36	1,020,100,000	36	1,030,301,000	108	3,060,401,000	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	PAPUA
4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Penataan Organisasi	36	13,477,000,000	36	13,611,770,000	36	13,747,887,700	36	13,885,366,577	108	41,245,024,277	BIRO ORGANISASI	PAPUA

4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Indeks Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi khusus papua	100	4,500,000,000	100	4,545,000,000	100	4,590,450,000	100	4,636,354,500	100	13,771,804,500	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	PAPUA
4.01.05	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Hukum	100	13,400,000,000	100	13,534,000,000	100	13,669,340,000	100	13,806,033,400	100	41,009,373,400	BIRO HUKUM	PAPUA
4.01.07	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kebijakan dan pelayanan Barang dan Jasa	100	7,200,000,000	100	7,272,000,000	100	7,344,720,000	100	7,418,167,200	100	22,034,887,200	BIRO LAYANAN BARANG DAN JASA	PAPUA
4.01.09	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	Indeks Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi khusus papua	100	5,000,000,000	100	5,050,000,000	100	5,100,500,000	100	5,151,505,000	100	15,302,005,000	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	PAPUA
x.xx.01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120,000,000,000	100	121,200,000,000	100	122,412,000,000	100	123,636,120,000	100	367,248,120,000	SEKRETARIAT DAERAH	PAPUA
x.xx.02	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48,256,032,957	100	48,738,593,287	100	49,225,979,219	100	49,718,239,012	100	147,682,811,518	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	PAPUA
x.xx.03	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11,600,000,000	100	11,716,000,000	100	11,833,160,000	100	11,951,491,600	100	35,500,651,600	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
x.xx.04	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,500,000,000	100	6,565,000,000	100	6,630,650,000	100	6,696,956,500	100	19,892,606,500	BIRO ORGANISASI	PAPUA

x.xx .05	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12,700,000,000	100	12,827,000,000	100	12,955,270,000	100	13,084,822,700	100	38,867,092,700	BIRO HUKUM	PAPUA
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	14,500,000,000	100	14,645,000,000	100	14,791,450,000	100	14,939,364,500	100	44,375,814,500	BIRO LAYANAN BARANG DAN JASA	PAPUA
4.02	URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DPRD														
4.02 .02	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	82,900,000,000	100	83,729,000,000	100	84,566,290,000	100	85,411,952,900	100	253,707,242,900	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	PAPUA
4.02 .03	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	Persentase Pelaksanaan Kesekretariatan DPRD	100	70,000,000,000	100	70,700,000,000	100	71,407,000,000	100	72,121,070,000	100	214,228,070,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	PAPUA
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	130,000,000,000	100	131,300,000,000	100	132,613,000,000	100	133,939,130,000	100	397,852,130,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	PAPUA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01	URUSAN BIDANG PERENCANAAN														
5.01 .02	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan	100	12,000,000,000	100	12,120,000,000	100	12,241,200,000	100	12,363,612,000	100	36,724,812,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.01 .03	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Indeks Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	100	13,000,000,000	100	13,130,000,000	100	13,261,300,000	100	13,393,913,000	100	39,785,213,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA

		DAERAH															
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	19,000,000,000	100	19,190,000,000	100	19,381,900,000	100	19,575,719,000	100	58,147,619,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA		
5.02	URUSAN BIDANG KEUANGAN																
5.02 .02	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100	727,500,000,000	100	734,775,000,000	100	742,122,750,000	100	749,543,977,500	100	2,226,441,727,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA		
5.02 .03	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah	100	2,400,000,000	100	2,424,000,000	100	2,448,240,000	100	2,472,722,400	100	7,344,962,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA		
5.02 .04	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	53,500,000,000	100	54,035,000,000	100	54,575,350,000	100	55,121,103,500	100	163,731,453,500	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	PAPUA		
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	49,400,000,000	100	49,894,000,000	100	50,392,940,000	100	50,896,869,400	100	151,183,809,400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH	PAPUA		
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	53,500,000,000	100	54,035,000,000	100	54,575,350,000	100	55,121,103,500	100	163,731,453,500	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	PAPUA		
5.03	URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN																
5.03 .02	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	indeks Kepgawain Daerah	100	18,000,000,000	100	18,180,000,000	100	18,361,800,000	100	18,545,418,000	100	55,087,218,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PAPUA		
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				

x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	21,100,000,000	100	21,311,000,000	100	21,524,110,000	100	21,739,351,100	100	64,574,461,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PAPUA
5.04	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5.04 .02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Sumber daya Manusia yang dikembangkan	100	40,000,000,000	100	40,400,000,000	100	40,804,000,000	100	41,212,040,000	100	122,416,040,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PAPUA
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	11,500,000,000	100	11,615,000,000	100	11,731,150,000	100	11,848,461,500	100	35,194,611,500	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PAPUA
5.05	URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5.05 .02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	3,000,000,000	100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAPUA
5.06	URUSAN BIDANG PERBATASAN														
5.06 .02	PENGELOLAAN PERBATASAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Indeks Pengelolaan Perbatasan	100	10,500,000,000	100	10,605,000,000	100	10,711,050,000	100	10,818,160,500	100	32,134,210,500	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJA SAMA	PAPUA
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	10,400,000,000	100	10,504,000,000	100	10,609,040,000	100	10,715,130,400	100	31,828,170,400	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJA SAMA	PAPUA
5.07	URUSAN BIDANG PENGHUBUNG														
5.07 .02	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan	100	2,700,000,000	100	2,727,000,000	100	2,754,270,000	100	2,781,812,700	100	8,263,082,700	BADAN PENGHUBUNG	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,300,000,000	100	13,433,000,000	100	13,567,330,000	100	13,703,003,300	100	40,703,333,300	BADAN PENGHUBUN G	PAPUA
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01	URUSAN BIDANG INSPEKTORAT DAERAH														
6.01 .02	INSPEKTORA T DAERAH	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Indeks penyelenggaraan pengawasan	100	16,000,000,000	100	16,160,000,000	100	16,321,600,000	100	16,484,816,000	100	48,966,416,000	INSPEKTOR AT	PAPUA
6.01 .03	INSPEKTORA T DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah kebijakan yang didampingi/asisten si	30	10,000,000,000	100	10,100,000,000	100	10,201,000,000	100	10,303,010,000	100	30,604,010,000	INSPEKTOR AT	PAPUA
x.xx .06	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,800,000,000	100	13,938,000,000	100	14,077,380,000	100	14,218,153,800	100	42,233,533,800	INSPEKTOR AT	PAPUA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.01	URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8.01 .02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks pelaksanaan Penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	2,100,000,000	100	2,121,000,000	100	2,142,210,000	100	2,163,632,100	100	6,426,842,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
8.01 .03	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks peranan partai politik dan lembaga dalam pengembangan etika serta budaya politik	100	4,000,000,000	100	4,040,000,000	100	4,080,400,000	100	4,121,204,000	100	12,241,604,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
Kode	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD PenanggungJawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

8.01 . 04	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang di berdayakan dan diawasi	100	800,000,000	100	808,000,000	100	816,080,000	100	824,240,800	100	2,448,320,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
8.01 . 05	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	3,978,521,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
8.01 . 06	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Peningkatan kewaspadaan kualitas dan fasilitas konflik sosial	50	2,400,000,000	100	2,424,000,000	100	2,448,240,000	100	2,472,722,400	100	7,344,962,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
x.xx . 01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,500,000,000	100	13,635,000,000	100	13,771,350,000	100	13,909,063,500	100	41,315,413,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAPUA
9	UNSUR KEKHUSUSAN														
9.02	UNSUR KHUSUSAN PAPUA														
9.02 . 02	KEKHUSUSAN PAPUA	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Persentase Peningkatan Layanan Lembaga MRP	100	33,900,000,000	100	34,239,000,000	100	34,581,390,000	100	34,927,203,900	100	103,747,593,900	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	PAPUA
x.xx . 01	Bidang Lintas Urusan (Rutin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	9,100,000,000	100	9,191,000,000	100	9,282,910,000	100	9,375,739,100	100	27,849,649,100	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	PAPUA

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

VIII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026. Berikut masing-masing indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Tabel VIII.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.21	8.42	8.63	8.84	8.84
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.0	13.23	14.48	15.69	15.69
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.0	80.8	81.6	82.4	
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.6	70.4	71.2	72	72
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	100	15	30	50	50
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	75.0	76.2	77.4	78.6	78.6
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kab/Kota	7.0	7	7	6	6
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7600.0	7610	7620	7630	7630
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.7	78.68	79.68	80.68	80.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokras	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0	95	95.96	96	96
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0	50	50	51	51
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0	60	60	61	61

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	Persen	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB	BB	BB	BB	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government	persen	95	95	95	95	Regulasi yang berubah
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPDP terhadap RPD	persen	100	95	95	95	Regulasi yang berubah
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPDP	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
		10.3	Tingkat Konsistensi RKPDP terhadap RAP	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	13.30	14.27	15.24	16.21	16.21
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	persen	66.00	66.1	66.2	66.3	66.3
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	95.0	95	95	95	95
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	80.0	80	80	80	80

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
	aksimitigasi perubahan iklim	13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	85.0	85	85	85	85
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	63160.5				
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	12.00	12.1	12.2	12.3	12.3
		14.2	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	STC per tahun	20	40	20	20	20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	98.34	91.62	91.7	91.78	91.78
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93				
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	55.00	60.00	65.00	70.00	70
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	50.00	50	50	50	50
19	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	81	82	83	83

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
20	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	41	42	43	43
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	45.25	45.5	45.75	46	46
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Kampung Membangun	indeks	52.00	52	52.5	52.5	52.5
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00	73.5	74	74.5	74.5
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.05	12.1	12.15	12.15
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.00	68.8	69.6	70.4	70.4
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.00	14.1	14.2	14.2	14.2
24	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	50	60	70	80	80
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	50	60	70	80	80
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	tinggi	sedang	rendah	rendah	rendah
26	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.00	80.1	80.2	80.3	80.3
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.00	65.1	65.2	65.3	65.3

VIII.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah menjelaskan pencapaian masing-masing urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Papua, dengan mempertimbangkan aspek kekhususan Provinsi Papua.

Tabel. VIII.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	Persen	85.00	86.87	88.74	90.61	90.61	
1.3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95	95	97	100	100	
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	Persen	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	Persen	50.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	70.00	52.82	56.64	58.48	58.48	
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	Jumlah Kab/Kota	7	8	9	9	9	
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	6.20	6.44	6.68	6.92	6.92	
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp. Ribu per kapita	1400	14.00	15.00	15.00	15.00	
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	B	B	B	A	A	
1.13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B	B	B	A	A	
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	A	A	A	A	A	
1.15	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari	300	350	400	450	450	
1.16	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	Nilai Indeks	75	75	80	80	80	
1.17	Tingkat Kerentanan Sosial	Kategori	Rendah					
Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan							
1.1	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	60.00	63.15	66.15	69.03	69.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.2	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	100	100	100	100	100	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	85.00	85.77	86.54	87.31	87.31	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	60.00	63.87	67.74	71.61		
2.	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	4.00	4.00	4.00	3.00		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	5.50	5.20	4.90	4.60		
3.	Pangan							
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	51.00	53.72	56.44	59.16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	30.00	35.30	40.25	45.00		
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	60.00	60.40	60.75	60.90		
4.	Ketenagakerjaan							
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2.00	2.40	2.70	4.00		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	80.00	80.30	80.75	80.99		
5.	Pemberdayaan							
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	25.00	26.00	27.00	28.00		Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	60.00	60.30	60.60	60.90	Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.47	0.45	0.442	0.434	
6.	Seni Budaya dan Olahraga						
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	60.00	60.00	60.00	60.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	1	1	1	
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	5	5	5	5	
6.4	Indeks Pembangunan Olahraga	Tingkatan Status	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	105.00	105.00	105.00	105.00	
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	2.46	2.47	2.47	2.47	
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	13.12	13.13	13.14	13.15	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.00	90.05	90.1	90.15		
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	65	66	67	68		
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3.50	3.51	3.52	3.53		
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	3.00	3.1	3.2	3.3		
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	4	4	5	5		
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	60.00	61	61	61		
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	4000	4010	4020	4030		
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	Perhubungan							
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	93.10	93.2	93.3	93.4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.	Listrik Dan Air Bersih							
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	45.00	45	45	46		Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	40.1	40.2	40.3		
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu juta	100.00	99	98	97		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.	Lingkungan Hidup						
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	25.00	24	23	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Urusan Pilihan Kehutanan
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.282				
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	85.03	85.04	85.05	85.06	
3.4	Persentase penerapan <i>green economy</i>	persen	70.00	70.5	71	71.5	
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ Rp	63160.49				
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	80	80	81	
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen	60.00	61	62	63	
4.	Informasi dan Komunikasi						
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori	B	B	B	B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	60	61	62	63	
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	10	11	12	13	
5.	Iklm Berinvestasi						
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	147	145	143	141	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	63.08	63.09	63.1	63.11	
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	4	5	6	
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	20	20	20	15	
5.5	ICOR	nilai	3.21	3.22	3.23	3.24	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	200.00	198	196	194		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, Urusan Pilihan Perdagangan
1. Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.1. Pendidikan								Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.25	0.21	0.17	0.13	0.13	
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.00	0.97	0.94	0.91	0.91	
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.41	34.82	35.23	35.23	
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.43	34.86	35.29	35.29	
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	25.00	26.4	26.28	26.42	26.42	
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	25.00	26.61	27.22	27.88	27.88	
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	200.00	204.3	208.8	213.6	213.6	
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	200.00	203.3	206.6	209.9	209.9	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	100.00	100	100	100	100	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	100.00	100	100	100	100	
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0.50	0.40	0.30	0.20	0.20	
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA dengan kondisi bangunan baik	persen	39.99	40.00	40.90	41.80	41.80	
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/ kejuruan	murid per guru	25.00	25.90	26.80	27.70	27.70	
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	200.00	199.10	198.20	189.20	189.20	
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	80.00	80.00	80.50	95.50	95.50	
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	persen	95.00	95.11	96.32	97.18	97.18	
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	448	465				
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	75.00	75.50	76.00	76.50	76.50	
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.15	81.05	81.35	81.35	
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	85.00	85.00	85.13	86.32	86.32	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	83.00	84.13	85.32	87.00	87.00	
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	84.00	85.45	86.25	90.00	90.00	
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	70.00	70.43	71.33	72.00	72.00	
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	56.00	56.31	56.50	70.00	70.00	
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	20.00	25.00	30.00	30.50	30.50	
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	5	5	6	6	22	
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	56.00	56.20	57.10	58.00	58.00	
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	56.00	56.00	55.10	54.20	54.20	
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	95.00	95.41	95.82	96.23	96.23	
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	70.00	70.30	70.60	70.90	70.90	
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	65.00	65.28	65.56	65.84	65.84	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	25.00	26.20	27.40	28.70	28.70	
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	250	250	250	250	750	
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	1500	1500	1515	1625	1625	
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	10	10	10	10	30	
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	10.00	11.23	12.58	13.25	13.25	
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	20.00	21.90	23.8	25.7	25.7	
1.1.38	APM Pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.2.	Kesehatan							
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	30.00	31.30	40.30	41.20		
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	10.62	12.12	14.02	15.92		
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100,000 penduduk	150.00	150.90	151.40	152.30		
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	70.00	70.00	75.00	80.00		
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	40.00	45.00	50.00	55.00		
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	89.66	90.56	92.46	93.36		
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
	berkualitas						
1.2.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	45.00	45.95	46.80	47.30	
1.2.9	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	41.38	42.57	51.57	60.57	
1.2.10	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	92	95	98	100	385
1.2.11	Persentase PAK yang diawasi	persen	100	90	95	100	100
1.2.12	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00
1.2.13	API Malaria	persen	25.64	25.54	24.60	23.70	23.70
1.2.14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	32.64	31.74	30.84	29.95	29.95
1.2.15	Tingkat prevalensi DBD	persen	60.74	59.84	50.84	49.94	49.94
1.2.16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	30.57	29.67	28.77	27.87	27.87
1.2.17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1000 penduduk	9.00	8.90	8.00	7.10	7.10
1.2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1000 penduduk	34.18	26.33	22.78	21.94	21.94
1.2.19	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00
1.2.20	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	100.00				
1.2.21	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra	kabupaten/kota	16.00				
1.2.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.2.23	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	5.00	5.30	5.61	60.00	60.00	
1.2.24	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	150.00	135.00	121.5	109.35	109.35	
1.2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	60.00	54.00	48.60	43.74	43.74	
1.2.26	Cakupan pelayanan nifas	persen	45.00	45.90	46.81	47.69	47.69	
1.2.27	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	65.00	65.47	70.23	70.56	70.56	
1.2.28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	25.00	22.50	20.25	18.22	18.22	
1.2.29	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.65	0.58	0.52	0.47	0.47	
1.2.30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	
1.2.31	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	4.00	3.60	3.24	2.91	2.91	
1.2.32	Rasio posyandu yang aktif	persen	70.00	70.91	71.86	80.86		
1.2.33	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	52.00	61.00	61.90	70.90		
1.2.34	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	52.00	52.90	61.90	62.80		
1.2.35	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2300.00	2267.00	2236.00	2204.00		
1.2.36	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	50.00	51.90	52.02	65.54		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	70.00	75.05	80.12	81.02	
1.2.38	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	27.00				
1.2.39	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan	unit	8.00	5.00	5.00	5.00	
1.2.40	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	29.10	29.10	29.10	29.10	30.00
1.2.41	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.50	5.40	6.30	6.81	
1.2.42	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	30.25	31.15	32.05	32.95	
1.2.43	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.20	1.22	1.25	1.28	
1.2.44	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
1.2.45	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
1.2.46	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
1.2.47	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	2.00	100	100	200	400
1.2.48	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	60.00	61.12	62.62	63.92	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.2.49	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	40.00	40.91	42.83	44.70		
1.2.50	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
1.2.52	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	61.12	64.30	68.53	68.53	
1.2.53	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	45.00	45.50	46.40	47.72	47.72	
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	59.53	60.42	61.33	61.33	
1.2.56	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
1.2.57	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	73.00	75.10	77.30	79.50	79.50	
1.2.58	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
1.2.59	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00	
1.2.60	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	40.00	40.00	41.56	47.12		
1.2.61	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	45.25	47.23	49.25	51.75		
1.2.62	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)	-	100	100	100	100		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.2.63	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)	-	100	100	100	100	
1.2.65	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100
1.2.66	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang						
1.3.1.	Pekerjaan Umum						
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	5000	-	-	-	-
1.3.1.2.	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	95	-	-	-	-
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	60.00	-	-	-	-
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi	20				
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	80	-	-	-	-
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	30	30	30	30	30
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500	500	500	500	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	50	50	50	50		
1.3.1.1 0	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	km	60	60	60	60		
1.3.1.1 1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	meq	30	30	30	30		
1.3.1.1 2	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	persen	30	30	30	30		
1.3.1.1 3	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	80	80	80	80		
1.3.1.1 4	Cakupan keterlayanan air baku	persen	50	50	50	50		
1.3.1.1 5	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	50.00	50.00	50.00	50.00		
1.3.1.1 6	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	80.00	80.00	80.00	80.00		
1.3.1.1 7	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	50.00	50.00	50.00	50.00		
1.3.1.1 8	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
1.3.1.1 9	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	
1.3.2.	Penata Ruang							
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	100	100	100	100	100	
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100	100	100	100	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	80.00	85.00	90.00	95.00		100
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	persen	3000	3000	3000	3000		3000
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	50.00	55.00	60.00	65.00		70.00
1.4.4	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	380	440	510	570		570
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100		100
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100		100
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	2.00	1.80	1.62	1.45		
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	20.00					
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	1.20					
1.5.5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	65.00	78.00	78.00	78.00		78.00

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.5.6	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	78.00	85.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.7	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.8	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.5.9	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	
1.5.10	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2	2	2	2	8	
1.5.11	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250	250	250	250	1000	
1.5.12	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali	5	5	5	5	20	
1.5.13	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
1.5.14	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.5.15	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
1.5.16	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
1.5.17	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	95	-	-	-	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.5.18	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
1.5.19	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2	2	2	2	8	
1.5.20	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	80					
1.5.21	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2	2	2	2	8	
1.5.22	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	100					
1.5.23	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	100					
1.5.24	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	40					
1.5.25	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	100					
1.5.26	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	
1.6.	Sosial							
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	60	50	55	60		
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	50	55	60	65		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	55.00	61.35	67.70	74.05		Kerja
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	200	200	400	600		
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	90	90	90	90		
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	85	90	95	100		
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	100	100	100	100		
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	50	55	60	65		
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	35	40	45	50		
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	9	9	9	9		
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50	50	50	50		
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan	persen	100	100	100	100		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
	elayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)						
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	80	85	90	100	
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2	2	2	2	
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
2.1.	Tenaga Kerja						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	100	100	100	100	
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2	2	2	2	
2.1.5	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	90	90	95	100	
2.1.6	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	50	50	60	70	
2.1.7	Persentase kenaikan UMP	persen	4.00	4.5	5.00	5.5	
2.1.8	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	60	60	70	80	
2.1.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	80	80	80.52	81.04	
2.1.10	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2.00	1.80	1.62	1.46	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
2.1.11	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	60	60	65	70	70	
2.1.12	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	80	80	85	90	90	
2.2.	Pangan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	25.00	25.00	30.00	35.00		
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	40.00	38.00	36.00	34.00		
2.2.3	Skor PPH	skor	92.67	92.67	92.91	93.00		
2.3.	Pertanahan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	80	80.00	85.00	90.00		
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	60	60.00	70.00	90.00		
2.4.	Lingkungan Hidup							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20	20	20	20	60	
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10	
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	2.00	2.00	1.09	1.08	1.08	
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12	12	12	12	48	
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1	1	1	1	4	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	80	80.00	85.00	90.00	90.00	
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	40	45.00	50.00	65.00	65.00	
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	50	55.00	60.00	65.00	65.00	
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	20	20	20	20	80	
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	2	2	2	8	
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	85.78	89.74	93.78	98.18	100	
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	45.67	50.67	56.17	61.67	61.67	
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	55.34	65.49	75.64	85.79	85.79	
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	65	70	75	80	80	
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	45	50	55	60	60	
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	75	80	85	90	90	
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	25.00	23.50	22.00	20.50	20.50	
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	1	1	1	1	1	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10	20	30	40	100	
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	30	35	40	45	45	
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100	100	100	100		300
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	persen	2.25	2.25	2.25	2.00		2.00
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	80	80	85	90		90
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	40	45	50	55		55
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30	30	30	30		90
2.8.	Perhubungan						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	wilayah adat	3					
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	40	45.00	50	55		55
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	2000	1900.00	1700	1500		1500
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	2					
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	3	-	1	1		4
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	3	1	1	-	4	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2	-	1	1		
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	7.0	8.00	8.00	9.00	9.00	
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	4.5	5.00	85.00	90.00	90.00	
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	80	85.00	85.00	90.00	90.00	
2.9.	Komunikasi dan Informatika							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2	1	1	1	5	
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00	
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	80.00	82.50	85.00	8.75	8.75	
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2.10.1	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	2.25					
2.10.2	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	10000.00	150	300	500	500	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.10.3	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30	10	20	30	30	
2.10.4	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	10	5	10	15	15	
2.10.5	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10	5	6	10	10	
2.10.6	Jumlah usaha dalam bentuk koperasi	Rp milyar	15	5	10	15	15	
2.10.7	Persentase koperasi aktif dan berkembang	unit	75	75	80	85	85	
2.11.	Penanaman Modal							
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	100	90	95	100	100	
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.5	8.00	8.00	8.5	8.5	
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	35	25	30	35	35	
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5	5	5	5	15	
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	80	80	80	80	80	
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	10	10	10	10	10	
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	73.84	75.50	77.26	79.02	79.02	
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	85	85	90	95	95	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50	10	10	10		30
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	95.00	70	75	80		80
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	40.00	10	15	15		40
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-					
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-					
2.12.6	Cakupan venue berstandar internasional	persen	-					
2.12.7	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00	100	100	100		300
2.12.8	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	59	15	15	15		45
2.13	Statistik						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	95.00	95.00	95.00	95.00		95.00
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5	5	5	5		15
2.14.	Persandian						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100		100

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.15. Kebudayaan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu	kurikulum	1.00	2	2	2		6
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	2	4	4	4		12
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00	14	15	16		45
2.15.4	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	31	5	5	5		15
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	3	4	5		12
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	50.00	51.00	52.00	53.00		53.00
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5	5	6	6		17
2.16. Perpustakaan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	60.00	65.00	70.00	80.00		80.00
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	90.00	90.00	95.00	100.00	100	
2.17. Kearsipan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah Kearsipan dilakukan penyelamatan	jumlah	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan keputakaan	persen	4.00	4.50	5.00	5.50	5.50	Kearsipan
3.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
3.1.	Pariwisata							Urusan Pilihan Pariwisata
3.1.1	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	15	16	17	18	51	
3.1.2	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	5	6	7	8	8	
3.1.3	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	50	50	50	50	150	
3.1.4	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	250	250	250	250	250	
3.1.5	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	50	50	50	50	150	
3.2.	Pertanian							Urusan Pilihan Pertanian
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20	20	20	20	60	
3.2.2	NTP peternakan	persen	100.00	99.97	99.99	100.00	100	
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	100.00	98.00	99.5	100	100	
3.2.5	NTP perkebunan	persen	100.00					
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	10.00	9.65	9.8	100	100	
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-					
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	4.00	4.29	4.50	4.89		
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	45	50	55	60		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	85	90	95	100		
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	50	55	60	65	70	
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	3.0	3.0	3.5	3.5		
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2	2	2	2	6	
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	15	15	17	20	20	
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	510.00	510.00	512.00	512.70		
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	45	50.00	55.00	60.00		
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2	2	2	2	6.00	
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	70	75.00	80.00	85.00	85.00	
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	37,600,000	38,100,00	38,900,00	39,000,00		
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	40	42.00	44.00	46.00		
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	25	30.00	35.00	40.00		
3.3.	Kehutanan							Urusan Pilihan Kehutanan

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2.5	3.20	3.90	4.60	4.60	
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	30.00	30.76	31.52	32.28	32.28	
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5.27	5.39	5.41	5.53	5.53	
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	30	30.00	35.00	40.00	40.00	
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	50	50.00	55.00	60.00	60.00	
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral							Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	100	80	85	90	90	
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	60	60	65	70	70	
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	100	95	100	100	100	
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	100	100	100	100	100	
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	70	70	75	80	80	
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	100	100	100	100	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	80	80	80	80	80	
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9.5	10.00	10.00	10.00	10.00	
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	60.00	80.8	80.16	80.24	80.24	
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	60.00	60.00	65.00	70.00	70.00	
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00	
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	500	500	500	500		
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100	50	50	50	150	
3.5.	Perdagangan							Urusan Pilihan Perdagangan
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	175.00	175.00				
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	90	90	90	90	90	
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100	100	100	100	100	
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	3,000.00					
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20	5.00	10	15	15	
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	4.00	4.25	4.50	5.00	5.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	150	150	125	100	100	
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	15.25	15.25	15.74	16.23	16.25	
3.6.	Perindustrian						Urusan Pilihan Perindustrian	
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10					
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50					
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1					
3.7.	Kelautan dan Perikanan						Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Persen	70	70	70	70		
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	Jumlah Kabupaten	8	8	8	8		
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	12.000	13.000	14.000	15.000		
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	160.000	170.000	180.000	190.000		
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00		
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	Jumlah	4	4	5	5		
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	Jumlah	8	8	8	8		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah	8	8	8	8	8	
4.	Layanan Penunjang Urusan							
4.1	Perencanaan Pembangunan							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	-					
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	9	9	9	9	9	
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100	100	
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100	100	
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	100	95	95	95	95	
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	95	95	95	95	95	
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	95	95	95	95	95	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	95	95	95	95	95	
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	95	95	95	95	95	
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4	4	4	4	16	
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	95	95	95	95	95	
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	95	95	95	95	95	
4.2.	Keuangan							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100	100	100	100	100	
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	Kabupaten	9	9	9	9	9	
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	100	100	100	100	100	
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100	100	100	100	100	
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	50	55	60	65	70	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	100				
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100	100	100	100	
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	4.60	4,65	4,70	4,75	
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	14.00	14.00	14.00	14.00	
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	3.00	3.00	3.00	3.00	
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	3	3	3	3	
4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00	100.00	100	100	
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	8	8			
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90	90	100	100	
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90	90	100	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85	85	90	90	90	
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100	100	-	-	100	
4.4.	Pelatihan dan Pengembangan							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelatihan dan Pengembangan
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	10	5	8	10	10	
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	60	60	65	70	70	
4.5.	Penerapan SIDA							
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1	1	2	1	4	
4.6.	Pengawasan							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	35	35.00	40.00	45.00	45.00	
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	4	2	2	2	6	
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	50	50.00	55.00	60.00	65.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	35	35.00	40.00	45.00	45.00	
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	60	60.00	70.00	80.00	80.00	
4.7.	Sekretariat Dewan						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja Pengawasan DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada
4.7.2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
1.1.	Pendidikan							
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	56.00	56.00	56	60		65
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	100.00	100.00	100	100		100
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	0.85	0.85	0,85	0,75		0,70
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	0.25	0.25	0,20	0,15	0,12	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
			2023	2024	2025	2026			
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	60.00	60.00	60,00	65,00	70,00		
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200	200	200	200	200		
1.1.7	1 Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	60.00	60.00	60,00	55,00	50,00		
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	85.00	85.00	85,00	90,00	100,00		
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	50.00	50.00	60,00	70,00	80,00		
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	2.00	2.00	5,00	5,00	5,00		
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00	73.00	73,00	75,00	80,00		
1.2.	Kesehatan								Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	40.00	40.00	45,00	50,00	55,00		
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	75.00	75.00	100	100	100		
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	70.00	70.00	80	90	100		
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	100.00	100.00	100	100	100		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Pemukiman
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	40,00	55,00	60,00	65,00	
1.4.	Sosial						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	1000	1000	1000	1000	
1.5.	Pangan						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	

BAB IX

PENUTUP

RPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN. Pelaksanaan Perda tentang RPD Provinsi Papua 2024-2026 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPD akan berakhir periodenya.

IX.I Kaidah Implementasi

Dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama RPJMD baru belum disusun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 2 (dua) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat dalam RPD Provinsi Papua 2024-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPD Provinsi Papua 2024-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Gubernur Papua berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPD Provinsi Papua 2024-2026 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan RPD Provinsi Papua 2024-2026.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023.
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Provinsi Papua 2024-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua berpedoman pada RPD Provinsi Papua 2024-2026 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua

IX.II Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023, sebagai tahun terakhir periode RPJMD Papua. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 (pada saat belum ada RPJMD periode berikutnya) berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua akan menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/

terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

**Plh. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

